



PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

*dalam Dinamika Sosial dan
Multikulturalisme*



Maidatus Sa'diyah, Lc, M. Pd
Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd
Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I
Anton, M. Pd.I.
Muhammad Abror Rosyidin, M.Pd.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Dalam Dinamika Sosial dan Multikulturalisme

Maidatus Sa'diyah, Lc, M. Pd

Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd

Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.1

Anton, M. Pd.I.

Muhammad Abror Rosyidin, M.Pd.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah



PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Dalam Dinamika Sosial dan Multikulturalisme

Penulis:

Maidatus Sa'diyah, Lc, M. Pd

Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd

Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I

Anton, M. Pd.I.

Muhammad Abror Rosyidin, M.Pd.

ISBN:

978-634-7602-35-0

Editor:

Niswatin Nurul Hidayati, S.S., M.A.

Cover:

Maftuhul Ilma Wiratama

Penerbit:

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah

(Penerbit HN Publishing)

Redaksi:

Office I

Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban,
Jawa Timur 62314

Office II

Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372

Email: hn.publishing24@gmail.com

April, 2026

Ukuran:

15.5x23 cm

Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul “Pendidikan Agama Islam dalam Dinamika Sosial dan Multikulturalisme” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan utama dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian.

Buku ini disusun sebagai respons terhadap dinamika sosial yang semakin kompleks di era globalisasi, di mana keberagaman menjadi realitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Perbedaan agama, budaya, etnis, dan latar belakang sosial menuntut adanya pemahaman yang bijaksana serta sikap yang inklusif dalam kehidupan bersama. Dalam konteks inilah, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis sebagai sarana pembentukan karakter, penanaman nilai moderasi beragama, serta penguatan sikap toleransi dan harmoni sosial.

Materi dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran PAI dalam menghadapi tantangan multikulturalisme. Pembahasan meliputi konsep dasar moderasi beragama, dialog antaragama, resolusi konflik, hingga praktik nyata dalam membangun harmoni sosial di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Dengan pendekatan yang integratif antara teori dan praktik, buku ini diharapkan mampu menjadi referensi yang relevan bagi mahasiswa, pendidik, dan pemerhati pendidikan Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Harapan penulis, buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan masyarakat yang damai dan harmonis.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan kehidupan sosial yang penuh toleransi, keadilan, dan persaudaraan di tengah keberagaman.

Salam,
Penulis

DAFTAR ISI

Sampul	i
Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KONTEKS MASYARAKAT MULTIKULTURAL	1
A. Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Multikultural	1
B. Realitas Keberagaman Sosial, Budaya, dan Agama di Indonesia	4
C. Posisi dan Peran Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Majemuk	6
D. Tantangan dan Peluang PAI di Tengah Pluralitas	7
E. Urgensi Pendekatan Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam	9
BAB 2 LANDASAN FILOSOFIS, TEOLOGIS, DAN SOSIOLOGIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	13
A. Landasan Filosofis PAI dalam Perspektif Humanisme dan Kemanusiaan	14
B. Landasan Teologis PAI: Al-Qur'an, Hadis, dan Nilai Rahmatan lil 'Alamin	16
C. Landasan Sosiologis PAI dalam Masyarakat Multikultural	18
D. Integrasi Nilai Keislaman dan Nilai Sosial dalam Pendidikan	20
E. Implikasi Landasan Filosofis, Teologis, dan Sosiologis terhadap Praktik PAI	22
BAB 3 ISLAM DAN MULTIKULTURALISME: KONSEP, NILAI, DAN PRINSIP DASAR	25
A. Konsep Multikulturalisme dalam Perspektif Islam	25

B. Nilai-Nilai Islam tentang Keberagaman dan Keadilan Sosial	27
C. Prinsip Toleransi (Tasamuh), Keadilan ('Adalah), dan Kesenjangan (Musawah)	32
D. Islam sebagai Agama Perdamaian dan Anti-Diskriminasi	37
E. Relevansi Nilai Multikultural Islam dalam Pendidikan Kontemporer	39
 BAB 4 DINAMIKA SOSIAL, IDENTITAS, DAN KEBERAGAMAN DI MASYARAKAT MODERN	42
A. Perubahan Sosial dan Dampaknya terhadap Praktik Keberagaman	42
B. Identitas Keagamaan dalam Era Globalisasi dan Digitalisasi	44
C. Relasi Agama, Budaya, dan Media Sosial	47
D. Tantangan Radikalisme, Intoleransi, dan Polarisasi Sosial	51
E. Peran Pendidikan Agama Islam dalam Merespons Dinamika Sosial	54
 BAB 5 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN MODERASI BERAGAMA	59
A. Konsep Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam	59
B. Prinsip Wasathiyah dalam Pendidikan Agama Islam	70
C. Moderasi Beragama sebagai Strategi Deradikalisasi	79
D. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI I	91
E. Indikator dan Evaluasi Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik	93
 BAB 6 PAI DALAM MEMBANGUN TOLERANSI, DIALOG, DAN HARMONI SOSIAL	96

A. Konsep Toleransi dan Dialog Antarumat Beragama	96
B. Pendidikan Agama Islam sebagai Media Resolusi Konflik Sosial	103
C. Dialog Antaragama dalam Perspektif Pendidikan	111
D. Praktik PAI dalam Membangun Harmoni Sosial di Sekolah dan Masyarakat	118
E. Studi Kasus Penerapan PAI dalam Masyarakat Multikultural	121
 BAB 7 KURIKULUM DAN MATERI PAI BERBASIS MULTIKULTURALISME	124
A. Konsep Kurikulum PAI Berbasis Multikultural	124
B. Integrasi Nilai Multikultural dalam Capaian Pembelajaran PAI	127
 BAB 8 STRATEGI, MODEL, DAN MEDIA PEMBELAJARAN PAI MULTIKULTURAL	153
A. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran PAI Multikultural	153
B. Model Pembelajaran Inklusif dan Partisipatif	157
C. Media Pembelajaran PAI Berbasis Digital dan Budaya Lokal	162
D. Pembelajaran Dialogis dan Kolaboratif dalam PAI	167
E. Evaluasi Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural	173
 BAB 9 PERAN PENDIDIK SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL	178
A. Guru PAI sebagai Teladan Nilai Moderasi dan Toleransi	179
B. Kompetensi Multikultural Pendidik PAI	181

C. Etika dan Profesionalisme Guru dalam Masyarakat Majemuk	184
D. Pendidik PAI sebagai Agen Perdamaian (Peace Builder)	187
E. Transformasi Sosial melalui Pendidikan Agama Islam	189
 BAB 10 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL DI INDONESIA	194
A. Kebijakan Pendidikan Agama Islam dan Multikulturalisme di Indonesia	195
B. Praktik Baik (Best Practices) PAI Multikultural di Berbagai Lembaga	197
C. Sinergi PAI dengan Kearifan Lokal dan Nilai Kebangsaan	200
D. Tantangan dan Arah Pengembangan PAI Multikultural ke Depan	202
 DAFTAR PUSTAKA	206
PROFIL PENULIS	228

BAB 1

Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Masyarakat Multikultural

Struktur kemasyarakatan di era kontemporer tidak lagi dapat dipandang sebagai entitas monolitik yang berdiri di atas satu fondasi nilai yang seragam. Globalisasi, mobilitas penduduk, dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah wajah dunia menjadi sebuah desa global yang mempertemukan berbagai latar belakang identitas dalam satu ruang interaksi. Dalam dinamika tersebut, Pendidikan Agama Islam (PAI) dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan reorientasi peran agar tetap relevan sebagai pemandu moral sekaligus agen harmoni sosial. Sebagai instrumen pendidikan yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, PAI memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter generasi muda yang mampu berdialog dengan perbedaan tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam mengenai dialektika antara ajaran Islam dan realitas multikulturalisme, mulai dari kerangka teoretis masyarakat majemuk hingga strategi implementasi pendidikan agama yang inklusif di Indonesia.

A. Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Multikultural

Memahami masyarakat multikultural memerlukan penelusuran mendalam terhadap akar istilah dan perkembangan ideologinya dalam diskursus sosiologi. Secara etimologis, multikulturalisme berasal dari kata "multi" yang berarti banyak dan "kultural" yang merujuk pada kebudayaan. Namun, dalam konteks keilmuan, multikulturalisme bukan sekadar fakta tentang keberadaan banyak budaya, melainkan sebuah ideologi yang mengakui dan merayakan perbedaan sebagai elemen esensial dalam kehidupan bermasyarakat. Akar kata dari

multikulturalisme adalah kebudayaan, yang dalam pandangan sosiologis dipahami sebagai sistem nilai, norma, dan pedoman yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan sesamanya.

Dalam literatur sosiologi, terdapat perbedaan mendasar antara masyarakat majemuk (plural society) dan masyarakat multikultural. Masyarakat majemuk, sebagaimana dikemukakan oleh J.S. Furnivall, merujuk pada tatanan sosial di mana kelompok-kelompok etnis hidup berdampingan dalam satu unit politik tetapi tetap terpisah secara sosial, dengan interaksi yang sangat terbatas hanya pada sektor ekonomi. Sebaliknya, masyarakat multikultural merupakan tatanan sosial yang ditandai dengan adanya interaksi aktif antar anggotanya melalui proses pembelajaran lintas budaya. Di sini, kedudukan setiap unsur kebudayaan adalah setara, dan tujuan utamanya adalah mencapai keadilan serta pengakuan terhadap identitas masing-masing kelompok tanpa adanya diskriminasi.

Konsep multikulturalisme juga mengakui adanya diferensiasi intra-kultural, yaitu variasi identitas yang ada di dalam satu kelompok budaya itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa identitas manusia bersifat cair dan kompleks, sehingga tidak dapat disederhanakan dalam satu label tunggal. Multikulturalisme menjadi alat untuk meningkatkan martabat manusia dengan cara memberikan ruang bagi setiap individu untuk berpartisipasi dan merasa dihargai dalam masyarakat.

Untuk mengidentifikasi masyarakat multikultural, para ahli sosiologi telah merumuskan sejumlah karakteristik inti. Pierre L. Van den Berghe memberikan kontribusi besar dengan menguraikan beberapa ciri umum masyarakat plural dan multikultural yang dapat diamati secara empiris.

Karakteristik Masyarakat Multikultural	Deskripsi dan Implikasi Sosial
Segmentasi Sub-Kebudayaan	Terjadinya pembelahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda-

			beda dan terpisah satu sama lain.
Struktur Sosial Non-Komplementer			Memiliki lembaga-lembaga sosial yang terbagi dan tidak saling melengkapi, sehingga koordinasi antar kelompok sering kali sulit dilakukan.
Rendahnya Konsensus Dasar			Kurangnya pengembangan konsensus di antara para anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar (basic values), karena setiap kelompok memiliki standar moralnya sendiri.
Frekuensi Konflik yang Relatif Tinggi			Secara relatif, sering kali mengalami konflik antar kelompok akibat perbedaan kepentingan, norma, dan persaingan sumber daya.
Integrasi Berbasis Paksaan			Integrasi sosial cenderung tumbuh di atas paksaan (coercion) atau ketergantungan ekonomi, bukan atas kesadaran murni akan persatuan.
Dominasi Politik			Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain, yang sering kali memicu ketidakadilan sistemik.

Karakteristik-karakteristik di atas menunjukkan bahwa masyarakat multikultural memiliki kerentanan alami terhadap disintegrasi jika tidak dikelola dengan baik. Namun, multikulturalisme sebagai paradigma menawarkan visi "peaceful coexistence" atau hidup berdampingan secara damai. Individu dalam masyarakat ini tidak dilihat sebagai entitas yang terisolasi, melainkan sebagai bagian dari organisme hidup yang terus tumbuh dan berkembang melalui adaptasi terhadap perbedaan.

Dalam perspektif global, para pemikir seperti Bhikhu Parekh dan Will Kymlicka memberikan kedalaman teoretis tambahan. Parekh berpendapat bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa komunitas budaya dengan konsepsi dunia, sistem makna, dan nilai-nilai yang berbeda namun saling tumpang tindih. Respons normatif terhadap diversitas ini menentukan apakah masyarakat tersebut akan menjadi monokultural dalam tindakannya atau benar-benar multikultural. Sementara itu, Will Kymlicka menekankan pada hak-hak minoritas dalam bingkai kewarganegaraan, di mana negara harus memberikan perlindungan eksternal bagi identitas budaya minoritas agar tidak tergerus oleh keputusan mayoritas.

Di Indonesia, diskursus mengenai karakteristik multikulturalisme juga dipengaruhi oleh kondisi geografis. Negara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau menciptakan isolasi alami yang melahirkan ratusan kelompok etnis dengan bahasa dan sistem sosial budaya yang unik. Karakter multikultural Indonesia sering digambarkan sebagai "liquid multiculture" atau multikultural cair, di mana antar etnis yang berdekatan secara budaya relatif mudah berintegrasi, namun tetap terdapat kendala pada kelompok-kelompok dengan identitas yang lebih kaku.

B. Realitas Keberagaman Sosial, Budaya, dan Agama di Indonesia

Indonesia berdiri sebagai bukti nyata dari sebuah eksperimen sosial besar mengenai keberagaman. Realitas kemajemukan bangsa ini bukan hanya merupakan warisan sejarah, tetapi juga data empiris yang terus berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, populasi Indonesia diproyeksikan mencapai 281.603.900 jiwa. Jumlah yang masif ini terdistribusi dalam berbagai kelompok umur dan jenis kelamin, dengan dominasi kelompok usia produktif yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pendidikan agama.

Keberagaman di Indonesia mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari agama, etnis, hingga bahasa. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui enam agama utama, namun dalam praktiknya, pluralitas keyakinan jauh melampaui angka tersebut, termasuk berbagai aliran kepercayaan.

Agama Indonesia (Data 2024)	di Jumlah Pemeluk (Jiwa)	Persentase (%)	Landasan Kitab Suci
Islam	245.775.401	87,2%	Al-Qur'an
Protestan	19.432.669	6,9%	Al-Kitab
Katolik	8.166.713	2,9%	Al-Kitab
Hindu	4.786.000	1,7%	Weda
Buddha	1.971.227	0,7%	Tripitaka
Khonghucu	140.802	0,05%	Shishu Wujing

Data di atas menunjukkan bahwa Islam adalah agama mayoritas dengan penganut lebih dari 245 juta jiwa. Namun, penyebaran agama-agama lain juga signifikan dan terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya, penganut Hindu terbesar berada di Bali, sementara penganut Kristen dan Katolik memiliki konsentrasi tinggi di wilayah timur Indonesia. Keberagaman ini didukung oleh infrastruktur keagamaan yang luar biasa, di mana pada tahun 2024 Indonesia tercatat memiliki lebih dari 404 ribu rumah ibadah.

Dalam dimensi etnisitas, Indonesia merupakan rumah bagi 1.340 suku bangsa. Suku Jawa merupakan kelompok etnis terbesar yang mencakup sekitar 40,22% dari total penduduk atau lebih dari 95 juta jiwa. Kekayaan etnis ini diikuti oleh keberagaman linguistik yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan bahasa daerah terbanyak di dunia, yaitu mencapai 718 bahasa daerah. Bahasa-bahasa ini tersebar di seluruh wilayah, dengan jumlah terbanyak berada di Papua dan wilayah timur lainnya.

Realitas sosial budaya ini juga dipengaruhi oleh sejarah panjang perjumpaan dengan budaya luar. Pluralitas di Indonesia terbentuk melalui pengaruh Hindu-Buddha dari India, pengaruh budaya Islam dari Timur Tengah dan Gujarat, hingga pengaruh budaya Barat selama masa kolonial. Transformasi sosial budaya saat ini menjadi pilar penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, di mana penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi agenda strategis nasional.

Meskipun Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi, data menunjukkan bahwa potensi konflik cenderung

rendah jika dibandingkan dengan skala keberagamannya. Hal ini dikarenakan struktur masyarakat Indonesia yang heterogen namun tidak terpolar secara tajam. Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengikat identitas nasional yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut. Namun, dinamika migrasi penduduk ke perkotaan dan pertumbuhan sektor industri non-agraris terus mengubah pola interaksi sosial, dari yang berbasis kekerabatan tradisional menjadi interaksi modern yang lebih kompleks dan multikultural.

C. Posisi dan Peran Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Majemuk

Di tengah kompleksitas masyarakat yang majemuk, Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang posisi strategis sebagai instrumen pembentukan karakter dan moral bangsa. PAI bukan sekadar mata pelajaran formal di sekolah, melainkan sebuah sistem nilai yang diharapkan mampu mentransformasi peserta didik menjadi individu yang saleh secara ritual dan sosial. Pendidikan agama saat ini sedang bergairah membangun kembali institusinya untuk memenuhi kebutuhan identitas individu di tengah kemajemukan.

Posisi strategis PAI dapat dianalisis melalui beberapa peran utama yang dijalankannya dalam konteks masyarakat majemuk. Pertama, PAI berfungsi sebagai fondasi moderasi beragama. PAI diposisikan sebagai instrumen vital dalam memperkuat toleransi dan moderasi di tengah masyarakat yang rentan terhadap konflik rasial maupun keagamaan. Tujuannya adalah memberikan pencerahan mengenai fenomena keberagaman sebagai ketetapan Tuhan yang harus disikapi dengan bijak.

Kedua, PAI berperan sebagai kekuatan integratif. Di tengah masyarakat yang cenderung sektarian, PAI diharapkan mampu memberikan pencerahan dan menjadi kekuatan yang menyatukan. Namun, ada catatan kritis bahwa dalam beberapa kasus, pendidikan agama yang disampaikan secara sempit justru dapat menjadi kekuatan disintegratif jika terjebak dalam primordialisme dan eksklusivisme kelompok. Oleh karena itu, reformasi kurikulum PAI yang menekankan pada pemahaman untuk hidup dalam perbedaan menjadi sangat mendesak.

Ketiga, PAI berperan dalam pengembangan masyarakat madani (civil society). PAI bertujuan memproduksi pemimpin dan warga

negara yang memiliki nilai-nilai kewargaan (civic values) yang kuat, inklusif, dan berkomitmen pada keadilan sosial. Dalam makna pertumbuhan dan perkembangan, PAI harus mampu melahirkan proses pemanusiaan (humanisasi) secara terus-menerus menuju bangsa yang adil dan bijak.

Peran guru PAI dalam konteks ini sangat krusial. Guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen transformasi kebudayaan dan model perilaku bagi peserta didik. Implementasi peran ini di sekolah dilakukan melalui berbagai strategi:

1. Pendekatan Inklusif: Mengajarkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi dengan fokus pada pesan universal Islam yang dapat diterapkan oleh semua individu tanpa memandang latar belakang mereka.
2. Model Beyond the Wall: Mengalihkan pengajaran dari model "in the wall" yang hanya fokus pada agama sendiri, menuju model dialogis yang mengajak siswa bekerja sama dengan penganut agama lain demi perdamaian dan harmoni.
3. Penguatan Karakter Sosial: Menanamkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam interaksi sosial sehari-hari.

Secara substantif, PAI dalam masyarakat majemuk harus mampu menampilkan ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum yang menitikberatkan pada upaya hidup dalam perbedaan agama dan budaya secara kelompok maupun individual. PAI harus mengajarkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh (kaffah) namun tetap menghormati keyakinan orang lain. Hal ini penting agar nilai-nilai agama tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dekadensi moral serta tantangan globalisasi yang semakin kompleks.

D. Tantangan dan Peluang PAI di Tengah Pluralitas

Dinamika pluralitas di Indonesia menghadirkan medan perjuangan yang penuh tantangan bagi Pendidikan Agama Islam, namun sekaligus menawarkan peluang besar untuk berkembang. Tantangan-tantangan yang dihadapi PAI bersifat multidimensi, mencakup aspek teologis, sosiologis, hingga teknologi.

Salah satu tantangan teologis terbesar adalah fenomena klaim kebenaran (truth claim). Kecenderungan konflik sering kali

bersumber dari masing-masing kelompok keagamaan yang merasa ajarannya paling benar sementara yang lain sesat. Sifat eksklusivisme ini dapat memicu konflik sosial lintas agama yang berkelanjutan jika tidak dimitigasi melalui pendidikan yang moderat. Selain itu, adanya persoalan teologi yang saling menarik antar agama besar serta beban sejarah masa lalu (seperti kebijakan politik kolonial) menjadi hambatan sosiologis dalam perkembangan pemikiran keagamaan yang universal.

Tantangan sosiologis lainnya meliputi:

- Radikalisme dan Intoleransi: Munculnya paham keagamaan yang sempit menunjukkan adanya celah dalam sistem PAI yang kurang menekankan nilai-nilai moderasi.
- Dikotomi Ilmu: Pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum (sekularisme) masih menjadi masalah mendasar yang mereduksi makna PAI, menjadikannya seolah-olah terpisah dari realitas sosial harian.
- Kesenjangan Sosial Ekonomi: Perbedaan status ekonomi dan kepentingan politik sering kali memanipulasi doktrin agama demi kekuasaan, yang memicu kecemburuan sosial dan perpecahan bangsa.
- Kualitas SDM: Rendahnya kualitas sumber daya manusia pendidik yang harus bersaing di tengah masyarakat informasi yang rasional dan inovatif menjadi kendala dalam penyampaian pesan agama yang progresif.

Di sisi lain, era pluralitas dan globalisasi menawarkan peluang emas bagi PAI untuk melakukan reformasi dan penguatan peran. Pertama, adanya peluang untuk penguatan integrasi nasional. Sikap toleransi dan rasa saling menghargai perbedaan yang dipromosikan oleh PAI dapat menjadi penopang utama keutuhan bangsa. PAI dapat menjadi media resolusi konflik untuk mengatasi segregasi sosial yang mungkin terjadi.

Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi membuka peluang bagi penguatan ajaran agama melalui sumber daya digital seperti aplikasi PAI, platform video pembelajaran, dan media sosial untuk menjangkau generasi milenial secara lebih efektif. PAI masa depan dapat memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk menyampaikan konten yang lebih personal dan relevan dengan kebutuhan siswa.

Ketiga, adanya jaminan konstitusional. Pancasila dan UUD 1945 memberikan jaminan hukum bagi eksistensi keberagaman agama, sehingga PAI memiliki landasan legalitas yang kuat untuk mengembangkan model pendidikan yang menghargai pluralisme. Indonesia berpeluang menjadi negara percontohan dunia dalam merawat kerukunan umat beragama melalui sistem pendidikan agamanya.

Keempat, pencarian titik temu (konvergensi). Terdapat peluang besar untuk mencari konvergensi antar agama melalui nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, etika, dan tanggung jawab sosial untuk menolong mereka yang terpinggirkan. Dengan merawat hubungan horizontal sesama manusia, agama justru akan memperkuat rasa kebangsaan penganutnya.

E. Urgensi Pendekatan Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam

Penerapan pendekatan multikultural dalam PAI bukan sekadar tren akademis, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial bagi masyarakat Indonesia. Urgensi ini muncul karena PAI multikultural berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya yang kerap terjadi. Dengan menanamkan nilai-nilai multikultural sejak dini, peserta didik diharapkan tidak tercerabut dari akar budaya nusantara di tengah gempuran budaya global yang dapat mendisorientasi cara pandang kehidupan mereka.

Landasan teoretis yang sering digunakan dalam pengembangan PAI multikultural adalah teori James A. Banks. Banks menawarkan lima dimensi pendidikan multikultural yang komprehensif untuk mengubah struktur lembaga pendidikan.

Dimensi Multikultural James Banks	Implementasi dalam Kurikulum PAI
Integrasi Konten (Content Integration)	Mengintegrasikan pahlawan, tokoh, dan elemen budaya dari berbagai etnis dan agama ke dalam materi ajar PAI untuk mengilustrasikan konsep universal.
Konstruksi Pengetahuan (Knowledge Construction)	Mengajari siswa bagaimana berpikir kritis dan memahami

		bahwa pengetahuan serta tafsir agama sering kali dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan posisi sosial.
Pengurangan Prasangka (Prejudice Reduction)		Melalui diskusi dan interaksi, guru membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap kelompok ras dan etnis yang berbeda, serta mengurangi stereotipe.
Pedagogi Kesetaraan (Equity Pedagogy)		Guru menyesuaikan metode mengajar dengan cara belajar siswa yang beragam untuk memfasilitasi prestasi akademik bagi semua siswa tanpa diskriminasi.
Pemberdayaan Sekolah	Budaya	Menciptakan iklim sekolah yang setara, di mana struktur sosial dan budaya akademik mendukung pertumbuhan setiap individu dari latar belakang mana pun.

Secara teologis, pendekatan multikultural dalam PAI memiliki akar yang sangat kuat dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat menjadi landasan normatif yang tidak terbantahkan:

- Surat Al-Hujurat Ayat 13: Menegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda bangsa dan suku bukan untuk saling membedakan atau membanggakan diri, melainkan untuk saling mengenal (ta'aruf). Kemuliaan manusia di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh ras atau status sosialnya.
- Surat Ar-Rum Ayat 22: Menjelaskan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus dihormati sebagai bagian dari keindahan ciptaan-Nya.
- Surat Al-Maidah Ayat 48: Mendorong umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat) di tengah

perbedaan syariat dan jalan yang diberikan Allah kepada masing-masing umat.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, urgensi pendekatan multikultural semakin terlihat melalui penekanan pada nilai-nilai Demokratis, Humanis, dan Pluralis. Pendidikan PAI tidak lagi hanya berfokus pada hafalan teks (indoktrinatif), tetapi beralih ke pendekatan konstruktivistik di mana siswa aktif menggali makna ajaran agama secara kontekstual. Implementasi nyata di sekolah menengah menunjukkan bahwa kegiatan seperti doa bersama sesuai agama masing-masing sebelum pembelajaran PAI dimulai, atau menempatkan siswa berbeda agama dalam satu meja, efektif dalam menumbuhkan rasa toleransi dan empati.

Akhirnya, urgensi ini berkaitan dengan pembentukan masyarakat madani yang beradab. Pendidikan Islam multikultural diarahkan untuk melahirkan individu yang inklusif, adaptif, dan mampu menjadi agen perubahan sosial yang toleran. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai wasathiyah (moderat), PAI menjadi solusi yang adaptif terhadap tantangan masyarakat kontemporer, memastikan bahwa agama tetap menjadi sumber kedamaian dan harmoni bagi seluruh umat manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran sentral dalam mengelola dinamika masyarakat multikultural di Indonesia. Keberagaman sosial, budaya, dan agama yang merupakan realitas empiris bangsa ini menuntut PAI untuk tidak sekadar menjadi penjaga tradisi, tetapi menjadi kekuatan transformatif yang progresif. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik masyarakat multikultural yang penuh dengan segmentasi dan potensi konflik, PAI harus memposisikan diri sebagai jembatan dialog dan fondasi moderasi beragama.

Tantangan berupa radikalisme, eksklusivisme, dan disorientasi budaya akibat globalisasi harus dijawab dengan peluang digitalisasi dan penguatan nilai-nilai universal Islam yang inklusif. Urgensi pendekatan multikultural, yang dilandasi oleh teori pendidikan modern seperti dimensi James Banks dan diperkuat oleh tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang kemanusiaan, menjadi kunci utama bagi keberhasilan PAI di masa depan. Implementasi PAI yang menghargai kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan universal tidak hanya akan melahirkan individu yang taat secara spiritual, tetapi juga warga negara yang

berkomitmen pada harmoni sosial demi terwujudnya masyarakat madani yang dicita-citakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 2

Landasan Filosofis, Teologis, dan Sosiologis Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam era kontemporer bukan sekadar entitas pengajaran ritual keagamaan yang statis, melainkan sebuah instrumen dinamis yang berada di persimpangan antara tradisi sakral dan realitas sosial yang majemuk. Sebagai sebuah disiplin yang bertujuan membentuk manusia seutuhnya, PAI memerlukan fondasi yang kokoh untuk menopang seluruh struktur pedagogisnya di tengah terjangan globalisasi dan dinamika multikulturalisme. Landasan ini merupakan pijakan fundamental atau titik tolak dalam melakukan segala upaya pengembangan pendidikan dalam segala aspeknya. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek filosofis, teologis, dan sosiologis menjadi prasyarat mutlak bagi para praktisi dan akademisi pendidikan Islam agar proses transformasi nilai tidak kehilangan ruh moral maupun relevansi sosialnya.

Eksistensi PAI dalam sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pembentuk karakter dan nilai-nilai spiritual peserta didik dalam konteks masyarakat yang dinamis secara budaya. Upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengamalkan ajaran Islam ini harus mampu menjawab tantangan kompleksitas zaman. Oleh karena itu, Bab ini akan mengeksplorasi secara mendalam tiga pilar utama yang menjadi landasan PAI, yakni pilar filosofis yang berorientasi pada kemanusiaan, pilar teologis yang bersumber pada wahyu ilahi, serta pilar sosiologis yang berpijak pada realitas keragaman masyarakat.

A. Landasan Filosofis PAI dalam Perspektif Humanisme dan Kemanusiaan

Filsafat pendidikan Islam merupakan konsep berpikir tentang hakikat kemampuan manusia Muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Landasan filosofis memberikan arah bagi perumusan kebijakan pendidikan Islam yang mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif humanisme, pendidikan Islam memandang manusia sebagai subjek utama yang memiliki martabat tinggi dan potensi fitrah yang harus dikembangkan secara holistik.

1. Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Kemanusiaan dalam PAI

Dalam tradisi filsafat ilmu, terdapat tiga landasan pokok untuk memahami hakikat pendidikan Islam: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk melihat bagaimana PAI memposisikan manusia dalam skema alam semesta.

Prinsip Ontologis PAI berangkat dari pemahaman bahwa Allah SWT adalah wujud transenden yang merupakan *al-Khaliq* (Pencipta), sedangkan manusia dan alam semesta adalah ciptaan-Nya. Secara ontologis, manusia berupaya mencapai kematangan melalui pendidikan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di alam fisik maupun non-fisik. Pendidikan memiliki peranan urgen dalam mentransfer prinsip-prinsip ini sehingga manusia menyadari posisinya sebagai hamba sekaligus khalifah di muka bumi.

Prinsip Epistemologis dalam PAI menekankan bahwa segala bentuk pengetahuan dan ilmu merupakan manifestasi dari kebesaran Allah. Epistemologi pendidikan Islam mengintegrasikan antara wahyu ilahi dengan penggunaan akal pikiran serta pengamatan terhadap fenomena alam (*sunnatullah*). Hal ini mendorong peserta didik untuk memiliki daya analisis yang tajam, kritis, dan dinamis dalam memahami realitas di sekitarnya. Pengetahuan dalam Islam tidak bersifat dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum, melainkan sebuah kesatuan yang utuh untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan.

Prinsip Aksiologis berkaitan dengan nilai dan tujuan. Tujuan utama pendidikan Islam secara aksiologis adalah pembentukan

karakter atau akhlak mulia. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab menjadi standar etika yang harus diinternalisasi oleh peserta didik. Aksiologi PAI mengarahkan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui keselarasan hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta.

Dimensi Filosofis	Fokus Utama dalam PAI	Implikasi Terhadap Peserta Didik
Ontologi	Hakikat manusia sebagai hamba dan khalifah Allah.	Kesadaran akan identitas diri dan tanggung jawab eksistensial.
Epistemologi	Integrasi wahyu, akal, dan observasi alam.	Kemampuan berpikir kritis yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.
Aksiologi	Pembentukan akhlak mulia dan karakter holistik.	Perwujudan perilaku yang etis, adil, dan penuh kasih sayang dalam sosial.

2. Humanisme Islam: Memanusiakan Manusia melalui Pendidikan

Humanisme dalam pendidikan Islam sering kali diidentikkan dengan proses humanisasi atau "memanusiakan manusia". Berbeda dengan humanisme sekuler yang sering kali menafikan peran Tuhan, humanisme dalam PAI bersifat teosentris-humanis. Artinya, penghargaan terhadap martabat manusia didasarkan pada fakta bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia yang dibekali dengan akal dan hati.

Perspektif humanisme dalam PAI memberikan kebebasan, pengalaman langsung, serta kreativitas kepada peserta didik. Model ini bertujuan membangkitkan minat belajar melalui suasana yang membahagiakan, yang saat ini dalam konteks Indonesia sangat relevan dengan semangat "Merdeka Belajar". Pendidikan humanistik menekankan pada pengembangan potensi anak secara menyeluruh—intelektual, emosional, sosial, dan spiritual—dengan memperhatikan kebutuhan individu masing-masing peserta didik.

Pendidik dalam pandangan humanisme Islam tidak bertindak sebagai instruktur yang otoriter, melainkan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan inklusif dan demokratis. Melalui hubungan yang penuh perhatian dan rasa hormat, anak-anak merasa dihargai sebagai individu yang unik, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk memiliki empati dan kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain. Humanisme ini juga bersinggungan dengan etika global, di mana kesadaran beragama menuntut adanya kesederajatan, penghormatan, dan perlakuan yang sama terhadap sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya.

3. Relevansi dengan Filsafat Pancasila di Indonesia

Di Indonesia, landasan filosofis PAI juga diperkuat oleh nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Terdapat keselarasan yang fundamental antara sila-sila Pancasila dengan prinsip-prinsip PAI dalam konteks kemanusiaan. Integrasi ini bertujuan membangun manusia Indonesia yang religius sekaligus nasionalis, harmonis, dan beradab.

Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" selaras dengan konsep tauhid, sementara sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" mendukung pembentukan akhlak mulia yang menjadi inti dari PAI. PAI yang berlandaskan Pancasila memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang secara cerdas di masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai manusiawi dan kultural lokal. Landasan filosofis ini sangat relevan dengan pilar belajar dunia dari UNESCO: *learning to be, learning to know, learning to do, dan learning to live together*.

B. Landasan Teologis PAI: Al-Qur'an, Hadis, dan Nilai Rahmatan lil 'Alamin

Landasan teologis merupakan fondasi keimanan yang menghubungkan praktik pendidikan dengan sumber otoritas keagamaan tertinggi, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam teologi Islam, pendidikan dipandang sebagai perintah Allah dan sebuah kewajiban sosial yang bertujuan untuk *taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri kepada Allah).

1. Visi Rahmatan lil 'Alamin dalam Al-Qur'an

Prinsip teologis paling mendasar dalam PAI untuk masyarakat multikultural adalah konsep *Islam Rahmatan lil 'Alamin*. Konsep

ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 107: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Ayat ini mengandung makna bahwa risalah Islam bukan hanya hadir untuk umat Muslim, melainkan untuk membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar.

Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, cakupan rahmat ini bersifat universal dan kontinu, menjadikan setiap Muslim dituntut untuk menjadi agen rahmat dalam kehidupan sehari-hari. Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* juga menekankan bahwa misi Nabi adalah menanamkan akidah tauhid yang holistik, yang memahami seluruh fenomena alam dan kemanusiaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.²⁰ Pendidikan Islam yang berlandaskan teologi rahmat ini akan melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual namun lembut secara emosional dan kuat secara spiritual.

Aspek Rahmatan lil 'Alamin	Dasar Teologis (Ayat/Hadis)	Prinsip Pendidikan yang Diturunkan
Universalitas Kasih Sayang	QS. Al-Anbiya: 107.	Pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif.
Penghargaan Perbedaan	QS. Al-Hujurat: 13.	Penanaman nilai toleransi dan saling mengenal (<i>Ta'aruf</i>).
Kebebasan Beragama	QS. Al-Baqarah: 256.	Tidak adanya paksaan dalam proses pendidikan dan keyakinan.
Keadilan Sosial	QS. Mumtahanah: 8.	Perlakuan adil kepada semua orang tanpa memandang agama.

2. Nilai-Nilai Teologis dalam Pembentukan Karakter

Terdapat sembilan nilai utama yang sering dikaitkan dengan konsep *Rahmatan lil 'Alamin* dalam pendidikan Islam, yang

bersumber dari eksplorasi terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai ini meliputi kedamaian, keindahan, keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial. Implementasi nilai-nilai ini melalui PAI diharapkan dapat menciptakan suasana sekolah yang damai dan harmonis.

Teologi pendidikan Islam juga menekankan pentingnya *Uswatun Hasanah* atau keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus untuk menyempurnakan moralitas kemanusiaan yang luhur (*li utammima makarim al-akhlaq*). Oleh karena itu, landasan teologis PAI tidak hanya berhenti pada teori keimanan, tetapi harus dimanifestasikan dalam bentuk amal nyata dan interaksi yang santun terhadap sesama (*Ad-din al-mu'amalah*).

3. Teologi Inklusivisme dan Dialog Antarumat

Landasan teologis PAI juga mencakup prinsip-prinsip interaksi dengan non-Muslim dalam masyarakat plural. Al-Qur'an mengajarkan untuk tidak mencela sesembahan agama lain (QS. Al-An'am: 108) dan mendorong perdebatan dengan cara yang terbaik (*ihsan*) (QS. Al-Ankabut: 46). Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 secara eksplisit menyatakan bahwa keragaman manusia dalam bangsa-bangsa dan suku-suku adalah untuk saling mengenal (*li ta'arufu*).

Secara praktis, hadis-hadis Nabi menunjukkan kemudahan (*samhah*) dalam beragama dan kelonggaran dalam urusan muamalah duniawi dengan penganut agama lain. Nabi SAW memberikan contoh nyata melalui kerjasama bisnis dan kehidupan bertetangga yang baik dengan komunitas Yahudi dan Nasrani di Madinah. Hal ini memberikan dasar teologis yang kuat bagi PAI untuk mengajarkan bahwa seorang Muslim dapat memiliki komitmen religius yang kuat sekaligus menjadi warga negara yang toleran dan kooperatif dalam masyarakat multikultural

C. Landasan Sosiologis PAI dalam Masyarakat Multikultural

Landasan sosiologis memahami pendidikan sebagai proses sosial yang terjadi dalam konteks budaya dan masyarakat tertentu. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia, dengan keragaman etnis, bahasa, dan agama yang sangat kompleks. Dalam konteks ini, PAI memiliki peran strategis sebagai

perekat sosial dan pengelola keberagaman agar tidak menjadi sumber perpecahan.

1. Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Sosiologis

Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang memanfaatkan latar belakang budaya peserta didik untuk meningkatkan pembelajaran dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi serta kesetaraan. Secara sosiologis, PAI berbasis multikultural didasarkan pada pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitas yang unik dan beragam.

Terdapat beberapa prinsip pokok pendidikan multikultural yang relevan dengan sosiologi masyarakat Indonesia:

- Demokrasi dan Kesetaraan: Pendidikan harus memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada setiap individu tanpa memandang kelas sosial atau latar belakang etnis.
- Kemanusiaan dan Kedamaian: Mengembangkan sikap saling menghargai untuk menciptakan keharmonisan sosial.
- Pluralisme Budaya: Menghargai keragaman sebagai kekayaan bangsa dan anugerah Tuhan.

Pendidikan agama yang diberikan di sekolah tidak boleh bersifat eksklusif yang memicu fanatisme buta, melainkan harus mampu mendidik siswa agar bersedia menerima kelompok lain sebagai bagian dari kesatuan bangsa. Landasan sosiologis ini menuntut kurikulum PAI untuk responsif terhadap realitas sosial dan tidak terasing dari dinamika masyarakat sekitarnya.

2. PAI sebagai Media Resolusi Konflik dan Integrasi Bangsa

Dinamika sosial di Indonesia sering kali diwarnai oleh tantangan intoleransi, prasangka sosial, dan potensi konflik antar kelompok. Secara sosiologis, PAI berperan dalam mengurangi prasangka tersebut dengan cara memperkenalkan nilai-nilai Islam yang inklusif dan moderat (*Wasathiyah*). Pendidikan Islam multikultural berfungsi sebagai media resolusi konflik melalui penanaman sikap toleransi sejak dini.

Sosiokultural masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keramahan, kepedulian sosial, dan gotong royong merupakan modal sosial yang harus diintegrasikan ke dalam praktik PAI. Kurikulum PAI tidak hanya mentransfer pengetahuan teks suci secara literal, tetapi juga merevitalisasi cara peserta didik memahami ajaran agama secara kontekstual di tengah lingkungan

sosial mereka. Dengan demikian, PAI berkontribusi dalam membentuk "masyarakat madani" yang beradab dan bermartabat.

3. Pengaruh Lingkungan Belajar dan Sosialisasi

Pendidikan bersifat sistemik dan penyebarannya cukup merata di berbagai wilayah Indonesia, menjadikannya sarana paling efektif untuk sosialisasi nilai-nilai multikultural. Dalam sosiologi pendidikan, lingkungan sekolah (termasuk interaksi antara siswa, guru, dan staf) menciptakan sebuah "budaya madrasah" yang memengaruhi pembentukan karakter peserta didik.

Penerapan PAI di sekolah-sekolah umum yang memiliki populasi siswa heterogen menuntut adanya sensitivitas sosiologis dari para pendidik. Misalnya, dalam praktik ibadah atau cara berdoa, sekolah yang beragam cenderung menerapkan cara yang lebih inklusif untuk menjaga perasaan semua pihak. Hal ini merupakan manifestasi dari landasan sosiologis yang mengutamakan harmoni tanpa mengorbankan identitas keagamaan masing-masing.

D. Integrasi Nilai Keislaman dan Nilai Sosial dalam Pendidikan

Integrasi nilai merupakan upaya untuk menyatukan nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai sosial dan pengetahuan umum agar tidak terjadi dualisme pemikiran dalam diri peserta didik. Pendidikan Islam pada hakikatnya tidak mengenal dikotomi ilmu; ilmu yang bersumber dari wahyu maupun dari observasi alam semesta dianggap sebagai satu kesatuan yang dibimbing oleh "kebenaran mutlak".

1. Mekanisme Integrasi Nilai dalam Pembelajaran

Integrasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan dilakukan melalui beberapa pendekatan strategis:

- **Wholeness Integration:** Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya terbatas pada jam pelajaran agama. Contohnya adalah pengintegrasian nilai keislaman dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) pada Kurikulum Merdeka.
- **Pendekatan Tauhidik:** Memahami seluruh ilmu pengetahuan sebagai manifestasi keagungan Allah, sehingga mempelajari sains dipandang sebagai bagian dari ibadah.

- Internalisasi melalui Budaya Sekolah: Menciptakan atmosfir yang Islami melalui simbol, tata nilai, dan praktik harian seperti salam, kejujuran, dan kebersihan.

Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan nilai universal yang juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam. PAI yang efektif adalah yang mampu menghubungkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis dengan fenomena sosial kontemporer, seperti isu lingkungan hidup (eko-filsafat), hak asasi manusia, dan keadilan gender.

2. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Islam dan Sosial

Tujuan utama integrasi ini adalah pembentukan karakter yang holistik. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*Sidiq*), tanggung jawab (*Amanah*), kasih sayang (*Rahmah*), dan toleransi (*Tasamuh*) menjadi fondasi bagi karakter peserta didik. Tanpa internalisasi nilai-nilai ini, pendidikan hanya akan menjadi transfer informasi tanpa arah moral dan spiritual.

Jenis Nilai	Contoh Manifestasi dalam Pendidikan	Dampak Terhadap Karakter
I'tiqodiyah	Keyakinan tauhid dan rukun iman.	Keteguhan prinsip dan kedamaian batin.
Khuluqiyah	Etika berpakaian, berbicara, dan bergaul.	Sopan santun dan kematangan emosional.
Amaliyah	Praktik ibadah dan kemanusiaan.	Disiplin dan kepedulian sosial yang nyata.

Pendidikan nilai bertujuan membantu peserta didik mengembangkan kemahiran berinteraksi pada tahapan yang lebih tinggi serta meningkatkan kebersamaan dalam masyarakat. Hal ini dicapai melalui keseimbangan antara pengajaran teori dan praktik di sekolah. Integrasi ini juga mencakup pemanfaatan kearifan lokal sebagai media untuk memperkuat identitas keagamaan dan kebangsaan secara bersamaan.

3. Tantangan dan Peluang Integrasi di Era Digital

Di era digital, integrasi nilai menghadapi tantangan berupa polarisasi sosial dan degradasi nilai akibat informasi yang tidak terfilter. Namun, kemajuan teknologi juga menawarkan peluang

bagi PAI untuk menggunakan media yang lebih menarik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Literasi digital yang berbasis pada etika Islam (digital akhlak) menjadi komponen baru dalam integrasi nilai sosial di era kontemporer. PAI harus mampu membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi agar tetap berada pada koridor kebenaran dan kedamaian.

E. Implikasi Landasan Filosofis, Teologis, dan Sosiologis terhadap Praktik PAI

Ketiga landasan yang telah dibahas sebelumnya memberikan implikasi praktis yang signifikan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan tidak lagi dijalankan atas dasar kebiasaan belaka, melainkan didasarkan pada pertimbangan filosofis dan teologis yang mendalam.

1. Transformasi Kurikulum dan Metode Pengajaran

Landasan filosofis-teologis mengarahkan kurikulum PAI agar menjadi responsif dan adaptif terhadap tantangan modernitas, globalisasi, dan pluralisme agama. Implikasinya meliputi:

- **Perumusan Tujuan:** Tujuan pendidikan tidak hanya mencakup transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan "Insan Kamil" yang beriman, berakhlak mulia, dan kompeten secara intelektual.
- **Isi dan Materi:** Materi PAI harus mencakup etika moral dan teori teologis yang terintegrasi dengan isu-isu sosial dan kearifan lokal.
- **Metodologi:** Guru menggunakan pendekatan yang lebih dialogis, inklusif, dan humanis. Metode seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan kunjungan lapangan ke tempat-tempat ibadah agama lain menjadi bagian dari strategi pembelajaran untuk meningkatkan empati siswa.

Praktik PAI di sekolah multikultural menuntut guru untuk memiliki wawasan yang luas dan tidak dogmatis. Guru berperan sebagai jembatan yang menghubungkan ajaran agama dengan realitas keberagaman di kelas, memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai tanpa memandang latar belakang agamanya.

2. Peran Pendidik sebagai Teladan (*Role Model*)

Implikasi landasan teologis dan filosofis sangat menekankan pada figur guru. Guru bukan hanya penyampai materi, melainkan *Uswatun Hasanah* yang mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam perilaku sehari-hari. Keberhasilan guru dalam menanamkan nilai multikultural sangat bergantung pada kepribadiannya dan kemampuannya untuk berinteraksi secara intensif dan tulus dengan siswa.

Di sekolah multikultural, guru harus menunjukkan sikap toleransi ekstrem dan menghargai perbedaan pendapat. Perilaku guru yang terbuka dan tidak diskriminatif akan memberikan pengalaman langsung bagi siswa tentang bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Keteladanan ini merupakan instrumen paling efektif dalam pendidikan karakter dibandingkan sekadar ceramah di dalam kelas.

3. Sistem Evaluasi yang Berbasis Nilai dan Budaya

Landasan sosiologis dan filosofis juga berimplikasi pada sistem evaluasi pembelajaran. Penilaian tidak boleh hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi harus mencakup refleksi terhadap nilai-nilai moral dan pengamalan hukum Islam dalam konteks sosial. Evaluasi PAI dalam masyarakat multikultural diarahkan untuk mengukur perubahan sikap keagamaan dan sikap sosial peserta didik, seperti tingkat toleransi, apresiasi terhadap perbedaan, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial.

Komponen PAI	Praktik	Implikasi Landasan	Bentuk Implementasi Nyata
Perencanaan		Kurikulum berbasis kearifan lokal dan moderasi.	Penyusunan silabus yang memasukkan nilai karakter dan toleransi.
Pelaksanaan		Pendekatan humanis dan pembelajaran eksperiensial.	Diskusi lintas budaya dan pengabdian masyarakat.
Lingkungan Sekolah		Penciptaan budaya sekolah yang inklusif dan agamis.	Program pembiasaan ibadah dan adab sosial harian.

Evaluasi	Penilaian autentik terhadap karakter dan perilaku sosial.	Jurnal refleksi diri dan observasi sikap di luar kelas.
----------	---	---

Implementasi PAI yang didasarkan pada ketiga landasan ini terbukti efektif di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Payakumbuh, Salatiga, dan Rejang Lebong, dalam membangun budaya damai dan meningkatkan toleransi beragama siswa. Dengan demikian, landasan filosofis, teologis, dan sosiologis bukan sekadar teori akademik, melainkan panduan hidup bagi praktik pendidikan yang bertujuan mencetak generasi Muslim yang moderat, cerdas, dan berkontribusi positif bagi peradaban global.

Kesimpulan dan Sintesis Strategis

Landasan filosofis, teologis, dan sosiologis merupakan trilogi fondasi yang tak terpisahkan dalam konstruksi Pendidikan Agama Islam di tengah dinamika multikulturalisme. Secara filosofis, PAI memuliakan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi fitrah untuk dikembangkan secara merdeka namun terarah. Secara teologis, PAI bersumber dari pancaran rahmat ilahi yang universal, yang menuntut umatnya untuk menjadi pembawa kedamaian bagi semesta. Secara sosiologis, PAI berpijak pada realitas keragaman bangsa Indonesia, menjadikannya sebagai instrumen integrasi sosial dan resolusi konflik.

Implikasi dari ketiga landasan ini menuntut adanya transformasi menyeluruh dalam praktik PAI—mulai dari kurikulum yang lebih adaptif, metode pembelajaran yang lebih humanis, hingga peran guru yang lebih transformatif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai sosial secara harmonis, PAI akan mampu melahirkan individu yang memiliki kesalehan spiritual sekaligus kesalehan sosial. Generasi yang dihasilkan adalah mereka yang tidak hanya fasih dalam teks agama, tetapi juga cakap dalam konteks sosial, mampu hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan, serta aktif menebarkan manfaat sebagai perwujudan nyata dari ajaran *Rahmatan lil 'Alamin*. Masa depan PAI terletak pada kemampuannya untuk tetap setia pada akar wahyu sambil terus melebarkan dahan kemanusiaannya di tengah dinamika dunia yang terus berubah.

BAB 3

Islam dan Multikulturalisme: Konsep, Nilai, dan Prinsip Dasar

A. Konsep Multikulturalisme dalam Perspektif Islam

Istilah multikultural dalam bahasa Arab disebut sebagai *alata'addudiyyah al-thaqafiyyah*, gabungan dari kata *ak-ta'addudiyyah* berarti banyak, berbilang, lebih dari satu, atau bermacam-macam dan *al-thaqafiyyah* yang berarti kebudayaan atau pendidikan, yang secara singkat difahami sebagai keanekaragaman (Yanto, 2025). Secara konseptual, multikulturalisme merupakan suatu pandangan yang menekankan pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan latar belakang sosial dalam kehidupan masyarakat (Indah et al., 2023). Dalam masyarakat multikultural, perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan sosial yang harus dikelola secara adil dan harmonis. Prinsip utama dalam multikulturalisme adalah terciptanya kehidupan bersama yang damai, setara, dan saling menghormati di tengah perbedaan identitas dan keyakinan (Makmun et al., 2021). Jadi pada dasarnya multikulturalisme dapat difahami sebagai konsep yang menekankan kepada pengakuan terhadap perbedaan, keberagaman, dan kemajemukan budaya, agama, bahasa, dan ras sebagai realita sosial yang harus diterima dan dihargai.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* secara tegas mengakui dan menghargai keberagaman manusia. Dalam perspektif Islam, perbedaan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, melainkan bagian

dari *sunnatullah*, yaitu ketetapan Allah Swt. dalam menciptakan manusia. Al-Qur'an secara jelas telah menyebutkan bahwa perbedaan manusia dalam hal suku, bangsa, bahasa, dan latar belakang bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan diciptakan dengan tujuan tertentu. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya "*Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*" Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (*ta'aruf*) dan juga menunjukkan bahwa Islam menempatkan keberagaman sebagai sarana untuk membangun relasi sosial yang saling menghargai, bukan sebagai alasan untuk saling merendahkan (Ruslam, 2026). Selain itu, Islam juga menekankan prinsip persamaan derajat manusia. Dalam ajaran Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya (Rahmawati et al., 2024). Prinsip ini menjadi dasar bagi lahirnya sikap anti-diskriminasi dalam Islam. Perbedaan agama, suku, atau budaya tidak boleh dijadikan dasar untuk merendahkan atau menyingkirkan pihak lain.

Dalam perspektif Islam, multikulturalisme bukan hanya tentang pengakuan terhadap keberagaman budaya, tetapi juga tentang membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara individu dan kelompok-kelompok budaya yang berbeda (Melati & Hamdanah, 2024). Islam menekankan pentingnya kerjasama antarmanusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik, seperti kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama (Syathori, 2023). Oleh karena itu, pemahaman Islam tentang multikulturalisme dapat diartikan menuntut kesediaan untuk berdialog, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan individu-individu dan kelompok-kelompok budaya yang berbeda demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dalam ajaran Islam, multikulturalisme menegaskan persatuan asal manusia dan pentingnya toleransi, keadilan,

dan saling penghormatan antar budaya, kemudian Al-Qur'an menekankan nilai-nilai inklusi sosial dan penghargaan terhadap keberagaman budaya.

Konsep multikulturalisme dalam perspektif Islam tentunya juga dapat dipahami secara sederhana melalui praktik kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pendidikan. Dalam sebuah kelas yang terdiri dari siswa dengan latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda, setiap individu diajarkan untuk saling menghormati, seperti tidak mengganggu teman yang sedang beribadah serta tidak merendahkan keyakinan orang lain. Islam juga menegaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam beragama, sehingga setiap siswa memiliki kebebasan dalam menjalankan keyakinannya. Selain itu, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama, misalnya dalam kegiatan kelompok, siswa tetap dapat berkolaborasi tanpa memandang latar belakang masing-masing. Sikap saling mengenal dan menghargai budaya juga menjadi bagian penting, seperti menunjukkan ketertarikan terhadap kebiasaan atau tradisi teman dari daerah lain tanpa sikap meremehkan. Lebih dari itu, semua siswa diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, baik dari segi agama, suku, maupun status sosial. Dengan demikian, multikulturalisme dalam Islam tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam sikap toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.

B. Nilai-Nilai Islam tentang Keberagaman dan Keadilan Sosial

Nilai adalah sesuatu yang disukai dan selalu diinginkan oleh setiap manusia, dicita-citakan dan disepakati yang dianggap sangat penting dan berharga (Muchtar & Safitri, 2025). Dalam Islam, nilai-nilai tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial. Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam tentunya sudah mengatur nilai-nilai yang akan berlangsung dalam kehidupan salah satunya nilai kemanusiaan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, termasuk dalam konteks

keberagaman dan kehidupan sosial. Keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan bagian dari kehendak Allah Swt. Keberagamaan atau religiusitas merupakan tingkat pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan seseorang atas ajaran agama yang diyakininya, atau suatu sikap penyerahan diri kepada suatu kekuatan yang ada di luar dirinya yang diwujudkan dalam aktivitas dan perilaku individu sehari-hari (Mubarak & Muslihah, 2022). Oleh karena itu, Islam menetapkan seperangkat nilai dasar yang mengatur bagaimana manusia harus bersikap dalam perbedaan, agar kehidupan bersama dapat berlangsung secara damai, adil, dan bermartabat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai kemanusiaan, toleransi, keadilan, kesetaraan, serta kerja sama dan perdamaian.

1. Nilai Kemanusiaan (*Al-Insāniyyah*)

Islam memandang setiap manusia memiliki martabat dan kehormatan yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Allah. Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh anak cucu Adam telah dimuliakan oleh Allah, tanpa membedakan suku, ras, bangsa, maupun agama. Nilai kemanusiaan ini menjadi fondasi utama dalam Islam untuk membangun hubungan sosial yang adil dan bermartabat. Nilai-nilai kemanusiaan yang ditekankan dalam agama Islam sangat memengaruhi perilaku, hubungan sosial, dan tata nilai orang Muslim. Nilai-nilai ini termasuk keadilan, kesetaraan, kebebasan, hak asasi manusia, tanggung jawab sosial, kejujuran, dan kedamaian. Menghormati martabat manusia tanpa memandang agama, etnis, atau status sosial mereka sangat penting dalam agama Islam (Islami et al., 2023). Dengan mengambil dan mengamalkan nilai-nilai ini, umat Islam diharapkan dapat membantu membangun masyarakat yang adil, berempati, dan harmonis, sesuai dengan ajaran agama Islam yang penuh kasih sayang dan perdamaian.

Menerapkan nilai-nilai kemanusiaan seperti menghargai keragaman, berempati, menghindari kekerasan, berkolaborasi, dan memperhatikan hak asasi

manusia membawa dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan beradab. Dalam era teknologi dan globalisasi, implementasi nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Syafudin et al., 2023). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan modern, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berkeadilan, perdamaian, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari dari implementasi nilai kemanusiaan adalah membantu siswa membantu teman yang sedang kesulitan belajar tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Selain itu, bersikap sopan kepada semua orang, seperti guru, teman, maupun petugas sekolah, juga merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

2. Nilai Toleransi (*Tasamuh*)

Salah satu nilai utama Islam dalam menyikapi keberagaman adalah toleransi (*tasāmuh*). Istilah toleransi disebut dengan "*tasamuh*". Kata *tasamuh* dalam Islam ini diartikan sebagai "keamanan", "perdamaian", dan "penyerahan". Sedangkan menurut istilah adalah posisi pemikiran dan tindakan yang berdasarkan pada penerimaan terhadap pemikiran dan perbuatan yang dilakukan orang lain, baik itu tindakannya sesuai atau berbeda dengannya (Anwar, 2022). Maka maksud dari *tasāmuh* ialah bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi, misalnya toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar agama.

Tasāmuh dalam agama bukanlah mencampurkan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut orang lain (Afina & Yuliani, 2024). Toleransi dalam Islam bukan berarti menyamakan semua keyakinan, tetapi menghormati hak setiap manusia untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinannya. Al-Qur'an menegaskan prinsip kebebasan beragama dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam

beragama (Saenong et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui keberagaman keyakinan sebagai realitas sosial yang harus dihormati, bukan dihapuskan. Dalam masyarakat multikultural, toleransi menjadi landasan penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik. Contoh sederhana dalam nilai ini adalah seperti Siswa memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk beribadah sesuai keyakinannya, serta tidak mengganggu atau mengejek praktik ibadah tersebut. Selain itu, saling menghargai perbedaan pendapat saat diskusi di kelas juga merupakan bentuk toleransi.

3. Nilai Keadilan (*'Adalah*)

Nilai penting selanjutnya adalah keadilan (*'adalah*). Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan sosial. Allah Swt. dalam Al-Qur'an telah menyebutkan konsep keadilan sebanyak 78 kali (Ode, 2025). Keadilan berasal dari kata Arab "*adl*" yang berarti keseimbangan tingkah laku dan tingkah laku. Keseimbangan tidak hanya mencakup keseimbangan hak dan kewajiban, namun juga keserasian dengan sesama makhluk (Asroruddin & Marta, 2024). Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai dengan haknya atas janji yang telah dibuatnya memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil, bahkan kepada orang-orang yang tidak disukai.

Dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8 "*Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa...*". Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh mendorong seseorang untuk berlaku tidak adil (Jamiah et al., 2025). Dalam konteks masyarakat multikultural, nilai keadilan bermakna memperlakukan semua individu dan kelompok secara setara tanpa membedakan agama, suku, ras, atau status sosial. Keadilan sosial dalam Islam bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban, melindungi kelompok yang lemah, serta mencegah terjadinya penindasan dan diskriminasi. Contoh yang sering kita temui dalam

penerapan nilai ini adalah Ketika bekerja dalam kelompok, setiap anggota mendapatkan tugas yang sama sesuai kemampuan, tanpa pilih kasih. Guru juga memberikan penilaian berdasarkan usaha dan hasil kerja siswa, bukan karena kedekatan pribadi.

4. Nilai Kesetaraan (*Musawah*)

Islam mengajarkan nilai kesetaraan (*musāwah*), yaitu bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt. Tidak peduli jenis kelamin, ras, kebangsaan, budaya, atau negara asal mereka, setiap manusia memiliki martabat dan nilai bawaan yang sama. Ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini memberikan penjelasan tentang pengertian *musawah*: *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami telah membagi kamu menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku yang berbeda agar kamu dapat saling belajar satu sama lain. Bahkan, orang di antara kamu yang paling saleh akan dianggap paling terhormat oleh Allah. Padahal Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui (QS al-Hujurat [49]: 13).”* Ayat di atas menjelaskan keesaan asal usul manusia dengan menunjukkan persamaan derajat manusia baik laki-laki maupun perempuan (Heriyudanta, 2023). Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, setiap orang layak mendapatkan rasa hormat dan martabat yang sama.

Konsep *musawah* dalam Islam memerlukan seperangkat gagasan yang diharapkan dapat dipahami oleh setiap Muslim. Salah satu konsep tersebut menyatakan bahwa kesetaraan adalah hasil dari keadilan dalam Islam. Setiap orang berada pada level yang sama, dan tidak ada hak istimewa yang diberikan kepada beberapa orang atas yang lain (Parnawi & Syahrani, 2024). Ini termasuk menjaga hak-hak non-Muslim, persamaan pria dan wanita dalam agama dan kewajiban lainnya, perbedaan yang ada di antara manusia dalam masyarakat, persamaan di depan hukum, persamaan dalam memegang jabatan publik, dan persamaan dalam kesatuan yang asli

bagi manusia. Seperti contoh di dalam kelas, semua siswa memiliki hak yang sama untuk bertanya, berpendapat, dan mendapatkan perhatian dari guru, tanpa dibedakan antara siswa yang pintar maupun yang masih belajar. Selain itu, tidak membedakan teman berdasarkan latar belakang ekonomi juga merupakan bentuk kesetaraan.

C. Prinsip Toleransi (*Tasamuh*), Keadilan (*Adalah*), dan Kesetaraan (*Musawah*)

Dalam Islam, kehidupan sosial tidak dibangun di atas keseragaman, tetapi di atas nilai-nilai yang mampu mengelola perbedaan secara adil dan bermartabat. Oleh karena itu, Islam menetapkan tiga prinsip utama dalam membangun relasi sosial di tengah masyarakat yang majemuk, yaitu toleransi (*tasāmuh*), keadilan (*‘adālah*), dan kesetaraan (*musāwah*). Ketiga prinsip ini menjadi landasan etik yang mengarahkan umat Islam agar mampu hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam realitas sosial yang beragam.

1. Toleransi (*Tasamuh*)

Toleransi atau *tasāmuh* merupakan sikap lapang dada dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam Islam, *tasamuh* bukan berarti mengaburkan batas-batas akidah, melainkan memberikan ruang bagi setiap individu dan kelompok untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan dan intimidasi (Indah et al., 2023). Prinsip ini menegaskan bahwa keberagaman merupakan realitas sosial yang harus disikapi dengan kebijaksanaan dan sikap saling menghormati (Muchtar & Sriwilujeng, 2025). Islam mengajarkan bahwa perbedaan agama, pandangan, dan praktik ibadah merupakan bagian dari kehendak Allah yang tidak boleh dijadikan alasan untuk menimbulkan konflik atau permusuhan.

Salah satu wujud utama dari *tasamuh* adalah saling menghormati keyakinan dan praktik ibadah

(Faizin et al., 2024). Dalam agama Islam, akidah dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan ataupun kepercayaan yang tumbuh di dalam sanubari hati manusia dan tidak dapat dipaksakan keberadaannya. Dari aqidah inilah dijabarkan menjadi beberapa unsur keimanan (Bin, 2021). Sehingga Islam sangat menekankan pentingnya keberadaan iman dalam diri manusia. Iman sebagai suatu ketetapan dan membenaran hati yang diimplementasikan dalam konteks kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan seluruh ajaran yang ada dalam agama. Demikian pula keberadaan agama lain, puncak dari semua ajarannya adalah ketuhanan (ketauhidan atau teologi). Setiap agama pastilah memiliki sebuah konsep ataupun sistem ketuhanan. Dengan keterkaitannya dengan pelaksanaan toleransi, keberadaan aqidah harus tetap eksis dan terpelihara. Pengertian Islam tidak membenarkan toleransi yang mengakibatkan pengaburan ataupun merusak keberadaan aqidah dalam diri manusia adalah toleransi yang bersifat kompromi. Sifat kompromi dalam toleransi dengan jalan melaksanakan praktek upacara keagamaan ataupun ibadah dengan bersama-sama. Hal ini bukanlah dikatakan sebagai sebuah toleransi melainkan sinkretis (Fajrussalam et al., 2022). Toleransi dalam agama Islam tidak diartikan sebagai sebuah pengakuan kebenaran terhadap keberadaan semua agama dan tidak pula dimaknai sebagai kesediaan untuk mengikuti ibadah-ibadah di agama lain, tetapi kebebasan seseorang dapat memilih keyakinan secara sadar tanpa adanya paksaan.

Oleh karena itu dalam agama islam tidak dibenarkan pemaksaan terhadap sebuah keyakinan (iman) mengingat pembentukan keyakinan harus dilakukan seseorang sejara sadar dan tanggungjawab. Bahkan selain memberi kebebasan beragama, Islam juga memberi kebebasan untuk tidak beragama sama sekali atau atheis (Musbikin, 2021). Namun Perlu diketahui bahwa setiap pilihan tentu ada konsekuensinya masing-masing. Jadi perinsip

kebebasan beragama dalam islam merupakan fitrah dan hak setiap manusia dari tuhan untuk dipertanggungjawabkan.

Tasamuh juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan sosial. Dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai latar belakang agama dan budaya, toleransi menjadi kunci utama untuk mencegah konflik. Dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki keyakinan dan cara hidup yang berbeda (Saenong et al., 2025). Kerukunan sosial yang terbangun atas dasar *tasamuh* akan menciptakan rasa aman, saling percaya, dan solidaritas antarwarga.

Selain itu, toleransi dalam Islam juga diwujudkan melalui dialog dan komunikasi yang baik. Islam mendorong umatnya untuk berdialog secara santun, terbuka, dan penuh hikmah dalam menghadapi perbedaan. Dialog menjadi sarana untuk saling memahami, mengurangi prasangka, serta membangun jembatan komunikasi antar kelompok yang berbeda (AbdilahYusup, 2024). Melalui dialog dan komunikasi yang sehat, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat persatuan dalam masyarakat multikultural.

Contoh penerapan prinsip toleransi adalah tidak membuat kegaduhan saat tetangga yang berbeda agama sedang merayakan hari raya, dan kita tentunya harus menunjukkan rasa hormat terhadap perayaan keagamaan orang lain. Menghargai pendapat orang lain dalam berdiskusi dan mendengarkan dengan seksama dengan mempertimbangkan sudut pandang berbeda.

2. Keadilan (*'Adalah*)

Keadilan (*'adālah*) merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam ajaran Islam. Islam memandang keadilan sebagai landasan utama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan bermartabat (Asroruddin & Marta, 2024). Keadilan

tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarindividu, kelompok sosial, maupun dalam sistem kemasyarakatan. Dalam masyarakat multikultural, prinsip keadilan sangat penting agar tidak terjadi diskriminasi, penindasan, atau perlakuan tidak setara terhadap kelompok tertentu.

Prinsip pertama dalam keadilan adalah keadilan dalam hukum yang merupakan bentuk keadilan yang paling mendasar. Islam menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan status sosial, suku, ras, atau agama. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Ode, 2025). Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua warga masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan sewenang-wenang terhadap pihak yang lemah.

Untuk prinsip yang kedua ada prinsip keadilan sosial dan ekonomi juga menjadi perhatian utama dalam Islam. Keadilan tidak hanya berarti kesamaan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup pemerataan hak dan kesempatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Islam mendorong adanya kepedulian terhadap kelompok yang kurang mampu serta menolak praktik eksploitasi dan ketimpangan yang merugikan sebagian pihak (Sari et al., 2024). Dalam masyarakat multikultural, keadilan sosial dan ekonomi penting untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah kecemburuan sosial yang dapat memicu konflik.

Prinsip keadilan yang terakhir adalah keadilan dalam perkataan dan tindakan berarti bahwa setiap individu harus bersikap jujur, objektif, dan tidak berat sebelah dalam berbicara maupun bertindak. Islam mengajarkan agar seseorang tidak memihak karena kepentingan pribadi, kebencian, atau kedekatan emosional (Puspitasari, 2023). Sikap adil dalam perkataan dan tindakan akan mencegah fitnah, prasangka, dan konflik yang merusak keharmonisan sosial. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari mengenai nilai keadilan adalah jika anda melihat

sahabat karib anda melakukan kesalahan atau merusak barang orang lain, anda tetap mengatakan yang sebenarnya saat ditanya, bukan berbohong untuk melindunginya.

3. Kesetaraan (*Musawah*)

Kesetaraan atau *musāwah* merupakan prinsip penting dalam Islam yang menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. Islam tidak membenarkan adanya pembedaan manusia berdasarkan ras, suku, warna kulit, status sosial, jenis kelamin, maupun latar belakang agama. Semua manusia berasal dari sumber yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa, sehingga tidak ada satu pun kelompok yang secara hakiki lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain (Rahmawati et al., 2024). Prinsip ini menjadi fondasi kuat dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif di tengah keberagaman.

Dalam Islam, perbedaan yang ada di antara manusia bukanlah untuk menimbulkan hierarki atau diskriminasi, melainkan sebagai sarana untuk saling mengenal dan bekerja sama. Al-Qur'an menegaskan bahwa yang membedakan manusia di hadapan Allah bukanlah asal-usul atau identitas sosialnya, melainkan tingkat ketakwaannya (AbdilahYusup, 2024). Dengan demikian, kesetaraan dalam Islam tidak berarti menghilangkan perbedaan, tetapi mengakui bahwa perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk merendahkan, menyingkirkan, atau mendiskriminasi pihak lain.

Prinsip *musāwah* memiliki implikasi yang sangat kuat dalam masyarakat multikultural. Kesetaraan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil dan bermartabat, tanpa memandang latar belakang keyakinan atau budayanya. Dalam kehidupan sosial, prinsip ini mendorong terciptanya sikap saling menghargai, keterbukaan, dan inklusivitas. Setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan,

ekonomi, dan politik tanpa diskriminasi. Selain itu, kesetaraan juga berfungsi sebagai dasar bagi terbentuknya keadilan sosial. Tanpa pengakuan terhadap kesetaraan manusia, keadilan tidak mungkin terwujud secara utuh (Parnawi & Syahrani, 2024). Oleh karena itu kesetaraan menjadi pilar penting dalam Islam untuk membangun tatanan masyarakat yang harmonis, damai, dan bermartabat di tengah realitas keberagaman. Seperti contoh dalam masyarakat multikultural, umat Islam dilarang merusak tempat ibadah agama lain. Kesetaraan di sini berarti memberikan ruang bagi penganut agama lain untuk menjalankan syariat mereka sendiri tanpa merasa terancam.

D. Islam sebagai Agama Perdamaian dan Anti-Diskriminasi

Islam hadir sebagai agama yang membawa misi perdamaian dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Kata *Islam* sendiri berasal dari akar kata *salama* yang bermakna damai, selamat, dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa esensi ajaran Islam tidak terlepas dari upaya mewujudkan kedamaian, baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun dalam hubungan antarmanusia (Asvin & Sungkono, 2022). Dalam konteks masyarakat yang majemuk, Islam menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan bermartabat. Sebagai agama yang mengajarkan kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama, Islam secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi. Setiap manusia dipandang sebagai makhluk Allah yang memiliki martabat dan kehormatan yang sama. Tidak ada satu pun individu atau kelompok yang boleh direndahkan karena perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, maupun status sosial (Hanifah et al., 2020). Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk perlakuan tidak adil, penindasan, dan pengucilan sosial bertentangan dengan ajaran Islam.

Islam juga mendorong umatnya untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik melalui jalan damai.

Dialog, musyawarah, dan sikap saling memaafkan menjadi cara yang dianjurkan dalam menghadapi perbedaan pendapat maupun kepentingan (Hakim, 2024). Dengan pendekatan damai ini, Islam berupaya mencegah kekerasan dan permusuhan yang dapat merusak tatanan sosial (Hadisaputra, 2020). Dalam masyarakat multikultural, prinsip ini sangat relevan karena perbedaan identitas dan keyakinan sering kali berpotensi memicu konflik apabila tidak dikelola dengan bijaksana.

Selain itu, sikap anti-diskriminasi dalam Islam juga tercermin dalam ajaran tentang persaudaraan kemanusiaan (Rifa'i, 2025). Islam memandang seluruh manusia sebagai satu keluarga besar yang berasal dari sumber yang sama. Oleh karena itu, hubungan sosial seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati, keadilan, dan empati. Ketika nilai-nilai ini diterapkan, masyarakat yang beragam dapat hidup berdampingan secara damai tanpa adanya rasa superioritas atau permusuhan antar kelompok (Pamungkas, 2025). Dengan demikian, Islam sebagai agama perdamaian dan anti-diskriminasi memberikan landasan etis yang kuat bagi terciptanya masyarakat multikultural yang inklusif dan harmonis. Melalui nilai kasih sayang, keadilan, toleransi, dan kesetaraan, Islam mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan anugerah yang harus dikelola dengan sikap bijaksana dan penuh tanggung jawab. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang memuliakan setiap nyawa tanpa memandang latar belakangnya. Dengan menjunjung tinggi nilai bahwa "tidak ada paksaan dalam agama" dan mewajibkan sikap adil bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan, Islam membangun fondasi masyarakat multikultural yang harmonis, di mana setiap individu memiliki hak yang setara untuk hidup aman, bermartabat, dan berdampingan dalam naungan rahmat bagi semesta alam (Rahmatan lil 'Alamin).

E. Relevansi Nilai Multikultural Islam dalam Pendidikan Kontemporer

Nilai-nilai multikultural dalam Islam seperti toleransi (*tasāmuh*), keadilan (*‘adālah*), kesetaraan (*musāwāh*), dan perdamaian memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks pendidikan kontemporer. Pendidikan saat ini tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang semakin beragam (Indah et al., 2023). Di tengah globalisasi, arus informasi yang cepat, dan pergaulan lintas budaya, sekolah menjadi ruang penting untuk menanamkan nilai-nilai yang mampu mencegah sikap eksklusif, intoleran, dan diskriminatif.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, nilai *tasāmuh* sangat relevan untuk dikembangkan melalui pendidikan. Peserta didik berasal dari latar belakang agama, budaya, dan sosial yang berbeda, sehingga mereka perlu dibekali sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan (Muchtar & Safitri, 2025). Nilai toleransi dalam Islam mendorong siswa untuk tidak memaksakan keyakinan atau pandangan kepada orang lain, tetapi membangun hubungan sosial yang harmonis berdasarkan sikap saling menghargai. Hal ini penting agar sekolah tidak menjadi ruang konflik, melainkan menjadi tempat tumbuhnya sikap inklusif dan empati sosial.

Nilai keadilan (*‘adālah*) juga memiliki peran penting dalam pendidikan kontemporer. Pendidikan Islam menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang ekonomi, budaya, maupun kemampuan akademik (Parnawi & Syahrani, 2024). Guru sebagai pendidik dituntut untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa dalam belajar, berpendapat, dan berkembang (Muchtar, Arfan, et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas, tetapi juga pribadi yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan menolak segala bentuk diskriminasi.

Selanjutnya, nilai kesetaraan (*musāwah*) dalam Islam memperkuat prinsip bahwa setiap peserta didik memiliki martabat yang sama sebagai manusia. Dalam dunia pendidikan, hal ini berarti bahwa setiap siswa berhak mendapatkan penghargaan, perlindungan, dan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Bahrain et al., 2024). Nilai ini menjadi landasan penting untuk mencegah praktik perundungan, stereotip, dan perlakuan tidak adil di lingkungan sekolah.

Relevansi nilai perdamaian dalam pendidikan juga semakin kuat di tengah meningkatnya potensi konflik akibat perbedaan pandangan, identitas, dan latar sosial. Pendidikan Islam yang berlandaskan nilai-nilai multikultural mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog, musyawarah, dan sikap saling menghormati (Fajrussalam et al., 2022). Dengan demikian, sekolah dapat berfungsi sebagai ruang pembelajaran sosial yang melatih siswa untuk menjadi warga masyarakat yang dewasa, toleran, dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural Islam dalam pendidikan kontemporer, proses pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang unggul secara akademik, tetapi juga pribadi yang memiliki kesadaran moral dan sosial yang tinggi (Melati & Hamdanah, 2024). Dengan dukungan strategi pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam yang memiliki implikasi yang sangat kuat terhadap capaian karakter Islami peserta didik, menegaskan bahwa pembelajaran agama tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak, penguatan iman, serta internalisasi nilai-nilai spiritual dalam diri peserta didik (Muchtar, Nurbaya, et al., 2025). Dengan demikian, strategi yang digunakan guru menjadi faktor penentu apakah nilai-nilai Islam hanya berhenti pada tataran kognitif atau benar-benar terwujud dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Strategi yang bersifat aktif, kontekstual, dan berbasis pengalaman terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, karena peserta didik tidak

hanya memahami konsep, tetapi juga mengalami dan mempraktikkannya secara langsung.

Dalam pemikiran pendidikan Islam yang menekankan bahwa nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sikap toleransi dan menghargai keberagaman di tengah masyarakat multikultural. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik agar mampu hidup secara harmonis dalam perbedaan (Muchtar, Inayati, et al., 2025). Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai, adil, dan bermartabat di tengah realitas keberagaman. Contoh yang sering kita temui dalam dunia pendidikan moderen adalah program "Pertukaran Pelajar" atau "Kunjungan Budaya" antara sekolah berbasis Islam dengan sekolah berbasis agama lain atau sekolah umum. Siswa berdialog tentang nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa harus mencampuradukkan akidah (teologi). Hal ini memecahkan stigma dan prasangka sejak dini, sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam agama Islam.

BAB 4

Dinamika Sosial, Identitas, dan Keberagamaan di Masyarakat Modern

A. Perubahan Sosial dan Dampaknya terhadap Praktik Keberagamaan

Perubahan sosial merupakan proses pergeseran struktur, nilai, norma, dan pola perilaku dalam masyarakat dari waktu ke waktu (Sinambela et al., 2025). Di Indonesia, perubahan sosial terjadi karena berbagai faktor seperti globalisasi, perkembangan teknologi, pendidikan, urbanisasi, serta interaksi antarbudaya dan antaragama. Sebagai negara yang majemuk dengan beragam suku, ras, budaya, dan agama, Indonesia mengalami dinamika sosial yang sangat kompleks. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi dan politik, tetapi juga berdampak langsung pada praktik keberagamaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu dampak perubahan sosial terlihat pada pergeseran budaya dalam praktik keagamaan (Aslan & Pugu, 2025). Dahulu, praktik agama sangat kental dengan tradisi lokal, seperti perayaan keagamaan yang dipadukan dengan adat istiadat setempat. Misalnya, tradisi sekaten di Yogyakarta yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan dakwah Islam. Namun, dengan berkembangnya pemahaman keagamaan yang lebih tekstual dan pengaruh globalisasi, sebagian masyarakat mulai memisahkan praktik agama dari unsur budaya lokal. Perubahan ini menunjukkan adanya proses purifikasi ajaran agama, tetapi di sisi lain dapat memunculkan ketegangan antara

kelompok yang mempertahankan tradisi dengan kelompok yang ingin memurnikan ajaran.

Perubahan sosial juga berdampak pada hubungan antaragama dan antar-ras di Indonesia (Saepullah, 2023). Dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan arus informasi, interaksi antar kelompok menjadi semakin intens. Contohnya, di kota-kota besar seperti Jakarta, masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan etnis hidup berdampingan dalam satu lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Dampaknya, muncul sikap toleransi yang lebih terbuka, seperti kerja sama lintas agama dalam kegiatan sosial (Al-Farochi & Masfufah, 2025). Namun, di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi melalui media sosial juga dapat memicu konflik berbasis agama atau ras. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial membawa peluang integrasi sekaligus potensi disintegrasi.

Perkembangan teknologi digital juga memengaruhi praktik keberagamaan (Dalimunthe, 2025). Dakwah dan pembelajaran agama kini banyak dilakukan melalui media sosial, podcast, dan platform video. Fenomena ini memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan agama, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa munculnya pemahaman keagamaan yang instan dan kurang mendalam. Sebagai contoh, ceramah agama yang viral dapat dengan cepat memengaruhi opini publik tanpa melalui proses klarifikasi ilmiah. Digitalisasi agama menciptakan demokratisasi pengetahuan, namun sekaligus menuntut literasi digital dan literasi keagamaan yang lebih kuat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.

Selain itu, perubahan sosial akibat modernisasi dan peningkatan pendidikan juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap agama (Nendissa, 2025). Generasi muda cenderung lebih kritis dan rasional dalam memahami ajaran agama dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih terbuka terhadap dialog lintas agama dan isu-isu kemanusiaan universal seperti keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Perubahan ini dapat memperkaya praktik keberagamaan

dengan nilai-nilai inklusif, tetapi juga dapat menimbulkan perdebatan dengan kelompok yang berpegang pada interpretasi tradisional.

Secara keseluruhan, perubahan sosial di Indonesia membawa dampak yang beragam terhadap praktik keberagamaan. Di satu sisi, perubahan tersebut mendorong lahirnya sikap toleran, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di sisi lain, perubahan yang terlalu cepat tanpa kesiapan mental dan pendidikan yang memadai dapat memicu konflik dan polarisasi (Hilalludin et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan peran aktif lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah untuk membangun dialog, memperkuat moderasi beragama, serta menjaga harmoni dalam masyarakat Indonesia yang plural. Contoh dalam kehidupan yang moderen ini adalah perubahan Sosial mengenai informasi tentang tradisi, agama, dan budaya lain kini bisa diakses hanya lewat ponsel. Dialog antarbudaya bisa terjadi tanpa tatap muka. Hal ini tentunya memiliki dampak positif seperti meningkatnya literasi lintas budaya. Kampanye perdamaian dan toleransi dapat menyebar lebih cepat dan menjangkau generasi muda secara masif. Akan tetapi pastinya juga memiliki dampak negatif seperti munculnya fenomena *filter bubble* dan *echo chamber*, di mana algoritma media sosial hanya menyajikan informasi yang sesuai dengan keyakinan kita, sehingga berpotensi memicu polarisasi dan penyebaran hoaks yang menyerang kelompok lain

B. Identitas Keagamaan dalam Era Globalisasi dan Digitalisasi

Masyarakat modern ditandai oleh perubahan sosial yang berlangsung cepat sebagai dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi digital (Rahmayanti et al., 2025). Dinamika sosial merujuk pada perubahan yang terjadi dalam struktur, nilai, norma dan pola hubungan sosial di masyarakat. Perubahan ini dapat dipicu oleh faktor internal seperti inovasi budaya, maupun faktor eksternal seperti globalisasi dan perkembangan teknologi.

Masyarakat modern cenderung memiliki karakter terbuka, rasional dan berorientasi pada kemajuan, namun juga menghadapi risiko disintegrasi sosial jika perubahan tidak dikelola dengan baik.

Identitas adalah cara individu atau kelompok mendefinisikan dirinya baik secara personal maupun sosial (Janah et al., 2025). Identitas keagamaan merupakan bagian penting dari identitas sosial yang mencakup keyakinan, praktik ibadah, nilai moral, serta simbol-simbol keagamaan. Dalam masyarakat tradisional, identitas keagamaan biasanya diwariskan secara turun-temurun dan relatif stabil. Namun, dalam masyarakat modern, identitas tersebut mengalami proses redefinisi akibat interaksi dengan berbagai budaya dan pemikiran global.

Keberagaman adalah kondisi adanya perbedaan latar belakang budaya, agama, etnis bahasa, dan pandangan hidup dalam suatu masyarakat (Zahrotunnisa et al., 2025). Keberagaman merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Tantangan utama masyarakat modern adalah bagaimana mengelola keberagaman tersebut agar menjadi sumber kekuatan sosial, bukan pemicu konflik.

Globalisasi memperluas interaksi antarindividu dan kelompok dari berbagai latar belakang agama dan budaya (Irawansah & Pugu, 2025). Pertemuan lintas budaya ini berpengaruh besar terhadap cara seseorang memahami dan mengekspresikan identitas keagamaan. Di satu sisi, globalisasi membuka ruang dialog antaragama dan memperkuat nilai toleransi. Di sisi lain, globalisasi juga dapat memicu krisis identitas, terutama ketika nilai-nilai global dianggap bertentangan dengan ajaran atau tradisi keagamaan lokal.

Dalam konteks ini, identitas keagamaan mengalami dua kecenderungan utama (Zahrah et al., 2025). Pertama, kecenderungan adaptif, yaitu ketika individu mampu menyesuaikan praktik keagamaan dengan konteks global tanpa kehilangan nilai inti ajaran. Kedua, kecenderungan resistif, yaitu sikap mempertahankan identitas keagamaan secara ketat sebagai bentuk

perlindungan dari pengaruh luar yang dianggap mengancam. Contoh adaptasi identitas keagamaan dapat dilihat pada komunitas Muslim perkotaan yang tetap menjalankan ibadah, namun terbuka terhadap kerja sama lintas agama dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Sementara itu, contoh sikap resistif tampak pada kelompok tertentu yang menolak simbol atau budaya global karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keagamaan yang dianut.

Digitalisasi, khususnya melalui internet dan media sosial, telah mengubah cara individu memperoleh pengetahuan dan membangun identitas keagamaan (Bahari & Mauludin, 2025). Informasi keagamaan kini dapat diakses dengan mudah melalui ceramah daring, forum diskusi, dan konten media sosial. Hal ini memungkinkan individu untuk belajar agama secara mandiri dan memilih rujukan sesuai preferensi mereka. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan serius. Informasi keagamaan yang beredar di ruang digital tidak selalu memiliki validitas yang kuat. Munculnya ujaran kebencian, hoaks keagamaan, dan paham ekstrem dapat memengaruhi cara pandang individu terhadap agama lain maupun kelompok internal yang berbeda (Putri, 2025). Akibatnya, identitas keagamaan dapat menjadi lebih eksklusif dan berpotensi memicu konflik sosial. Sebagai contoh, penggunaan media sosial oleh tokoh agama dapat memberikan dampak positif ketika digunakan untuk menyebarkan pesan moderasi, toleransi, dan perdamaian. Sebaliknya, akun anonim yang menyebarkan provokasi berbasis agama dapat memperkeruh hubungan antarumat beragama dan memperkuat stereotip negatif.

Globalisasi dan digitalisasi memiliki dampak ganda terhadap keberagaman dan identitas keagamaan. Dampak positifnya antara lain meningkatnya kesadaran akan pluralitas, terbukanya ruang dialog antaragama, serta penguatan solidaritas global dalam isu-isu kemanusiaan (Bahari & Mauludin, 2025). Individu memiliki kesempatan untuk memahami agama lain secara lebih objektif dan membangun sikap saling menghormati. Namun, dampak

negatifnya tidak dapat diabaikan (Prawirosastro et al., 2025). Ketimpangan akses informasi, penyebaran ideologi intoleran, dan politisasi agama di ruang digital dapat memperlemah kohesi sosial. Jika tidak disertai dengan literasi digital dan pemahaman keagamaan yang moderat, globalisasi dan digitalisasi justru berpotensi memperdalam polarisasi identitas.

Contoh yang sering kita jumpai dalam media sosial sebagai berikut Identitas sebagai orang yang taat kini didukung oleh alat-alat digital yang mempermudah praktik keagamaan. Seperti penggunaan aplikasi Al-Qur'an digital, pengingat waktu salat, serta platform crowdfunding untuk zakat, infak, dan sedekah secara online. Yang berdampak kita dapat melakukan kebaikan dan menjalankan ritual menjadi lebih praktis. Identitas keagamaan seseorang tercermin dari keterlibatan mereka dalam aksi sosial digital untuk membantu krisis kemanusiaan global (seperti bantuan untuk Palestina atau korban bencana alam)

C. Relasi Agama, Budaya, dan Media Sosial

Masyarakat modern ditandai oleh perubahan sosial yang cepat, kompleks, dan sering kali tidak terduga. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, urbanisasi, serta mobilitas sosial yang tinggi telah mengubah cara manusia berinteraksi, berpikir, dan memaknai identitas dirinya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang plural dengan beragam agama, budaya, suku, dan ras, perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur sosial, tetapi juga memengaruhi relasi antara agama, budaya, dan media sosial sebagai ruang publik baru (Harismawan et al., 2023). Agama, sejak lama, menjadi fondasi nilai dan norma dalam masyarakat. Budaya menjadi wadah ekspresi kehidupan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun (Chanra & Kasman, 2025). Sementara itu, media sosial hadir sebagai kekuatan baru yang membentuk opini, perilaku, bahkan identitas individu dan kelompok. Ketiganya kini saling berinteraksi secara dinamis, membentuk wajah

keberagamaan dan kehidupan sosial di era modern. Buku ini membahas bagaimana relasi tersebut berlangsung, bagaimana dampaknya terhadap identitas masyarakat, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam praktik keberagamaan masa kini.

Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keragaman budaya dan agama. Agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Di sisi lain, budaya lokal seperti budaya Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, dan Bali memperkaya praktik sosial masyarakat. Hubungan agama dan budaya di Indonesia sering kali bersifat dialogis dan akomodatif. Sebagai contoh, tradisi Sekaten di Yogyakarta dan Surakarta merupakan bentuk akulturasi antara dakwah Islam dan budaya Jawa. Perayaan Maulid Nabi dikemas dalam tradisi gamelan dan pasar rakyat, menunjukkan bahwa agama tidak selalu hadir dalam bentuk yang kaku, tetapi dapat berinteraksi dengan budaya setempat (Afina & Yuliani, 2024). Di Bali, praktik keagamaan Hindu menyatu dengan adat istiadat lokal. Upacara *Ngaben* bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga peristiwa budaya yang melibatkan solidaritas sosial masyarakat. Analisis terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa agama di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan konteks budaya yang membentuk cara masyarakat memahami dan menjalankan ajaran agama. Namun, modernisasi dan globalisasi memunculkan dinamika baru. Sebagian kelompok mulai menekankan pemurnian ajaran agama dengan mengurangi unsur budaya lokal. Perdebatan antara “agama murni” dan “agama berbasis budaya” menjadi salah satu isu penting dalam dinamika sosial masyarakat modern. Perkembangan teknologi digital menghadirkan media sosial sebagai ruang publik alternatif yang sangat berpengaruh (Hind & Tirtoni, 2023). Platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok memungkinkan individu menyampaikan gagasan, opini, dan identitasnya secara bebas.

Dalam konteks keberagamaan, media sosial menjadi sarana dakwah dan pendidikan agama yang efektif (Mukhroman, 2025). Ceramah yang dahulu terbatas di masjid atau gereja kini dapat diakses jutaan orang melalui siaran langsung atau video pendek. Fenomena ustaz dan pendeta digital menunjukkan transformasi otoritas keagamaan dari ruang fisik ke ruang virtual. Namun, media sosial juga mengubah pola komunikasi. Informasi agama yang tersebar cepat sering kali tidak melalui proses verifikasi akademik. Akibatnya, muncul pemahaman yang instan, potongan ayat atau ajaran yang dipisahkan dari konteksnya, dan perdebatan keagamaan yang emosional (Nainggolan & Mesra, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga arena kontestasi identitas dan ideologi.

Identitas keagamaan di masyarakat modern tidak lagi hanya dibentuk oleh keluarga dan lingkungan lokal, tetapi juga oleh jaringan global (Latifah & Ngalimun, 2025). Seorang remaja di desa dapat mengakses ceramah ulama dari Timur Tengah, Amerika, atau Eropa melalui internet. Hal ini memperluas wawasan, tetapi juga menciptakan kemungkinan benturan nilai. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, identitas keagamaan sering kali ditampilkan melalui simbol visual di media sosial, seperti pakaian religius, kutipan ayat, atau konten dakwah. Media sosial menjadi panggung representasi diri, di mana individu membangun citra sebagai pribadi yang religius.

Fenomena “hijrah digital” misalnya, menunjukkan bagaimana gerakan perubahan diri berbasis agama berkembang melalui komunitas online. Banyak anak muda membagikan perjalanan spiritual mereka melalui unggahan foto, video, dan tulisan reflektif. Analisisnya, identitas keagamaan kini bersifat performatif ditampilkan, dikonstruksi, dan dinegosiasikan di ruang digital. Namun, ada pula risiko polarisasi (Septiawan, 2025). Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna, sehingga individu terjebak dalam “ruang gema” (*echo chamber*). Hal ini dapat

memperkuat pandangan eksklusif dan mengurangi dialog lintas agama maupun lintas budaya.

Media sosial dapat menjadi sarana memperkuat toleransi, tetapi juga berpotensi memicu konflik (Ishak & Tobroni, 2025). Penyebaran hoaks berbasis agama atau ras sering kali memicu ketegangan sosial. Dalam beberapa kasus, isu keagamaan yang viral dapat memperkeruh situasi politik dan sosial. Namun demikian, media sosial juga menjadi wadah kampanye toleransi dan moderasi beragama. Komunitas lintas agama kerap mengadakan diskusi daring, kampanye solidaritas, dan gerakan sosial bersama (Rahmawati et al., 2025). Misalnya, ketika terjadi bencana alam, berbagai komunitas agama bekerja sama menggalang dana melalui platform digital. Analisis menunjukkan bahwa media sosial bersifat netral sebagai teknologi, tetapi dampaknya bergantung pada bagaimana masyarakat menggunakannya. Literasi digital dan literasi keagamaan menjadi kunci untuk mencegah konflik dan membangun dialog yang sehat.

Dalam masyarakat tradisional, otoritas agama berada pada tokoh tertentu seperti kiai, pendeta, atau pemuka adat. Namun, di era digital, siapa pun dapat menjadi “influencer agama” (Komala et al., 2025). Popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman ilmu. Fenomena ini menciptakan demokratisasi pengetahuan, tetapi juga tantangan baru. Masyarakat perlu memiliki kemampuan kritis untuk membedakan antara konten edukatif dan provokatif. Lembaga pendidikan dan institusi agama memiliki peran penting dalam membimbing umat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Media sosial juga mempertemukan agama dengan budaya populer (Hasni & Nadra, 2025). Musik religi, film bernuansa spiritual, hingga busana muslim modern menjadi bagian dari industri kreatif. Identitas keagamaan kadang tampil sebagai gaya hidup (*lifestyle*). Fenomena ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, agama menjadi lebih dekat dengan generasi muda melalui pendekatan kreatif. Di sisi lain, terdapat risiko komersialisasi nilai-nilai sakral. Analisis kritis diperlukan

agar agama tidak sekadar menjadi simbol pasar, tetapi tetap menjadi sumber nilai moral.

Relasi agama, budaya, dan media sosial menunjukkan bahwa keberagamaan di masyarakat modern bersifat dinamis dan terus berubah (Putri, 2025). Tantangan utama bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan bagaimana masyarakat merespons perubahan tersebut. Diperlukan pendekatan inklusif yang mengedepankan dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan karakter, literasi digital, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan universal menjadi fondasi penting dalam membangun harmoni sosial. Contohnya Konten "Lebaran" atau "Hari Raya" di Media Sosial Agama memiliki nilai terhadap dorongan keagamaan untuk merayakan kemenangan setelah berpuasa (Idul Fitri), saling memaafkan, dan mempererat silaturahmi sebagai bagian dari ibadah. Didukung Budaya (Cara Mengekspresikan) sehingga munculnya tradisi lokal seperti memakai baju adat/seragam keluarga, menyajikan makanan khas (ketupat/rendang), dan ritual mudik. Budaya memberikan "warna" lokal pada perayaan agama tersebut, dan media sosial sebagai sarana pengguna mengunggah foto keluarga dengan caption doa, membuat video pendek (Reels/TikTok) tentang keseruan mudik, atau melakukan Video Call grup untuk bermaaf-maafan dengan kerabat yang jauh.

D. Tantangan Radikalisme, Intoleransi, dan Polarisasi Sosial

Radikalisme merupakan paham atau sikap yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara ekstrem, sering kali dengan cara kekerasan atau pemaksaan (Noviansyah, 2025). Dalam masyarakat modern, radikalisme kerap berkembang melalui penyebaran ideologi sempit yang memanfaatkan ketidakpuasan sosial, ketidakadilan ekonomi, atau krisis identitas. Radikalisme tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis (Renaldi, 2025). Individu

yang merasa terpinggirkan atau kehilangan arah identitas cenderung lebih rentan terhadap narasi radikal yang menawarkan kepastian dan rasa memiliki. Sebagai contoh, penyebaran paham radikal melalui media sosial sering menggunakan narasi "kita versus mereka". Kelompok tertentu digambarkan sebagai musuh bersama, sehingga mendorong pembenaran terhadap tindakan ekstrem (Ningrum, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa radikalisme bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga persoalan sosial dan pendidikan.

Intoleransi adalah sikap tidak mau menerima atau menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, pandangan politik, budaya, maupun gaya hidup (Laila, 2025). Dalam masyarakat yang beragam, intoleransi dapat merusak kohesi sosial dan menimbulkan konflik horizontal. Secara sosiologis, intoleransi sering muncul akibat prasangka dan stereotip negatif terhadap kelompok lain (Soniya et al., 2025). Kurangnya interaksi yang sehat antar kelompok memperkuat kesalahpahaman dan rasa curiga. Di era digital, intoleransi semakin mudah menyebar melalui ujaran kebencian dan informasi yang tidak terverifikasi. Contoh nyata intoleransi dapat dilihat dalam penolakan terhadap kelompok minoritas untuk menjalankan aktivitas sosial atau keagamaan. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan sosial, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan (Nathearia et al., 2025). Polarisasi sosial merujuk pada terbelahnya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang berlawanan secara tajam, baik dalam pandangan politik, ideologi, maupun nilai-nilai sosial.

Polarisasi sering diperparah oleh algoritma media sosial yang memperkuat echo chamber, yaitu ruang informasi yang hanya menampilkan pandangan sejalan dengan keyakinan pengguna (Fadillah et al., 2025). Polarisasi sosial menunjukkan bahwa perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi justru berubah menjadi konflik identitas. Diskusi publik kehilangan ruang dialog rasional dan digantikan oleh

saling serang serta delegitimasi pihak lain. Sebagai contoh, dalam momentum politik tertentu, masyarakat dapat terbelah menjadi dua kubu besar yang saling menolak legitimasi satu sama lain. Hubungan sosial, bahkan dalam lingkup keluarga atau pertemanan, dapat terganggu akibat perbedaan pilihan politik yang tidak dikelola secara dewasa (Hadi & Husna, 2025). Menghadapi tantangan radikalisme, intoleransi, dan polarisasi sosial, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pendidikan multikultural menjadi kunci untuk menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini. Selain itu, penguatan literasi digital penting untuk membekali masyarakat agar mampu menyaring informasi secara kritis. Peran negara, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan sangat strategis dalam membangun ruang dialog yang inklusif (Rosyid et al., 2025). Kebijakan publik harus berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan. Contoh kecilnya seperti kasus polarisasi digital dalam isu keagamaan/politik. Pada situasi di mana algoritma media sosial hanya menyajikan konten yang sesuai dengan pandangan politik atau aliran keagamaan satu orang saja. Proses terjadinya polarisasi dapat terjadi jika seseorang terus-menerus disuguhi narasi bahwa kelompoknya adalah yang paling benar, sementara kelompok lain adalah musuh. Ini menciptakan pembelahan tajam (polarisasi) antara "Kami" vs "Mereka". Kemudian munculnya intoleransi karena jarang terpapar sudut pandang yang berbeda, orang tersebut mulai kehilangan empati. Muncul sikap tidak toleran terhadap perbedaan pendapat di kolom komentar, yang sering berujung pada makian atau *hate speech*, bukan hanya itu benih radikalisme tentunya muncul dalam tahap yang lebih jauh, konten-konten ekstrem yang menghalalkan kekerasan atas nama keyakinan mulai masuk ke beranda mereka. Tanpa adanya penyeimbang informasi, individu tersebut bisa teradikalisasi secara mandiri (*self-radicalization*) melalui internet.

E. Peran Pendidikan Agama Islam dalam Merespons Dinamika Sosial

Masyarakat modern ditandai oleh perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti teknologi, ekonomi, budaya, dan pola interaksi sosial (Firmansyah et al., 2025). Perubahan ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, terutama di negara yang majemuk seperti Indonesia. Keberagaman suku, budaya, ras, dan agama menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Dalam konteks ini, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, identitas, dan sikap keberagamaan yang relevan dengan perkembangan zaman. Dinamika sosial tidak dapat dihindari karena merupakan konsekuensi dari globalisasi dan modernisasi. Arus informasi yang cepat, migrasi penduduk, perkembangan media sosial, serta transformasi nilai dalam masyarakat memengaruhi cara individu memahami agama dan identitasnya. Pendidikan agama Islam tidak lagi cukup hanya menyampaikan materi normatif, tetapi juga harus mampu menjawab problem sosial yang muncul akibat perubahan tersebut. Dengan demikian, PAI berperan sebagai jembatan antara ajaran Islam yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dinamika sosial di masyarakat modern dapat dilihat dari meningkatnya mobilitas sosial, perubahan struktur keluarga, hingga berkembangnya budaya digital (Anjani & Fadhil, 2025). Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya menjadi contoh bagaimana masyarakat hidup dalam keberagaman identitas dan latar belakang.

Di satu sisi, interaksi lintas budaya dan agama semakin intens, tetapi di sisi lain muncul potensi konflik akibat perbedaan pemahaman dan kepentingan. Dalam konteks keberagamaan, dinamika ini memunculkan beberapa tantangan. Pertama, munculnya sikap eksklusivisme yang menganggap kelompoknya paling benar. Kedua, berkembangnya radikalisme berbasis agama yang memanfaatkan media sosial untuk

menyebarkan ideologi sempit. Ketiga, fenomena sekularisasi yang menyebabkan sebagian generasi muda menjauh dari nilai-nilai agama. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa praktik keberagamaan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik. Analisis menunjukkan bahwa perubahan sosial yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan penguatan nilai dan karakter. Akibatnya, individu mengalami krisis identitas (Satria et al., 2020). Mereka dihadapkan pada berbagai pilihan nilai yang saling bertentangan. Di sinilah Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting sebagai fondasi moral dan spiritual yang membimbing individu dalam menghadapi perubahan.

Identitas keagamaan merupakan bagian penting dari identitas sosial seseorang (AS et al., 2025). Dalam masyarakat modern yang plural, identitas sering kali menjadi sumber kebanggaan sekaligus potensi konflik. Pendidikan agama Islam harus mampu menanamkan identitas keislaman yang inklusif, bukan eksklusif. Artinya, peserta didik diajarkan untuk memahami ajaran Islam secara mendalam, tetapi tetap menghargai keberadaan agama dan budaya lain. Konsep moderasi beragama menjadi relevan dalam konteks ini. Moderasi beragama menekankan keseimbangan antara keyakinan pribadi dengan sikap toleran terhadap perbedaan. Pendidikan agama Islam dapat mengintegrasikan nilai-nilai moderasi melalui pembelajaran yang dialogis dan reflektif. Misalnya, dalam membahas ayat-ayat tentang toleransi, guru tidak hanya menjelaskan maknanya secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial di Indonesia yang multikultural. Contoh konkret dapat dilihat pada kegiatan dialog lintas agama di sekolah atau perguruan tinggi. Peserta didik diajak berdiskusi dengan teman dari latar belakang agama berbeda untuk membangun saling pengertian. Dengan cara ini, identitas keislaman tidak dipahami sebagai alat pembeda yang kaku, melainkan sebagai landasan moral untuk membangun hubungan sosial yang harmonis.

Era digital membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh informasi keagamaan (Sumardianto et al., 2025). Dakwah kini tidak hanya dilakukan di masjid atau majelis taklim, tetapi juga melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, dan podcast. Fenomena ini menciptakan peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah akses ilmu agama menjadi lebih luas dan mudah dijangkau. Tantangannya adalah munculnya informasi keagamaan yang tidak terverifikasi dan cenderung provokatif. Pendidikan agama Islam harus merespons fenomena ini dengan mengembangkan literasi digital berbasis nilai Islam. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi, memahami konteks, dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang bersifat ekstrem. Misalnya, guru dapat mengajak siswa menganalisis isi ceramah yang viral di media sosial, kemudian mendiskusikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Analisis menunjukkan bahwa tanpa bimbingan yang tepat, generasi muda rentan terpapar paham radikal atau sebaliknya menjadi apatis terhadap agama. Oleh karena itu, PAI harus hadir sebagai ruang dialog yang terbuka dan kritis, bukan sekadar ruang hafalan materi. Selain membentuk identitas, PAI juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai sosial seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas. Nilai-nilai ini sangat penting dalam menghadapi dinamika sosial yang sering kali memicu ketimpangan dan konflik (Walidin et al., 2025). Islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama, sebagaimana tercermin dalam konsep zakat, infak, dan sedekah. Dalam praktiknya, sekolah dapat mengintegrasikan pembelajaran PAI dengan kegiatan sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk korban bencana, atau program kepedulian lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga melatih empati dan tanggung jawab sosial. Contohnya, saat terjadi bencana alam di suatu daerah, siswa diajak berdiskusi tentang makna solidaritas dalam Islam, kemudian berpartisipasi

dalam aksi nyata. Melalui pendekatan ini, PAI tidak hanya membentuk kesalehan individu, tetapi juga kesalehan sosial. Kesalehan sosial inilah yang menjadi kunci dalam menjaga harmoni masyarakat modern yang beragam.

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Keberagaman ini harus dipahami sebagai *sunnatullah* atau ketetapan Tuhan. Pendidikan Agama Islam memiliki tanggung jawab untuk menanamkan pemahaman bahwa perbedaan adalah bagian dari rencana Ilahi (Wardani, 2025). Dengan demikian, sikap intoleransi tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin. Dalam pembelajaran, guru dapat mengangkat kisah sejarah Nabi Muhammad SAW yang hidup berdampingan dengan komunitas non-Muslim di Madinah. Piagam Madinah menjadi contoh bagaimana Islam mengatur kehidupan masyarakat yang plural secara adil dan damai. Analisis terhadap sejarah ini dapat membantu siswa memahami bahwa toleransi bukanlah konsep baru, melainkan bagian integral dari tradisi Islam. Dengan pendekatan multikultural, PAI dapat menjadi sarana membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis (Naila et al., 2025). Hal ini sangat penting dalam mencegah konflik sosial berbasis agama atau identitas.

Untuk merespons dinamika sosial, metode pembelajaran PAI juga perlu mengalami transformasi. Pendekatan ceramah satu arah perlu dilengkapi dengan metode diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, siswa dapat diberikan studi kasus tentang konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan agama, kemudian diminta menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan kontekstual membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan nyata (Setyawan & Roqib, 2025). Siswa tidak hanya memahami ajaran secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi konkret. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti video interaktif dan platform e-learning, dapat meningkatkan minat belajar. Transformasi metode ini menunjukkan bahwa PAI harus

adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi ajarannya. Adaptasi bukan berarti mengubah nilai dasar Islam, tetapi mengemasnya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan generasi modern.

BAB 5

Pendidikan Agama Islam dan Moderasi Beragama

A. Konsep Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam

a) Pengertian moderasi beragama

Moderasi beragama merupakan konsep yang merujuk pada sikap beragama yang menempatkan diri secara proporsional, adil, dan seimbang dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Istilah moderasi berasal dari kata moderate yang berarti tidak berlebihan atau tidak ekstrem. Dalam konteks Islam, moderasi beragama dikenal dengan istilah wasathiyah, yaitu jalan tengah yang menghindari sikap ekstremisme (berlebihan) maupun liberalisme yang terlalu longgar dalam beragama.

Secara konseptual, moderasi beragama menekankan pentingnya keseimbangan antara keyakinan (akidah), praktik ibadah, dan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat yang plural. Moderasi beragama tidak berarti mengurangi komitmen terhadap ajaran agama, melainkan menegaskan praktik keberagamaan yang inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Dalam perspektif Islam, nilai moderasi tercermin dalam prinsip keadilan (i'tidal), keseimbangan (tawazun), toleransi (tasamuh), dan sikap tengah (tawassuth), yang semuanya menjadi fondasi dalam membangun kehidupan yang harmonis.

Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama menjadi sangat penting sebagai upaya menjaga kerukunan dan mencegah

konflik sosial berbasis agama. Moderasi beragama berfungsi sebagai pendekatan strategis dalam merespons meningkatnya fenomena radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam stabilitas sosial. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Vita Mulyanti dan Kurnia Muhajarah dalam artikel *Religious Moderation as a Bridge to Peace: Fostering Tolerance, Mutual Understanding, and Interfaith Dialogue*, yang menyatakan bahwa moderasi beragama berperan sebagai titik temu antara berbagai perbedaan keagamaan serta menjadi jembatan menuju perdamaian melalui penguatan toleransi, saling pengertian, dan dialog antaragama (Mulyanti & Muhajarah, 2025).

Lebih lanjut, penelitian tersebut menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan strategi penting dalam menghadapi radikalisme dan ekstremisme di Indonesia. Moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan teoretis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mampu membangun harmoni, menjaga martabat manusia, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang damai, inklusif, dan berkeadilan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

b) Terminologi moderasi dalam Islam (wasathiyah)

Terminologi moderasi dalam Islam dikenal dengan istilah *wasathiyah*, yang berasal dari bahasa Arab *wasath* yang berarti “tengah”, “adil”, atau “seimbang”. Konsep ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam ajaran Islam, karena tidak hanya menunjukkan posisi di antara dua ekstrem, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan proporsionalitas dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam Al-Qur’an, konsep ini secara eksplisit disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat yang berada di tengah, yang memiliki karakter adil dan menjadi teladan bagi umat lain.

Secara terminologis, wasathiyah dalam Islam mengandung makna sikap moderat yang menghindari dua kutub ekstrem, yaitu sikap berlebihan (ghuluw) dan sikap meremehkan atau mengabaikan ajaran agama (tafrith). Dengan demikian, moderasi dalam Islam bukan sekadar kompromi, tetapi merupakan prinsip keseimbangan yang berlandaskan nilai-nilai syariat. Konsep ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), sehingga ajarannya selalu mendorong terciptanya harmoni, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan individu maupun sosial.

Lebih lanjut, wasathiyah mencakup beberapa nilai utama yang menjadi pilar dalam moderasi beragama, antara lain tawassuth (sikap tengah), tawazun (keseimbangan), i'tidal (keadilan), dan tasamuh (toleransi). Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam membangun sikap keberagamaan yang inklusif dan terbuka terhadap perbedaan, tanpa kehilangan identitas keislaman. Dalam konteks pendidikan, konsep wasathiyah sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik agar mereka memiliki pemahaman agama yang komprehensif dan tidak mudah terpengaruh oleh paham ekstremisme.

Dalam perkembangan kontemporer, konsep wasathiyah juga menjadi dasar dalam penguatan moderasi beragama sebagai strategi menjaga kerukunan di masyarakat plural. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Vita Mulyanti dan Kurnia Muhajarah yang menegaskan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan menuju perdamaian melalui penguatan toleransi, saling pengertian, dan dialog antaragama (Mulyanti & Muhajarah, 2025). Dalam perspektif ini, wasathiyah tidak hanya menjadi konsep teologis, tetapi juga menjadi pendekatan praktis dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

c) Landasan teologis moderasi dalam Al-Qur'an dan Hadis

Moderasi beragama dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai dua sumber utama ajaran Islam. Konsep moderasi (wasathiyah) bukanlah gagasan baru, melainkan merupakan prinsip fundamental yang telah melekat dalam ajaran Islam sejak awal. Nilai-nilai moderasi tersebut tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad Saw. yang menekankan keseimbangan, keadilan, serta larangan terhadap sikap berlebihan dalam beragama.

Salah satu landasan utama konsep moderasi dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 143, yang menyebutkan bahwa umat Islam adalah ummatan wasathan (umat pertengahan). Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diposisikan sebagai umat yang adil, seimbang, dan menjadi teladan bagi umat lain. Para ulama tafsir, seperti Ibn Kathir, menjelaskan bahwa makna wasathan merujuk pada keadilan (al-'adl) dan pilihan terbaik (al-khiyar), yang mencerminkan posisi tengah antara dua ekstrem. Dengan demikian, konsep moderasi dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi identitas umat Islam dalam kehidupan sosial.

Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan peringatan terhadap sikap berlebihan (ghuluw) dalam beragama, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 171. Ayat ini menegaskan larangan melampaui batas dalam memahami ajaran agama, yang dapat mengarah pada penyimpangan dan konflik. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk ekstremisme, baik yang bersifat radikal maupun yang terlalu longgar dalam menjalankan ajaran agama. Sejalan dengan hal tersebut, Surah Al-Ma'idah ayat 8 juga menekankan pentingnya keadilan, bahkan terhadap pihak yang berbeda, sebagai bentuk implementasi moderasi dalam kehidupan sosial.

Dalam hadis, Nabi Muhammad Saw. secara tegas mengajarkan pentingnya sikap moderat dan melarang sikap berlebihan dalam beragama. Salah satu hadis yang

populer menyatakan, “Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali ia akan dikalahkan olehnya” (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kemudahan (taysir) dan keseimbangan dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Nabi juga memperingatkan umatnya untuk menghindari sikap ekstrem sebagaimana sabdanya, “Hindarilah sikap berlebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama” (HR. Ahmad).

Landasan teologis moderasi ini juga tercermin dalam praktik kehidupan Nabi Muhammad Saw. yang dikenal sebagai teladan utama dalam menerapkan nilai-nilai keseimbangan, toleransi, dan keadilan. Nabi tidak hanya mengajarkan toleransi antarumat beragama, tetapi juga membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang plural, seperti dalam Piagam Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi dalam Islam tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks kontemporer, pemahaman terhadap landasan teologis moderasi menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan radikalisme dan ekstremisme. Penelitian oleh Vita Mulyanti dan Kurnia Muhajarah menunjukkan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan menuju perdamaian melalui penguatan toleransi, saling pengertian, dan dialog antaragama (Mulyanti & Muhajarah, 2025). Temuan ini memperkuat bahwa nilai-nilai moderasi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat modern.

Lebih lanjut, sejumlah kajian kontemporer menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan pendekatan teologis sekaligus sosiologis yang mampu menjawab dinamika global. Menurut Yusuf al-Qaradawi, konsep wasathiyah adalah karakter utama Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan

material, antara individu dan masyarakat, serta antara teks dan konteks. Pendekatan ini menjadikan Islam sebagai agama yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Landasan teologis moderasi dalam Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa Islam secara inheren mengajarkan keseimbangan, keadilan, dan toleransi. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi prinsip dasar dalam beragama, tetapi juga menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk konflik, radikalisme, dan disintegrasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap landasan teologis ini menjadi kunci dalam membangun kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan berkeadaban.

d) Moderasi sebagai karakter ajaran Islam

Moderasi beragama bukan sekadar pendekatan dalam memahami ajaran Islam, melainkan merupakan karakter inheren yang melekat dalam seluruh dimensi ajaran Islam itu sendiri. Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil 'alamin hadir untuk membawa rahmat, kedamaian, dan keseimbangan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, nilai moderasi (wasathiyah) menjadi prinsip dasar yang menjiwai berbagai aspek ajaran Islam, baik dalam akidah, ibadah, maupun muamalah.

Dalam perspektif teologis, karakter moderat dalam Islam tercermin dari ajaran yang menempatkan keseimbangan antara aspek spiritual dan material, antara kepentingan individu dan sosial, serta antara hak dan kewajiban. Al-Qur'an secara konsisten menekankan prinsip keseimbangan ini, seperti dalam konsep keadilan (al-'adl) dan keseimbangan (mizan), yang menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis. Dengan demikian, Islam tidak mengajarkan sikap ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme yang kaku maupun liberalisme yang mengabaikan nilai-nilai normatif agama.

Karakter moderasi juga tampak dalam fleksibilitas ajaran Islam yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dalam hal ibadah, Islam memberikan kemudahan (rukhsah) bagi umatnya dalam kondisi tertentu, seperti keringanan dalam shalat bagi musafir atau orang sakit. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak bersifat memberatkan, melainkan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan realitas kehidupan. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw. yang menekankan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit umatnya.

Lebih lanjut, moderasi sebagai karakter ajaran Islam juga tercermin dalam hubungan sosial antar manusia. Islam mengajarkan sikap toleransi (tasamuh), saling menghormati, dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk dengan pemeluk agama lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mendorong terciptanya kehidupan sosial yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman. Dalam konteks ini, moderasi menjadi fondasi dalam membangun hubungan antarumat beragama yang damai dan konstruktif.

Dalam kajian kontemporer, konsep moderasi sebagai karakter ajaran Islam juga diperkuat oleh berbagai penelitian akademik. Penelitian oleh Vita Mulyanti dan Kurnia Muhajarah menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan jembatan menuju perdamaian yang mampu memperkuat toleransi, saling pengertian, dan dialog antaragama (Mulyanti & Muhajarah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa karakter moderasi dalam Islam tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat modern.

Selain itu, menurut Yusuf al-Qaradawi, moderasi (wasathiyah) merupakan ciri khas utama Islam yang membedakannya dari ideologi ekstrem. Ia menekankan bahwa Islam berada di tengah antara materialisme dan spiritualisme, antara individualisme dan kolektivisme, serta antara konservatisme dan liberalisme. Pandangan

ini memperkuat bahwa moderasi bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan identitas dasar ajaran Islam yang harus dipahami dan diamalkan oleh umatnya.

Moderasi sebagai karakter ajaran Islam mencerminkan keseimbangan, keadilan, dan toleransi yang menjadi inti dari nilai-nilai Islam. Karakter ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan beragama, tetapi juga sebagai solusi dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti konflik sosial, radikalisme, dan disintegrasi masyarakat. Oleh karena itu, internalisasi nilai moderasi menjadi sangat penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadaban.

e) Perbedaan moderasi, liberalisme, dan ekstremisme

Dalam diskursus keagamaan kontemporer, istilah moderasi, liberalisme, dan ekstremisme sering digunakan untuk menggambarkan spektrum cara pandang dan praktik beragama. Ketiga konsep ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi epistemologi, pendekatan terhadap teks agama, maupun implikasi sosialnya. Memahami perbedaan ketiganya menjadi penting untuk membangun pemahaman keagamaan yang proporsional dan kontekstual.

Moderasi beragama (*religious moderation*) merujuk pada sikap tengah yang menempatkan keseimbangan antara pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap ajaran agama. Moderasi tidak berarti kompromi terhadap prinsip dasar agama, melainkan upaya untuk menghindari sikap berlebihan (*ghuluw*) dan sikap yang terlalu longgar dalam beragama. Dalam konteks Islam, moderasi beragama dikenal dengan konsep *wasathiyah*, yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan, toleransi, dan inklusivitas. Moderasi beragama juga berfungsi sebagai pendekatan yang mampu menjaga harmoni sosial dalam masyarakat plural (Kamali, 2015).

Berbeda dengan moderasi, liberalisme dalam konteks keagamaan cenderung menekankan kebebasan individu dalam menafsirkan ajaran agama, bahkan

hingga melampaui batas-batas otoritas tradisi dan teks. Liberalisme agama sering kali mengedepankan rasionalitas dan nilai-nilai universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia, namun dalam beberapa kasus dapat mengarah pada relativisme kebenaran. Hal ini berpotensi mengurangi otoritas norma-norma agama yang telah mapan, sehingga menimbulkan ketegangan antara nilai tradisional dan modernitas (Kurzman, 1998; Hallaq, 2009).

Sementara itu, ekstremisme merupakan sikap beragama yang berada pada kutub berlawanan dengan moderasi, yaitu kecenderungan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara kaku, sempit, dan eksklusif. Ekstremisme sering kali ditandai dengan klaim kebenaran tunggal (truth claim), penolakan terhadap perbedaan, serta legitimasi terhadap tindakan kekerasan atas nama agama. Dalam banyak kasus, ekstremisme berakar pada interpretasi literal terhadap teks agama tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis. Fenomena ini telah menjadi perhatian global karena berkontribusi terhadap konflik, radikalisme, dan terorisme (Esposito, 2011; Juergensmeyer, 2017).

Secara konseptual, perbedaan antara ketiga pendekatan ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, dalam hal pendekatan terhadap teks agama, moderasi menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual, liberalisme cenderung menekankan interpretasi kontekstual yang fleksibel, sedangkan ekstremisme berpegang pada interpretasi tekstual yang kaku. Kedua, dalam hal sikap terhadap perbedaan, moderasi mengedepankan toleransi dan dialog, liberalisme menekankan pluralisme yang luas, sementara ekstremisme cenderung menolak perbedaan dan bersifat eksklusif. Ketiga, dalam implikasi sosial, moderasi berkontribusi pada harmoni sosial, liberalisme mendorong kebebasan individu, sedangkan ekstremisme berpotensi menimbulkan konflik dan disintegrasi sosial.

Dalam konteks pendidikan, pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting untuk mencegah penyebaran paham ekstrem sekaligus menjaga agar kebebasan berpikir tidak mengarah pada relativisme yang berlebihan. Pendidikan agama yang berbasis moderasi berperan sebagai jalan tengah yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan realitas sosial secara seimbang. Dengan demikian, moderasi beragama dapat menjadi solusi strategis dalam membangun kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan berkeadaban di tengah masyarakat yang majemuk.

f) Urgensi moderasi beragama dalam masyarakat multikultural

Masyarakat multikultural merupakan realitas sosial yang ditandai oleh keberagaman identitas, seperti agama, etnis, budaya, bahasa, dan tradisi. Dalam konteks ini, keberagaman dapat menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi sangat urgen sebagai pendekatan strategis dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial di tengah pluralitas tersebut.

Moderasi beragama berfungsi sebagai kerangka berpikir dan bertindak yang menekankan keseimbangan (balance), keadilan (justice), dan toleransi (tolerance) dalam kehidupan beragama. Dalam masyarakat multikultural, sikap moderat memungkinkan individu untuk tetap berpegang pada keyakinan agamanya tanpa harus menegasikan keberadaan dan hak-hak kelompok lain. Hal ini sejalan dengan prinsip koeksistensi damai (peaceful coexistence) yang menjadi fondasi dalam kehidupan masyarakat plural (Stepan, 2012).

Urgensi moderasi beragama semakin terlihat dalam konteks global yang diwarnai oleh meningkatnya polarisasi identitas dan konflik berbasis agama. Fenomena radikalisme dan ekstremisme sering kali muncul akibat pemahaman keagamaan yang sempit dan

eksklusif, yang tidak memberikan ruang bagi perbedaan. Dalam hal ini, moderasi beragama berperan sebagai pendekatan preventif sekaligus solutif untuk mencegah berkembangnya ideologi kekerasan serta memperkuat nilai-nilai perdamaian (John L. Esposito, 2011).

Selain itu, dalam masyarakat multikultural, moderasi beragama juga berkontribusi dalam memperkuat kohesi sosial (social cohesion). Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan akan menciptakan rasa saling percaya (trust) antar kelompok masyarakat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam membangun kerja sama lintas budaya dan agama, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun politik. Tanpa adanya moderasi, perbedaan yang ada justru dapat menjadi sumber konflik yang mengancam integrasi sosial (Putnam, 2007).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, urgensi moderasi beragama menjadi semakin relevan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang plural, baik dari segi agama, suku, maupun budaya. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Lebih jauh, moderasi beragama memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter peserta didik yang inklusif dan toleran. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama akan menghasilkan generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara sosial dan emosional dalam menghadapi perbedaan.

Secara akademik, berbagai studi menunjukkan bahwa masyarakat yang mengedepankan nilai toleransi dan moderasi cenderung lebih stabil dan damai dibandingkan dengan masyarakat yang didominasi oleh sikap eksklusif dan intoleran. Oleh karena itu, moderasi beragama bukan hanya menjadi kebutuhan normatif dalam kehidupan beragama, tetapi juga merupakan kebutuhan sosial yang mendesak dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat multikultural.

B. Prinsip Wasathiyah dalam Pendidikan Agama Islam

a) Pengertian wasathiyah dalam Islam

Istilah wasathiyah dalam Islam berasal dari kata Arab wasath yang secara etimologis berarti “tengah”, “seimbang”, atau “adil”. Dalam terminologi keislaman, wasathiyah merujuk pada sikap moderat yang menempatkan seseorang pada posisi tengah, tidak condong pada sikap berlebihan (ghuluw) maupun sikap meremehkan (tafrith). Konsep ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam dimensi akidah, ibadah, maupun muamalah.

Secara teologis, konsep wasathiyah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai ummatan wasatan (umat pertengahan). Makna “pertengahan” dalam ayat ini tidak hanya menunjuk pada posisi geografis atau kuantitatif, tetapi lebih pada kualitas moral dan spiritual, yaitu umat yang adil, proporsional, dan mampu menjadi teladan bagi umat lain. Dengan demikian, wasathiyah mengandung nilai keseimbangan (tawazun), keadilan (i'tidal), dan pilihan terbaik (khairiyyah).

Dalam perspektif pemikiran Islam kontemporer, Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa wasathiyah merupakan prinsip dasar yang mencerminkan keseimbangan antara dua kutub ekstrem dalam kehidupan manusia, seperti antara spiritualitas dan materialitas, antara individualitas dan

kolektivitas, serta antara teks dan konteks. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kehidupan sosial tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa wasathiyah adalah karakter utama Islam yang membedakannya dari ideologi ekstrem. Ia menggambarkan wasathiyah sebagai jalan tengah yang menjaga keseimbangan antara keteguhan dalam prinsip (tsawabit) dan fleksibilitas dalam cabang-cabang ajaran (mutaghayyirat). Dengan pendekatan ini, Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa terjebak dalam sikap kaku maupun permisif.

Dari sisi praktis, wasathiyah dalam Islam tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam ibadah, Islam memberikan kemudahan dan tidak memberatkan umatnya, sebagaimana prinsip *la yukallifullahu nafsan illa wus'aha* (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya). Dalam hubungan sosial, wasathiyah mendorong sikap toleransi (tasamuh), keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sementara dalam berpikir, wasathiyah menuntut keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas.

b) Integrasi nilai wasathiyah dalam kurikulum PAI

Integrasi nilai wasathiyah dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang moderat, toleran, dan berkeadaban. Dalam konteks pendidikan modern, kurikulum tidak lagi dipahami sekadar sebagai dokumen pembelajaran, melainkan sebagai sistem yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, nilai wasathiyah perlu diinternalisasikan secara menyeluruh dalam setiap komponen kurikulum PAI.

Secara konseptual, integrasi wasathiyah bertujuan untuk menanamkan sikap keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), dan toleransi (*tasamuh*) dalam proses pembelajaran. Menurut Mohammad Hashim Kamali, prinsip moderasi dalam Islam harus diwujudkan dalam sistem pendidikan melalui pendekatan yang tidak ekstrem, baik dalam penyampaian materi maupun dalam penilaian terhadap perbedaan. Dengan demikian, kurikulum PAI harus dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sikap inklusif, serta kesadaran akan keberagaman.

Dalam implementasinya, integrasi nilai wasathiyah dapat dilakukan melalui beberapa aspek utama. Pertama, pada level tujuan pendidikan, kurikulum PAI harus secara eksplisit mencantumkan pembentukan karakter moderat sebagai salah satu capaian pembelajaran. Hal ini mencakup kemampuan peserta didik untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif, menghargai perbedaan, serta menghindari sikap radikal dan intoleran.

Kedua, pada aspek materi pembelajaran, nilai wasathiyah dapat diintegrasikan melalui pemilihan konten yang menekankan ajaran Islam yang inklusif dan rahmatan lil 'alamin. Materi tidak hanya berisi doktrin normatif, tetapi juga dilengkapi dengan konteks historis dan sosial yang mendorong pemahaman yang lebih luas. Misalnya, pembahasan tentang toleransi antarumat beragama, keadilan sosial, serta etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, pada aspek metode pembelajaran, integrasi wasathiyah menuntut penggunaan pendekatan yang dialogis dan partisipatif. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber kebenaran, tetapi sebagai fasilitator yang mendorong peserta didik untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan menghargai pendapat orang lain. Metode seperti *problem-based learning*, *collaborative learning*, dan *reflective learning* sangat relevan untuk menanamkan nilai moderasi.

Keempat, pada aspek evaluasi, penilaian tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada sikap dan perilaku peserta didik. Evaluasi autentik yang mencakup observasi sikap, penilaian diri, dan penilaian antar teman dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana nilai wasathiyah telah terinternalisasi dalam diri peserta didik.

Selain itu, integrasi nilai wasathiyah juga harus didukung oleh budaya sekolah yang kondusif. Lingkungan pendidikan perlu mencerminkan nilai-nilai moderasi melalui interaksi yang inklusif, penghargaan terhadap keberagaman, serta keteladanan dari guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, peran guru sangat penting sebagai agen perubahan yang tidak hanya mengajarkan nilai, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam menerapkannya.

Dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, integrasi nilai wasathiyah sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana utama dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat dan toleran, khususnya di tengah masyarakat yang multikultural.

c) Peran guru dalam menanamkan nilai moderasi

Guru memiliki posisi strategis sebagai aktor utama dalam proses pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembentuk karakter peserta didik. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), peran guru menjadi semakin penting karena ia bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga bijaksana dalam praktik sosial. Oleh karena itu, guru berperan sebagai agen moderasi yang menanamkan nilai wasathiyah dalam kehidupan peserta didik.

Pertama, guru berperan sebagai teladan (*uswah hasanah*) dalam menerapkan nilai moderasi. Sikap,

ucapan, dan perilaku guru dalam keseharian akan menjadi contoh nyata bagi peserta didik. Guru yang menunjukkan sikap toleran, adil, terbuka terhadap perbedaan, dan tidak mudah menghakimi akan memberikan pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan sekadar penjelasan teoritis. Dalam hal ini, keteladanan menjadi metode pendidikan yang paling kuat dalam membentuk karakter moderat.

Kedua, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang inklusif dan dialogis. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang terbuka, di mana peserta didik dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, serta belajar menghargai pandangan yang berbeda. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang menekankan pentingnya pendidikan dialogis dalam membangun kesadaran kritis. Melalui diskusi, debat konstruktif, dan refleksi, peserta didik dapat memahami ajaran agama secara lebih mendalam dan kontekstual.

Ketiga, guru berperan sebagai mediator dalam menghadapi perbedaan. Dalam lingkungan kelas yang heterogen, perbedaan pandangan keagamaan atau latar belakang sosial sering kali muncul. Guru harus mampu mengelola perbedaan tersebut secara bijak, sehingga tidak berkembang menjadi konflik. Sebaliknya, perbedaan dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi.

Keempat, guru berperan sebagai pengembang kurikulum yang berorientasi moderasi. Meskipun kurikulum telah dirancang secara nasional, guru memiliki ruang untuk mengembangkan materi dan metode pembelajaran yang relevan dengan konteks peserta didik. Dalam hal ini, guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam setiap materi, seperti menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam ajaran Islam.

Kelima, guru juga berperan sebagai pembimbing moral dan spiritual. Dalam fungsi ini, guru membantu peserta didik dalam memahami ajaran agama secara utuh dan tidak parsial. Guru perlu mengarahkan peserta didik agar tidak terjebak dalam pemahaman yang ekstrem, baik yang terlalu kaku maupun yang terlalu bebas. Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter yang efektif harus mencakup aspek pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Hal ini sejalan dengan upaya menanamkan nilai moderasi dalam diri peserta didik.

Keenam, guru berperan sebagai agen literasi digital yang kritis. Di era digital, peserta didik sangat mudah terpapar berbagai informasi keagamaan dari media sosial yang belum tentu valid atau moderat. Guru perlu membekali peserta didik dengan kemampuan literasi digital, sehingga mereka mampu menyaring informasi, memahami konteks, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi ekstremisme. Peran ini menjadi sangat penting dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda.

Selain itu, peran guru dalam menanamkan nilai moderasi juga harus didukung oleh kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian yang kuat. Guru tidak hanya dituntut untuk memahami materi ajar, tetapi juga memiliki wawasan keagamaan yang luas dan sikap terbuka terhadap dinamika sosial. Dalam konteks Indonesia, upaya ini juga sejalan dengan program penguatan moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kapasitas guru.

d) Pendidikan karakter berbasis wasathiyah

Pendidikan karakter berbasis wasathiyah merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pembentukan kepribadian peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai moderasi dalam ajaran Islam. Konsep ini tidak hanya berfokus pada penguasaan

pengetahuan agama, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis wasathiyah menjadi fondasi penting dalam membangun individu yang tidak hanya religius, tetapi juga inklusif dan berkeadaban.

Secara konseptual, pendidikan karakter dalam perspektif Islam berakar pada tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk insan yang berakhlak mulia (akhlak al-karimah). Dalam konteks wasathiyah, karakter tersebut diwujudkan dalam sikap tidak berlebihan, mampu menempatkan sesuatu secara proporsional, serta menghargai perbedaan. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip keseimbangan (tawazun), keadilan (i'tidal), dan toleransi (tasamuh) yang menjadi inti ajaran Islam. Menurut Mohammad Hashim Kamali, wasathiyah merupakan prinsip universal dalam Islam yang mencerminkan harmoni antara dimensi spiritual, intelektual, dan sosial manusia.

Dalam implementasinya, pendidikan karakter berbasis wasathiyah dapat dikembangkan melalui beberapa dimensi utama. Pertama, dimensi kognitif, yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta didik tentang ajaran Islam yang moderat. Peserta didik diajak untuk memahami teks agama secara kontekstual, sehingga tidak terjebak pada pemahaman yang sempit dan literal. Kedua, dimensi afektif, yaitu menumbuhkan sikap empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketiga, dimensi perilaku (psikomotorik), yaitu mendorong peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan nyata, seperti bersikap adil, menghormati orang lain, dan menghindari konflik.

Pendidikan karakter berbasis wasathiyah juga menekankan pentingnya metode pembelajaran yang holistik. Proses internalisasi nilai tidak cukup dilakukan melalui ceramah, tetapi harus melibatkan pengalaman langsung, refleksi, dan keteladanan. Dalam hal ini,

pendekatan experiential learning dan reflective learning menjadi sangat relevan. Peserta didik tidak hanya mengetahui nilai moderasi, tetapi juga merasakan dan mempraktikkannya dalam interaksi sosial. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Thomas Lickona, yang menekankan bahwa karakter terbentuk melalui integrasi antara pengetahuan, perasaan, dan tindakan.

Selain itu, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan karakter berbasis wasathiyah. Sekolah harus menjadi ruang yang mencerminkan nilai-nilai moderasi melalui budaya yang inklusif, hubungan yang harmonis, serta penghargaan terhadap keberagaman. Guru, sebagai bagian dari lingkungan tersebut, harus mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai wasathiyah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan karakter berbasis wasathiyah juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap berkembangnya paham ekstremisme dan intoleransi di kalangan generasi muda. Dengan membekali peserta didik dengan nilai keseimbangan dan sikap kritis, mereka akan lebih mampu menyaring berbagai informasi dan ideologi yang berkembang, terutama di era digital. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis wasathiyah tidak hanya relevan dalam konteks pendidikan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan keberagaman dalam masyarakat.

e) Tantangan implementasi wasathiyah dalam pendidikan

Implementasi nilai wasathiyah dalam pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), merupakan upaya strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang moderat dan toleran. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, maupun pedagogis. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi dan diatasi secara sistematis agar nilai wasathiyah dapat terinternalisasi secara efektif dalam dunia pendidikan.

Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang belum komprehensif tentang konsep wasathiyah. Tidak semua pendidik memiliki pemahaman yang utuh mengenai moderasi beragama, sehingga dalam beberapa kasus, nilai wasathiyah hanya dipahami secara normatif tanpa implementasi yang konkret dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan penyampaian materi yang kurang kontekstual dan tidak menyentuh aspek pembentukan karakter.

Tantangan berikutnya adalah dominasi pendekatan pembelajaran yang masih bersifat tekstual dan kognitif. Banyak praktik pembelajaran PAI yang masih berfokus pada hafalan dan pemahaman literal terhadap teks agama, tanpa memberikan ruang bagi pengembangan pemikiran kritis dan kontekstual. Kondisi ini berpotensi menghambat internalisasi nilai moderasi, karena peserta didik tidak dilatih untuk memahami keberagaman interpretasi dalam ajaran Islam.

Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan media digital juga menjadi tantangan yang signifikan. Di era digital, peserta didik memiliki akses luas terhadap berbagai informasi keagamaan, termasuk yang mengandung paham ekstrem atau intoleran. Tanpa kemampuan literasi digital yang memadai, peserta didik dapat dengan mudah terpapar dan terpengaruh oleh narasi yang bertentangan dengan nilai wasathiyah. Dalam konteks ini, peran guru menjadi semakin kompleks sebagai filter sekaligus pembimbing dalam menyikapi arus informasi.

Tantangan lainnya adalah kurangnya integrasi nilai moderasi dalam kebijakan dan kurikulum secara operasional. Meskipun secara normatif nilai moderasi telah diakui dan didorong oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, implementasinya di tingkat satuan pendidikan sering kali belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan panduan teknis, kurangnya pelatihan bagi guru, serta minimnya evaluasi

yang mengukur keberhasilan internalisasi nilai moderasi.

Dari sisi kultural, resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan. Sebagian masyarakat atau pendidik masih memiliki pandangan keagamaan yang eksklusif dan sulit menerima pendekatan moderat. Sikap ini dapat menghambat proses transformasi pendidikan yang berorientasi pada nilai wasathiyah. Dalam situasi seperti ini, diperlukan pendekatan persuasif dan edukatif untuk membangun kesadaran akan pentingnya moderasi dalam kehidupan beragama.

Lebih lanjut, keterbatasan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran berbasis nilai juga menjadi tantangan tersendiri. Guru dituntut tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga memiliki kemampuan pedagogik yang mampu mengintegrasikan nilai wasathiyah dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Michael Fullan yang menekankan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan sangat bergantung pada kapasitas dan kesiapan guru sebagai agen perubahan.

Di sisi lain, evaluasi pendidikan yang belum menyentuh aspek karakter secara mendalam juga menjadi kendala. Sistem penilaian yang masih berorientasi pada aspek kognitif membuat pengukuran keberhasilan pendidikan karakter, termasuk nilai moderasi, menjadi kurang optimal. Padahal, internalisasi nilai wasathiyah memerlukan pendekatan evaluasi yang holistik, mencakup sikap, perilaku, dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

C. Moderasi Beragama sebagai Strategi Deradikalisasi

a) Pengertian radikalisme dan ekstremisme

Radikalisme dan ekstremisme merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam kajian sosial, politik, dan keagamaan untuk menggambarkan pola pikir dan tindakan yang berada di luar batas moderasi. Meskipun keduanya memiliki keterkaitan, secara konseptual terdapat perbedaan mendasar yang perlu

dipahami secara tepat, khususnya dalam konteks pendidikan dan upaya deradikalisasi.

Radikalisme secara etimologis berasal dari kata *radix* (bahasa Latin) yang berarti “akar”. Dalam konteks sosial dan keagamaan, radikalisme merujuk pada paham atau ideologi yang menginginkan perubahan secara mendasar hingga ke akar-akarnya, sering kali dengan cara yang cepat dan tidak kompromistis. Dalam beberapa literatur, radikalisme tidak selalu bermakna negatif, karena dapat merujuk pada keinginan perubahan sosial yang fundamental. Namun, dalam perkembangan kontemporer, istilah ini sering dikaitkan dengan kecenderungan ideologis yang eksklusif, intoleran, dan berpotensi mengarah pada tindakan kekerasan (John L. Esposito, 2011).

Sementara itu, ekstremisme merujuk pada sikap atau tindakan yang berada pada posisi paling ujung dari suatu spektrum, baik dalam pemikiran maupun praktik. Ekstremisme dalam konteks keagamaan biasanya ditandai oleh pemahaman yang kaku dan literal terhadap teks agama, klaim kebenaran tunggal (*absolute truth claim*), serta penolakan terhadap perbedaan. Berbeda dengan radikalisme yang lebih berfokus pada ide perubahan, ekstremisme lebih menekankan pada sikap berlebihan dalam keyakinan yang dapat melegitimasi tindakan intoleran bahkan kekerasan (Juergensmeyer, 2017).

Dalam kajian akademik, Mark Juergensmeyer menjelaskan bahwa ekstremisme agama sering kali muncul dari konstruksi identitas yang menganggap kelompoknya paling benar dan memandang pihak lain sebagai ancaman. Hal ini kemudian dapat berkembang menjadi justifikasi terhadap tindakan kekerasan atas nama agama. Sementara itu, penelitian oleh UNESCO menegaskan bahwa radikalisme yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi pintu masuk menuju ekstremisme kekerasan (*violent extremism*), terutama di kalangan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh ideologi tertentu.

Perbedaan utama antara radikalisme dan ekstremisme dapat dilihat dari orientasi dan manifestasinya. Radikalisme lebih berorientasi pada perubahan ideologis yang mendasar, sedangkan ekstremisme lebih pada sikap dan tindakan yang melampaui batas kewajaran. Namun, keduanya memiliki titik temu ketika radikalisme berkembang menjadi ekstremisme, terutama ketika disertai dengan intoleransi dan legitimasi kekerasan.

Dalam konteks pendidikan, pemahaman terhadap kedua konsep ini menjadi sangat penting sebagai dasar dalam merancang strategi deradikalisasi. Pendidikan yang tidak hanya memberikan pemahaman agama secara tekstual, tetapi juga kontekstual dan kritis, dapat menjadi benteng dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan ekstremisme. Oleh karena itu, integrasi nilai moderasi beragama dalam sistem pendidikan menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam membangun pemahaman keagamaan yang inklusif dan damai.

b) Faktor penyebab radikalisme dalam pendidikan

Radikalisme dalam konteks pendidikan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem pendidikan, lingkungan sosial, serta dinamika global. Pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter moderat justru dalam beberapa kasus dapat menjadi medium reproduksi pemahaman keagamaan yang sempit apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab radikalisme dalam pendidikan sebagai dasar dalam merancang strategi deradikalisasi yang efektif.

Salah satu faktor utama adalah pendekatan pembelajaran yang bersifat tekstual dan dogmatis. Dalam praktiknya, pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sering kali menekankan hafalan dan pemahaman literal terhadap teks agama tanpa disertai

dengan pendekatan kontekstual dan kritis. Hal ini dapat membentuk cara berpikir yang rigid dan kurang terbuka terhadap perbedaan interpretasi. Menurut Mark Juergensmeyer (2017), pemahaman agama yang sempit dan eksklusif dapat menjadi salah satu akar munculnya radikalisme, terutama ketika tidak diimbangi dengan dialog dan pemahaman lintas perspektif.

Faktor kedua adalah kurangnya literasi keagamaan yang komprehensif. Peserta didik yang memiliki pemahaman agama yang parsial cenderung lebih mudah terpengaruh oleh narasi-narasi ideologis yang bersifat radikal. Ketidakseimbangan antara aspek pengetahuan, sikap, dan praktik dalam pembelajaran agama dapat menyebabkan internalisasi nilai yang tidak utuh. Dalam hal ini, pendidikan yang tidak mengajarkan keragaman pandangan dalam Islam berpotensi melahirkan sikap *truth claim* yang berlebihan.

Ketiga, pengaruh lingkungan sosial dan jaringan pergaulan juga menjadi faktor signifikan. Lingkungan yang homogen secara ideologis, baik di sekolah maupun di masyarakat, dapat memperkuat pandangan eksklusif dan mengurangi interaksi dengan kelompok yang berbeda. Kondisi ini dapat mempersempit wawasan peserta didik dan meningkatkan potensi radikalisasi, terutama jika didukung oleh figur otoritas yang memiliki pandangan ekstrem.

Keempat, paparan media digital dan internet menjadi faktor yang semakin dominan di era modern. Peserta didik memiliki akses luas terhadap berbagai konten keagamaan di media sosial, termasuk yang mengandung ideologi radikal. Tanpa kemampuan literasi digital yang memadai, mereka rentan terhadap propaganda dan disinformasi. Laporan dari UNESCO (2017) menegaskan bahwa generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap radikalisasi daring (*online radicalization*), terutama ketika tidak memiliki kemampuan berpikir kritis.

Faktor kelima adalah kurangnya peran guru sebagai agen moderasi. Guru memiliki peran penting dalam

membentuk cara pandang peserta didik, namun tidak semua guru memiliki kapasitas atau pemahaman yang memadai tentang moderasi beragama. Keterbatasan kompetensi pedagogik dan wawasan keagamaan dapat menyebabkan guru tidak mampu mengintegrasikan nilai moderasi dalam pembelajaran. Dalam perspektif Michael Fullan, keberhasilan transformasi pendidikan sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas guru sebagai pelaku utama perubahan.

Selanjutnya, kebijakan dan kurikulum yang belum sepenuhnya responsif terhadap isu radikalisme juga menjadi tantangan. Meskipun secara normatif telah ada upaya untuk memasukkan nilai moderasi dalam pendidikan, implementasinya sering kali belum optimal. Kurangnya panduan operasional, pelatihan, dan evaluasi membuat integrasi nilai-nilai tersebut tidak berjalan secara sistematis.

Terakhir, krisis identitas dan pencarian jati diri pada peserta didik juga dapat menjadi faktor pendorong radikalisme. Pada fase remaja, individu cenderung mencari makna dan identitas diri, sehingga lebih mudah tertarik pada ideologi yang menawarkan kepastian dan tujuan hidup yang jelas. Jika proses ini tidak diarahkan dengan baik melalui pendidikan yang moderat dan inklusif, maka potensi radikalisasi akan semakin besar.

c) Moderasi beragama sebagai pendekatan preventif

Moderasi beragama merupakan salah satu pendekatan strategis yang bersifat preventif dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan ekstremisme, khususnya dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial yang multikultural. Pendekatan preventif ini menekankan upaya pencegahan sejak dini melalui penanaman nilai-nilai keagamaan yang seimbang, inklusif, dan kontekstual, sehingga individu memiliki daya tahan ideologis terhadap pengaruh paham-paham yang menyimpang.

Secara konseptual, moderasi beragama berfungsi sebagai “filter” dalam memahami ajaran agama. Individu yang memiliki pemahaman moderat cenderung mampu membedakan antara ajaran agama yang esensial dan interpretasi yang bersifat ekstrem. Dalam hal ini, moderasi beragama tidak hanya berorientasi pada praktik keagamaan, tetapi juga pada cara berpikir (religious reasoning) yang kritis dan proporsional. Menurut Mohammad Hashim Kamali (2015), prinsip wasathiyah dalam Islam berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, sehingga dapat mencegah munculnya pemahaman yang kaku dan eksklusif.

Sebagai pendekatan preventif, moderasi beragama dapat diimplementasikan melalui pendidikan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Pendidikan yang berbasis moderasi tidak hanya memberikan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk sikap terbuka dan empati terhadap kelompok lain. Hal ini sejalan dengan pandangan UNESCO (2017) yang menekankan bahwa pendidikan memiliki peran kunci dalam mencegah ekstremisme kekerasan melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis, dialog, dan pemahaman lintas budaya.

Selain itu, moderasi beragama juga berfungsi sebagai sarana pembentukan ketahanan individu (resilience) terhadap ideologi radikal. Individu yang memiliki pemahaman keagamaan yang moderat cenderung tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang mengatasnamakan agama. Mereka mampu menilai informasi secara kritis dan tidak terjebak dalam narasi kebencian atau klaim kebenaran tunggal. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi benteng ideologis yang melindungi individu dari proses radikalisasi, baik secara langsung maupun melalui media digital.

Dalam praktiknya, pendekatan preventif melalui moderasi beragama dapat dilakukan melalui beberapa

strategi. Pertama, integrasi nilai moderasi dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), sehingga peserta didik sejak dini terbiasa dengan pemahaman yang inklusif. Kedua, penguatan peran guru sebagai agen moderasi, yang tidak hanya mengajarkan nilai, tetapi juga menjadi teladan dalam bersikap toleran dan adil. Ketiga, pengembangan literasi digital, agar peserta didik mampu menyaring informasi keagamaan yang beredar di media sosial. Keempat, penciptaan lingkungan pendidikan yang inklusif dan dialogis, yang mendorong interaksi positif antar individu dari latar belakang yang berbeda.

Lebih jauh, pendekatan preventif melalui moderasi beragama juga memiliki implikasi sosial yang luas. Dengan menanamkan nilai-nilai moderasi, masyarakat akan lebih mampu mengelola perbedaan secara konstruktif, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat, terutama di negara yang memiliki tingkat keberagaman tinggi seperti Indonesia.

d) Peran pendidikan dalam deradikalisasi

Pendidikan memiliki peran strategis dalam upaya deradikalisasi, yaitu proses untuk mengurangi, menetralisasi, atau menghilangkan paham radikal dan ekstrem dalam individu maupun kelompok. Sebagai institusi yang berfungsi membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku, pendidikan menjadi ruang yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, serta pemahaman keagamaan yang inklusif dan kontekstual.

Secara konseptual, deradikalisasi melalui pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi pemahaman yang menyimpang, tetapi juga membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap berbagai ideologi yang berkembang. Pendidikan berperan dalam membentuk cara berpikir reflektif dan analitis, sehingga peserta didik tidak mudah menerima informasi secara

mentah, terutama yang berkaitan dengan ajaran agama. Menurut UNESCO (2017), pendidikan merupakan instrumen utama dalam mencegah ekstremisme kekerasan melalui penguatan kemampuan berpikir kritis, dialog, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Salah satu peran utama pendidikan dalam deradikalisasi adalah melalui penguatan kurikulum yang berbasis moderasi beragama. Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) perlu dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai wasathiyah, seperti keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Materi pembelajaran tidak hanya berisi doktrin normatif, tetapi juga mengajak peserta didik untuk memahami konteks historis dan sosial dari ajaran agama. Dengan demikian, peserta didik dapat menghindari pemahaman yang sempit dan literal yang sering menjadi pintu masuk radikalisme.

Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan literasi digital. Di era informasi, peserta didik sangat rentan terhadap paparan ideologi radikal melalui media sosial dan internet. Oleh karena itu, kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi menjadi sangat penting. UNESCO (2017) menekankan bahwa literasi media dan informasi merupakan kunci dalam membangun ketahanan terhadap propaganda ekstremisme.

Peran pendidikan dalam deradikalisasi juga terlihat melalui penguatan nilai-nilai karakter dan sosial. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku. Nilai-nilai seperti empati, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan perlu ditanamkan secara konsisten dalam proses pembelajaran. Dalam perspektif Thomas Lickona (2012), pendidikan karakter yang efektif mencakup integrasi antara pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Hal ini relevan dalam upaya membentuk individu yang tidak

hanya memahami nilai moderasi, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, peran guru sebagai agen deradikalisasi menjadi sangat penting. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam memahami ajaran agama secara moderat. Guru yang memiliki wawasan luas dan sikap terbuka dapat membantu peserta didik untuk melihat keberagaman sebagai sesuatu yang positif, bukan ancaman. Dalam hal ini, Michael Fullan (2007) menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan sangat bergantung pada kualitas dan komitmen guru sebagai pelaku utama perubahan.

Selain di lingkungan sekolah, pendidikan dalam arti luas juga mencakup keluarga dan masyarakat. Lingkungan keluarga yang menanamkan nilai toleransi dan kasih sayang akan memperkuat proses deradikalisasi yang dilakukan di sekolah. Demikian pula, masyarakat yang inklusif dan terbuka akan menciptakan ekosistem yang mendukung terbentuknya individu yang moderat.

e) Strategi internalisasi nilai moderasi

Internalisasi nilai moderasi beragama merupakan proses penanaman nilai wasathiyah ke dalam diri peserta didik sehingga menjadi bagian dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak bersifat instan, melainkan memerlukan pendekatan yang sistematis, berkelanjutan, dan kontekstual dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif agar nilai moderasi tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga terinternalisasi dalam dimensi afektif dan perilaku.

Salah satu strategi utama adalah integrasi nilai moderasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Nilai wasathiyah perlu dimasukkan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran, materi ajar, serta kegiatan belajar. Hal ini mencakup penguatan konsep toleransi, keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap

keberagaman. Kurikulum yang terintegrasi akan membantu peserta didik memahami moderasi sebagai bagian dari ajaran Islam yang utuh, bukan sebagai konsep tambahan.

Strategi kedua adalah penggunaan metode pembelajaran yang dialogis dan partisipatif. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi, bertanya, dan mengemukakan pendapat secara terbuka. Melalui dialog, peserta didik dapat belajar memahami perbedaan perspektif dan mengembangkan sikap toleran. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses dialogis untuk membangun kesadaran kritis.

Ketiga, keteladanan guru sebagai role model merupakan strategi yang sangat efektif. Guru tidak hanya mengajarkan nilai moderasi, tetapi juga harus mencerminkannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Keteladanan ini mencakup cara berinteraksi, menyikapi perbedaan, serta mengambil keputusan secara adil dan bijaksana. Peserta didik cenderung lebih mudah meniru perilaku nyata dibandingkan sekadar memahami konsep secara teoritis.

Keempat, pembiasaan melalui budaya sekolah. Lingkungan sekolah harus menjadi ruang yang mencerminkan nilai-nilai moderasi, seperti saling menghormati, kerja sama, dan inklusivitas. Kegiatan-kegiatan seperti diskusi lintas budaya, kerja kelompok, serta program penguatan karakter dapat menjadi sarana untuk membiasakan peserta didik dalam menerapkan nilai moderasi. Budaya sekolah yang positif akan memperkuat proses internalisasi nilai secara alami.

Kelima, penguatan literasi digital dan pemikiran kritis. Di era digital, peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk menyaring informasi, terutama yang berkaitan dengan isu keagamaan. Literasi digital membantu mereka memahami konteks, memverifikasi sumber, dan menghindari penyebaran informasi yang mengandung paham radikal. Menurut UNESCO (2017),

pendidikan yang mengembangkan literasi media dan informasi sangat penting dalam mencegah ekstremisme.

Keenam, penggunaan pendekatan pengalaman (*experiential learning*). Internalisasi nilai moderasi akan lebih efektif jika peserta didik terlibat langsung dalam pengalaman nyata, seperti kegiatan sosial, kerja sama lintas kelompok, atau simulasi penyelesaian konflik. Pengalaman ini membantu peserta didik memahami pentingnya moderasi dalam kehidupan nyata, bukan hanya sebagai konsep abstrak.

Ketujuh, evaluasi yang holistik dan berkelanjutan. Penilaian terhadap internalisasi nilai moderasi tidak cukup dilakukan melalui tes tertulis, tetapi juga melalui observasi sikap, refleksi diri, dan penilaian perilaku. Evaluasi yang komprehensif akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang sejauh mana nilai moderasi telah tertanam dalam diri peserta didik.

f) Peran lembaga pendidikan dalam membangun toleransi

Lembaga pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun dan memperkuat sikap toleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Sebagai ruang sosial yang mempertemukan individu dari latar belakang agama, budaya, dan sosial yang beragam, lembaga pendidikan menjadi laboratorium nyata untuk menanamkan nilai-nilai hidup berdampingan secara damai. Toleransi dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai sikap menerima perbedaan, tetapi juga sebagai kemampuan untuk menghargai, memahami, dan bekerja sama dalam keberagaman.

Salah satu peran utama lembaga pendidikan adalah sebagai agen sosialisasi nilai-nilai toleransi. Melalui proses pendidikan, peserta didik diperkenalkan pada konsep keberagaman dan pentingnya hidup harmonis dalam perbedaan. Nilai-nilai seperti saling menghormati, empati, dan keadilan diajarkan secara sistematis melalui kurikulum maupun kegiatan pembelajaran. Dalam perspektif UNESCO, pendidikan memiliki fungsi penting dalam membangun budaya damai (*culture of peace*)

melalui penguatan nilai toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Selain itu, lembaga pendidikan berperan dalam membentuk pola pikir inklusif. Pendidikan yang inklusif mendorong peserta didik untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman serta menghindari narasi yang eksklusif dan diskriminatif. Dengan demikian, peserta didik akan terbiasa berpikir terbuka dan menghargai perspektif yang berbeda.

Peran penting lainnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan toleran. Lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman (safe space) bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang mereka. Lingkungan yang bebas dari diskriminasi, perundungan, dan intoleransi akan mendorong peserta didik untuk mengekspresikan diri secara positif. Budaya sekolah yang menghargai perbedaan akan memperkuat internalisasi nilai toleransi secara alami.

Selanjutnya, lembaga pendidikan juga berperan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan dialog antarbudaya. Melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, kerja sama tim, dan program lintas budaya, peserta didik belajar berinteraksi dengan orang lain yang berbeda latar belakang. Keterampilan ini penting untuk membangun komunikasi yang efektif dan menghindari konflik. Sejalan dengan pemikiran John Dewey, pendidikan merupakan proses sosial yang bertujuan membentuk individu agar mampu hidup secara demokratis dalam masyarakat.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah penguatan pendidikan karakter berbasis toleransi. Lembaga pendidikan harus menanamkan nilai-nilai moral seperti empati, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Pendidikan karakter ini tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di

lingkungan sekolah. Dengan demikian, toleransi menjadi bagian dari karakter peserta didik.

Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam membangun toleransi. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah perlu diperkuat di lingkungan keluarga dan masyarakat agar proses internalisasi berjalan secara konsisten. Sinergi antara ketiga lingkungan ini akan menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung terbentuknya individu yang toleran.

Dalam konteks yang lebih luas, lembaga pendidikan juga memiliki peran sebagai benteng terhadap intoleransi dan radikalisme. Dengan memberikan pemahaman yang moderat dan inklusif, pendidikan dapat mencegah berkembangnya sikap eksklusif dan ekstrem. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga pendidikan dalam membangun toleransi menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan masyarakat multikultural.

D. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI

Implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan langkah strategis dalam membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, toleran, dan seimbang. Moderasi beragama (wasathiyah) tidak hanya dipahami sebagai konsep teoretis, tetapi harus diintegrasikan secara nyata dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini penting mengingat PAI memiliki peran sentral dalam membentuk pola pikir dan sikap keberagamaan peserta didik. Dengan pendekatan yang tepat, pembelajaran PAI dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai moderasi dan mencegah berkembangnya paham radikal atau ekstrem.

Dalam praktiknya, implementasi moderasi beragama dimulai dari perencanaan pembelajaran yang berbasis nilai moderasi. Guru perlu merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang tidak hanya

berorientasi pada pencapaian kompetensi kognitif, tetapi juga mencakup penguatan sikap toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Materi PAI dapat dikontekstualisasikan dengan realitas kehidupan masyarakat multikultural, sehingga peserta didik mampu memahami ajaran Islam secara relevan dan aplikatif. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), penguatan moderasi beragama dalam pendidikan harus dilakukan melalui integrasi nilai-nilai seperti *tawassuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan) dalam seluruh proses pembelajaran.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, guru perlu menggunakan pendekatan pembelajaran yang dialogis, inklusif, dan partisipatif. Metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan *problem-based learning* dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis serta menghargai perbedaan pendapat. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami keragaman interpretasi dalam ajaran Islam tanpa terjebak pada sikap eksklusif. Sejalan dengan pandangan Paulo Freire (1970), pembelajaran yang dialogis mampu membangun kesadaran kritis dan membebaskan peserta didik dari cara berpikir yang dogmatis.

Selain metode pembelajaran, peran guru sebagai teladan (*role model*) juga menjadi faktor kunci dalam implementasi moderasi beragama. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai figur yang mencerminkan nilai-nilai moderasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sikap terbuka, adil, dan menghargai perbedaan yang ditunjukkan oleh guru akan memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan karakter peserta didik. Dalam hal ini, Thomas Lickona (2012) menegaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan keteladanan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.

Implementasi moderasi beragama juga dapat diperkuat melalui pengembangan budaya sekolah yang inklusif dan toleran. Sekolah perlu menciptakan

lingkungan yang menghargai keberagaman, baik melalui kebijakan, kegiatan ekstrakurikuler, maupun interaksi sosial antarwarga sekolah. Kegiatan seperti dialog lintas agama, peringatan hari besar secara inklusif, dan kerja sama antar siswa dari latar belakang berbeda dapat menjadi sarana konkret dalam menanamkan nilai toleransi. Lingkungan yang kondusif ini akan memperkuat proses internalisasi nilai moderasi yang telah diajarkan di dalam kelas.

Di era digital, implementasi moderasi beragama juga harus didukung dengan penguatan literasi digital dan media. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk menyaring informasi keagamaan yang beredar di internet, termasuk mengenali konten yang mengandung ujaran kebencian atau paham ekstrem. Pendidikan yang responsif terhadap perkembangan teknologi akan membantu peserta didik menjadi lebih kritis dan bijak dalam menggunakan media digital. UNESCO (2017) menekankan bahwa literasi media merupakan salah satu kunci dalam mencegah penyebaran ekstremisme di kalangan generasi muda.

Lebih lanjut, aspek evaluasi pembelajaran juga perlu dirancang secara holistik untuk mengukur keberhasilan implementasi moderasi beragama. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku peserta didik. Teknik evaluasi seperti observasi, jurnal refleksi, dan penilaian sikap dapat digunakan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai moderasi telah terinternalisasi. Evaluasi yang komprehensif akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang keberhasilan pembelajaran PAI dalam membentuk karakter moderat.

E. Indikator dan Evaluasi Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik

Indikator dan evaluasi sikap moderasi beragama peserta didik merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai wasathiyah tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku nyata. Dalam konteks pendidikan, khususnya Pendidikan

Agama Islam (PAI), pengukuran sikap moderasi menjadi tantangan tersendiri karena berkaitan dengan ranah afektif yang bersifat abstrak dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang jelas serta metode evaluasi yang komprehensif agar proses penilaian dapat dilakukan secara objektif dan berkelanjutan.

Secara konseptual, indikator moderasi beragama dapat merujuk pada nilai-nilai utama seperti toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), keadilan (i'tidal), dan sikap mengambil jalan tengah (tawassuth). Indikator ini dapat diterjemahkan ke dalam perilaku konkret, seperti menghargai perbedaan pendapat, tidak mudah mengkafirkan atau menyalahkan kelompok lain, serta mampu berinteraksi secara harmonis dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama ditandai oleh empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal.

Dalam praktik pendidikan, indikator tersebut perlu dioperasionalkan menjadi indikator perilaku yang terukur. Misalnya, pada aspek toleransi, peserta didik menunjukkan sikap menghargai teman yang berbeda agama atau budaya; pada aspek anti-kekerasan, peserta didik menolak tindakan bullying atau ujaran kebencian; serta pada aspek komitmen kebangsaan, peserta didik menunjukkan sikap cinta tanah air dan menghargai simbol-simbol negara. Indikator yang konkret ini akan memudahkan guru dalam melakukan observasi dan penilaian secara sistematis.

Evaluasi sikap moderasi beragama tidak dapat dilakukan hanya melalui tes tertulis, melainkan memerlukan pendekatan penilaian autentik yang mencakup berbagai teknik. Salah satu metode yang efektif adalah observasi langsung, di mana guru mengamati perilaku peserta didik dalam interaksi sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Observasi ini dapat dilakukan menggunakan lembar penilaian yang berisi indikator-indikator sikap moderasi, sehingga hasilnya lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain observasi, penilaian diri (self-assessment) juga menjadi metode penting dalam evaluasi sikap moderasi. Melalui refleksi diri, peserta didik diajak untuk menilai sikap dan perilaku mereka sendiri, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Metode ini sejalan dengan pendekatan pendidikan karakter yang menekankan pentingnya kesadaran internal dalam pembentukan sikap. Thomas Lickona (2012) menegaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan refleksi diri sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Selanjutnya, penilaian antar teman (peer assessment) juga dapat digunakan untuk melengkapi evaluasi. Dalam metode ini, peserta didik saling memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku temannya berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Penilaian ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas karena melibatkan pengamatan dari berbagai pihak. Namun, pelaksanaannya perlu dibimbing dengan baik agar tetap objektif dan tidak menimbulkan konflik.

Evaluasi sikap moderasi juga dapat diperkuat melalui portofolio dan jurnal refleksi. Peserta didik dapat diminta untuk mendokumentasikan pengalaman mereka dalam menerapkan nilai moderasi, seperti kegiatan kerja sama lintas kelompok, partisipasi dalam diskusi, atau pengalaman menghadapi perbedaan. Dokumentasi ini akan memberikan gambaran perkembangan sikap peserta didik secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

Di era digital, evaluasi juga dapat memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran. Guru dapat menggunakan platform digital untuk mengamati interaksi peserta didik, seperti dalam forum diskusi online atau tugas kolaboratif. Hal ini penting mengingat perilaku intoleran seringkali muncul di ruang digital. Oleh karena itu, kemampuan peserta didik dalam bersikap moderat di dunia maya juga perlu menjadi bagian dari indikator penilaian. UNESCO (2017) menekankan pentingnya literasi digital dalam membangun ketahanan terhadap ekstremisme di kalangan pelajar.

BAB 6

PAI dalam Membangun Toleransi, Dialog, dan Harmoni Sosial

A. Konsep Toleransi dan Dialog Antarumat Beragama

a) Pengertian toleransi dalam perspektif Islam (tasamuh)

Toleransi dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah tasamuh, yang secara etimologis berarti sikap lapang dada, saling menghormati, dan memberikan kemudahan kepada orang lain tanpa adanya paksaan. Konsep ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan, baik dalam aspek keyakinan, budaya, maupun praktik sosial. Dalam Islam, tasamuh bukan sekadar sikap pasif menerima perbedaan, tetapi merupakan bentuk aktif dari penghormatan terhadap hak-hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya secara bebas dan bertanggung jawab.

Secara teologis, konsep tasamuh memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah QS. Al-Baqarah [2]: 256 yang menegaskan bahwa "tidak ada paksaan dalam agama," yang menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip fundamental dalam Islam. Selain itu, QS. Al-Kafirun [109]: 6, "bagimu agamamu dan bagiku agamaku," mempertegas pengakuan Islam terhadap eksistensi perbedaan keyakinan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan sikap menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehendak Ilahi. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa toleransi dalam

Islam adalah sikap yang memberikan kebebasan kepada orang lain tanpa mengorbankan prinsip akidah.

Dalam praktiknya, tasamuh juga tercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad yang menunjukkan sikap toleran terhadap kelompok non-Muslim. Salah satu contoh historis adalah Piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama antara berbagai kelompok agama dan suku secara damai dan adil. Piagam ini menjadi bukti bahwa Islam sejak awal telah mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang plural.

Lebih lanjut, toleransi dalam Islam memiliki batasan yang jelas, yaitu tidak mencampuradukkan akidah atau prinsip-prinsip dasar agama. Artinya, seorang Muslim tetap teguh dalam keyakinannya, namun tetap menghormati keyakinan orang lain. Dengan demikian, tasamuh dalam Islam bersifat proporsional, yaitu menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama dan penghormatan terhadap perbedaan.

Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang tasamuh menjadi sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik sejak dini. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk sikap toleransi melalui pembelajaran yang inklusif dan kontekstual. Dengan memahami konsep tasamuh, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap terbuka, menghargai perbedaan, serta berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai dan harmonis di tengah masyarakat yang multikultural.

b) Prinsip-prinsip dialog antarumat beragama

Dialog antarumat beragama merupakan salah satu pendekatan penting dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang plural. Dalam perspektif Islam, dialog tidak hanya dimaknai sebagai pertukaran gagasan, tetapi juga sebagai upaya membangun saling pengertian, penghormatan, dan kerja

sama dalam kebaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan dialog antaragama harus berlandaskan prinsip-prinsip yang kuat agar tidak menimbulkan konflik baru, melainkan memperkuat hubungan sosial yang damai.

Salah satu prinsip utama dalam dialog antarumat beragama adalah sikap saling menghormati (mutual respect). Setiap individu atau kelompok harus menghargai keyakinan dan praktik keagamaan pihak lain tanpa merendahkan atau memaksakan pandangan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk berinteraksi secara baik dengan pemeluk agama lain, selama tidak ada permusuhan. Sikap saling menghormati menjadi fondasi utama dalam menciptakan dialog yang sehat dan konstruktif.

Prinsip kedua adalah kesetaraan dan keadilan (equality and fairness) dalam dialog. Semua pihak yang terlibat harus diposisikan secara setara tanpa adanya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain. Dialog tidak boleh menjadi alat untuk menunjukkan superioritas, melainkan sebagai ruang untuk berbagi pemahaman secara adil. Dalam hal ini, Hans Küng menekankan bahwa tidak akan ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antaragama, dan tidak akan ada perdamaian antaragama tanpa dialog yang dilandasi keadilan dan kesetaraan.

Selanjutnya, prinsip yang tidak kalah penting adalah keterbukaan dan kejujuran (openness and sincerity). Dialog yang efektif menuntut setiap pihak untuk bersikap terbuka terhadap perbedaan serta jujur dalam menyampaikan pandangannya. Keterbukaan ini mencakup kesiapan untuk mendengar, memahami, dan bahkan mengkritisi secara konstruktif tanpa menimbulkan konflik. Sikap ini akan menciptakan suasana dialog yang inklusif dan produktif.

Prinsip keempat adalah tidak adanya paksaan (non-coercion) dalam dialog. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mempertahankan keyakinannya tanpa tekanan dari pihak lain. Dialog tidak bertujuan untuk

mengubah keyakinan seseorang secara paksa, melainkan untuk membangun pemahaman bersama. Prinsip ini sejalan dengan nilai dasar Islam yang menolak pemaksaan dalam urusan agama.

Selain itu, dialog antaragama juga harus dilandasi oleh tujuan bersama untuk kebaikan (*common good*). Dialog bukan sekadar diskusi teologis, tetapi juga diarahkan pada kerja sama dalam menyelesaikan persoalan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik. Dalam konteks ini, UNESCO menegaskan bahwa dialog antarbudaya dan antaragama merupakan sarana penting dalam membangun perdamaian dan solidaritas global.

Prinsip berikutnya adalah pengakuan terhadap keberagaman (*recognition of diversity*). Perbedaan agama, budaya, dan tradisi harus dipahami sebagai realitas yang tidak dapat dihindari dan justru menjadi kekayaan sosial. Dengan mengakui keberagaman, dialog dapat menjadi sarana untuk memperkuat persatuan tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.

Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip dialog antarumat beragama perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran agar peserta didik memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara toleran dan inklusif. Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan pembelajaran yang dialogis dan reflektif. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep dialog, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

c) Landasan teologis toleransi dalam Al-Qur'an dan Hadis

Toleransi dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Ajaran Islam menempatkan toleransi sebagai bagian integral dari nilai-nilai universal yang mengatur hubungan antarmanusia (*hablum minannas*), tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keimanan (*hablum minallah*). Oleh karena itu, konsep toleransi (*tasamuh*) bukanlah nilai

yang diadopsi dari luar, melainkan bagian inheren dari ajaran Islam itu sendiri yang berakar pada wahyu Ilahi.

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menegaskan prinsip toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Salah satu ayat yang paling fundamental adalah QS. Al-Baqarah [2]: 256 yang menyatakan bahwa "tidak ada paksaan dalam agama" (*lā ikrāha fī ad-dīn*). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menolak segala bentuk pemaksaan dalam keyakinan. Selain itu, QS. Yunus [10]: 99 menegaskan bahwa jika Allah menghendaki, seluruh manusia akan beriman, namun kenyataannya perbedaan keyakinan adalah bagian dari kehendak-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa pluralitas merupakan *sunnatullah* yang harus diterima dengan sikap bijaksana.

Ayat lain yang memperkuat landasan toleransi adalah QS. Al-Hujurat [49]: 13 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (*li ta'ārafū*). Ayat ini menekankan pentingnya interaksi sosial yang harmonis dalam keberagaman. Demikian pula, QS. Al-Kafirun [109]: 6 yang berbunyi "bagimu agamamu dan bagiku agamaku" menegaskan pengakuan terhadap perbedaan keyakinan sebagai realitas yang tidak dapat dihindari. Menurut Fazlur Rahman, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan etika sosial yang inklusif dan menghargai pluralitas sebagai bagian dari tatanan moral Islam.

Selain Al-Qur'an, Hadis juga memberikan contoh konkret tentang praktik toleransi dalam kehidupan Nabi Muhammad. Salah satu hadis yang relevan adalah riwayat yang menyatakan bahwa siapa pun yang menyakiti non-Muslim yang hidup damai (*dzimmi*), maka ia telah menyakiti Rasulullah. Hadis ini menunjukkan perlindungan Islam terhadap hak-hak non-Muslim. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad juga menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan berbagai komunitas, termasuk Yahudi dan Nasrani,

serta memberikan jaminan kebebasan beragama dalam Piagam Madinah.

Lebih lanjut, prinsip toleransi dalam Hadis juga tercermin dalam ajaran tentang akhlak mulia, seperti sikap lemah lembut, kasih sayang, dan keadilan. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa membedakan latar belakang agama atau suku. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kontemporer, pemahaman terhadap landasan teologis ini menjadi sangat penting untuk menangkis interpretasi keagamaan yang sempit dan eksklusif. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menegaskan bahwa moderasi beragama harus berakar pada pemahaman yang benar terhadap teks-teks keagamaan, sehingga tidak disalahgunakan untuk membenarkan tindakan intoleran atau radikal.

d) Urgensi toleransi dalam masyarakat multikultural

Toleransi merupakan nilai yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang terdiri atas beragam latar belakang agama, budaya, etnis, dan bahasa. Dalam konteks ini, toleransi tidak hanya menjadi sikap moral individual, tetapi juga menjadi kebutuhan sosial yang mendesak untuk menjaga stabilitas, keharmonisan, dan keberlanjutan kehidupan bersama. Tanpa toleransi, perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan justru berpotensi menjadi sumber konflik dan perpecahan.

Dalam masyarakat multikultural, interaksi antarindividu dan kelompok yang berbeda tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, toleransi menjadi jembatan yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan kerja sama yang konstruktif. Toleransi membantu individu untuk menerima perbedaan sebagai realitas sosial yang wajar, bukan ancaman. Menurut Bhikhu Parekh, masyarakat multikultural yang sehat adalah masyarakat yang mampu mengelola perbedaan melalui dialog, saling

pengertian, dan penghargaan terhadap identitas masing-masing kelompok.

Urgensi toleransi juga terlihat dalam upaya mencegah konflik sosial dan kekerasan berbasis identitas. Banyak konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia berakar pada ketidakmampuan menerima perbedaan, terutama dalam hal agama dan etnis. Dalam situasi seperti ini, toleransi berfungsi sebagai mekanisme preventif yang dapat meredam potensi konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan. UNESCO menegaskan bahwa toleransi merupakan prasyarat utama dalam membangun perdamaian dan keamanan global.

Selain itu, toleransi memiliki peran penting dalam membangun kohesi sosial dan integrasi masyarakat. Dalam masyarakat yang beragam, kohesi sosial tidak dapat dibangun melalui keseragaman, melainkan melalui penerimaan terhadap perbedaan. Toleransi memungkinkan individu untuk hidup berdampingan secara damai tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing. Hal ini sejalan dengan konsep *unity in diversity* yang menekankan bahwa persatuan dapat terwujud justru karena adanya keberagaman yang dikelola dengan baik.

Dalam perspektif pendidikan, toleransi menjadi nilai yang harus ditanamkan sejak dini agar peserta didik memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat multikultural. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk sikap toleransi melalui pemahaman ajaran Islam yang moderat dan inklusif. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami pentingnya toleransi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, toleransi juga berkontribusi terhadap pembangunan demokrasi dan keadilan sosial. Masyarakat yang toleran cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dan lebih menghargai hak asasi manusia. Hal ini menjadi fondasi penting dalam

sistem demokrasi yang menuntut partisipasi aktif dari seluruh warga tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, John Rawls menekankan pentingnya prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kebebasan individu sebagai dasar kehidupan bersama dalam masyarakat plural.

Namun demikian, membangun toleransi dalam masyarakat multikultural bukanlah hal yang mudah. Tantangan seperti prasangka, stereotip, dan eksklusivisme masih sering menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis melalui pendidikan, kebijakan publik, dan peran aktif masyarakat untuk memperkuat nilai toleransi.

B. Pendidikan Agama Islam sebagai Media Resolusi Konflik Sosial

a) Konsep konflik sosial dalam perspektif pendidikan

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks yang plural dan multikultural. Konflik muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan, nilai, keyakinan, maupun identitas sosial antarindividu atau kelompok. Dalam perspektif pendidikan, konflik tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat menjadi sarana pembelajaran apabila dikelola secara konstruktif. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang peserta didik terhadap konflik, dari yang bersifat destruktif menjadi konstruktif.

Secara konseptual, konflik sosial dalam pendidikan dapat dipahami sebagai interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan pandangan atau kepentingan dalam lingkungan belajar. Lingkungan pendidikan, seperti sekolah, merupakan miniatur masyarakat yang mencerminkan keberagaman latar belakang peserta didik, baik dari segi agama, budaya, maupun sosial ekonomi. Dalam kondisi ini, potensi konflik menjadi hal yang wajar. Namun, melalui pendekatan pendidikan yang tepat, konflik dapat

dijadikan sebagai sarana untuk melatih keterampilan sosial, seperti komunikasi, empati, dan kemampuan menyelesaikan masalah.

Dalam kajian sosiologi pendidikan, konflik juga dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan identitas dan pemahaman sosial. Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik tidak selalu merusak, tetapi dapat memperkuat solidaritas kelompok dan mendorong perubahan sosial yang positif apabila dikelola dengan baik. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa konflik dapat menjadi peluang untuk mengembangkan kesadaran kritis peserta didik terhadap realitas sosial yang kompleks.

Pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), memiliki peran strategis dalam mengarahkan pemahaman peserta didik tentang konflik. PAI tidak hanya mengajarkan nilai-nilai keagamaan secara normatif, tetapi juga memberikan landasan etis dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, perdamaian, dan toleransi menjadi prinsip penting dalam menyikapi konflik sosial. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konflik sebagai pertentangan, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun harmoni melalui pendekatan yang bijaksana.

Lebih lanjut, dalam perspektif pendidikan modern, konflik sosial dipandang sebagai bagian dari pembelajaran sosial (*social learning*). Melalui interaksi dan pengalaman langsung, peserta didik belajar bagaimana menghadapi perbedaan, mengelola emosi, serta mencari solusi yang adil dan damai. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran John Dewey yang menekankan bahwa pendidikan merupakan proses pengalaman sosial yang membentuk kemampuan individu untuk hidup secara demokratis dalam masyarakat.

Namun demikian, konflik juga dapat menjadi destruktif apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan

permusuhan, diskriminasi, bahkan kekerasan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memiliki strategi yang sistematis dalam mengelola konflik, seperti melalui pendidikan karakter, pembelajaran berbasis dialog, serta penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Dalam hal ini, UNESCO menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membangun budaya damai (culture of peace) dan mencegah konflik sosial.

b) Peran PAI dalam mencegah konflik berbasis agama

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam mencegah konflik berbasis agama, terutama dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Sebagai mata pelajaran yang tidak hanya mengajarkan aspek ritual dan doktrinal, PAI juga berfungsi membentuk cara pandang keagamaan peserta didik agar bersifat moderat, inklusif, dan toleran. Dalam konteks ini, PAI menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran bahwa perbedaan keyakinan adalah realitas sosial yang harus dikelola dengan bijaksana, bukan dijadikan sumber konflik.

Salah satu peran utama PAI adalah menanamkan pemahaman keagamaan yang moderat (wasathiyah). Melalui pembelajaran yang tepat, peserta didik diajak untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif dan kontekstual, sehingga tidak terjebak pada interpretasi yang sempit dan eksklusif. Nilai-nilai seperti toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan keadilan (i'tidal) menjadi landasan dalam membentuk sikap keberagamaan yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan kunci dalam mencegah munculnya ekstremisme dan konflik berbasis agama.

Selain itu, PAI berperan dalam mengembangkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Pembelajaran PAI yang inklusif mendorong peserta didik untuk memahami bahwa perbedaan agama, budaya, dan tradisi merupakan bagian dari sunnatullah. Dengan demikian, peserta didik

tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga mampu hidup berdampingan secara harmonis. Pendekatan ini penting untuk mencegah munculnya sikap intoleran yang dapat memicu konflik sosial.

Peran PAI juga terlihat dalam penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Nilai-nilai seperti empati, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab diajarkan sebagai bagian dari akhlak mulia. Pendidikan karakter ini membantu peserta didik dalam mengelola emosi dan menyelesaikan konflik secara damai. Dalam perspektif Thomas Lickona, pembentukan karakter yang kuat menjadi fondasi penting dalam mencegah perilaku agresif dan konflik sosial.

Selanjutnya, PAI berperan dalam mengembangkan keterampilan dialog dan resolusi konflik. Melalui metode pembelajaran yang dialogis dan partisipatif, peserta didik dilatih untuk menyampaikan pendapat secara santun, mendengarkan perspektif orang lain, serta mencari solusi bersama. Keterampilan ini sangat penting dalam mencegah konflik berbasis agama yang seringkali dipicu oleh kesalahpahaman dan komunikasi yang tidak efektif. Sejalan dengan pemikiran Paulo Freire, pendidikan yang dialogis mampu membangun kesadaran kritis dan mendorong penyelesaian masalah secara konstruktif.

Di era digital, PAI juga memiliki peran dalam membekali peserta didik dengan literasi keagamaan dan digital. Banyak konflik berbasis agama dipicu oleh penyebaran informasi yang tidak akurat atau provokatif di media sosial. Oleh karena itu, peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, memahami konteks, dan tidak mudah terprovokasi. UNESCO (2017) menekankan bahwa literasi media merupakan salah satu strategi penting dalam mencegah ekstremisme di kalangan generasi muda.

Lebih jauh, PAI juga berfungsi sebagai media internalisasi nilai perdamaian dan keadilan sosial. Melalui pembelajaran yang kontekstual, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya hidup damai dan

berkontribusi dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Nilai-nilai ini akan membentuk kesadaran bahwa konflik bukanlah solusi, melainkan masalah yang harus diselesaikan melalui pendekatan damai.

c) Pendekatan resolusi konflik melalui nilai-nilai Islam

Resolusi konflik dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan untuk menghentikan pertentangan, tetapi juga untuk membangun kembali hubungan yang harmonis dan berkeadilan. Islam memandang konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan manusia yang harus diselesaikan dengan cara-cara yang damai, bijaksana, dan bermartabat. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam menyediakan kerangka etis dan praktis dalam menyelesaikan konflik, baik pada tingkat individu maupun sosial.

Salah satu pendekatan utama dalam resolusi konflik menurut Islam adalah prinsip perdamaian (*ṣulḥ*). Konsep ini menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalan damai dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai secara adil dan proporsional. Prinsip *ṣulḥ* tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat konflik.

Selain itu, Islam juga menekankan prinsip keadilan (*ʿadl*) sebagai landasan utama dalam penyelesaian konflik. Keadilan harus ditegakkan tanpa memihak, bahkan terhadap diri sendiri atau kelompok sendiri. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa resolusi konflik tidak menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakadilan baru. Dalam konteks ini, Fazlur Rahman menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai sentral dalam etika sosial Islam yang harus menjadi dasar dalam setiap interaksi sosial, termasuk dalam penyelesaian konflik.

Pendekatan berikutnya adalah musyawarah (*shūrā*) sebagai mekanisme dialog dalam menyelesaikan konflik.

Musyawarah memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama. Proses ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih adil, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Musyawarah menjadi sarana penting dalam membangun komunikasi yang efektif dan menghindari kesalahpahaman yang sering menjadi pemicu konflik.

Islam juga mengajarkan nilai pemaafan ('afw) dan rekonsiliasi sebagai bagian dari resolusi konflik. Memaafkan bukan berarti mengabaikan kesalahan, tetapi merupakan upaya untuk mengakhiri permusuhan dan membuka jalan bagi hubungan yang lebih baik. Sikap pemaaf mencerminkan kedewasaan emosional dan spiritual yang sangat dibutuhkan dalam menciptakan perdamaian. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad memberikan teladan nyata melalui berbagai peristiwa yang menunjukkan sikap pemaaf dan rekonsiliatif, bahkan terhadap pihak yang pernah memusuhinya.

Selanjutnya, prinsip toleransi (tasamuh) dan penghormatan terhadap perbedaan juga menjadi bagian penting dalam resolusi konflik. Banyak konflik sosial berakar pada ketidakmampuan menerima perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, maupun pandangan. Dengan mengedepankan toleransi, individu dan kelompok dapat mengelola perbedaan secara konstruktif dan menghindari eskalasi konflik.

Dalam konteks pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), nilai-nilai resolusi konflik ini dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Peserta didik perlu dilatih untuk memahami konflik sebagai bagian dari kehidupan sosial serta dibekali keterampilan untuk menyelesaikannya secara damai. Pendekatan ini sejalan dengan upaya membangun budaya damai (culture of peace) sebagaimana ditekankan oleh UNESCO, yang menempatkan pendidikan sebagai sarana utama dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.

d) Strategi pembelajaran PAI dalam membangun perdamaian

Strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membangun perdamaian merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan peserta didik. Pembelajaran PAI tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga harus menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik agar nilai-nilai perdamaian dapat diinternalisasi secara utuh. Dalam konteks ini, strategi pembelajaran yang tepat akan membantu peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian, toleransi, dan keadilan.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pendekatan pembelajaran berbasis nilai (*value-based learning*). Melalui pendekatan ini, guru tidak hanya menyampaikan materi ajar, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai seperti toleransi (*tasamuh*), keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui contoh konkret, refleksi, dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Thomas Lickona, yang menekankan pentingnya pembentukan moral melalui keteladanan dan pembiasaan.

Strategi berikutnya adalah pembelajaran dialogis dan partisipatif. Dalam model ini, peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, debat konstruktif, dan kerja kelompok. Pendekatan dialogis memungkinkan peserta didik untuk mengemukakan pendapat, menghargai perbedaan, serta belajar menyelesaikan perbedaan secara damai. Hal ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang menekankan bahwa pendidikan harus bersifat dialogis untuk membangun kesadaran kritis dan sikap saling menghargai.

Selain itu, strategi pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) juga sangat efektif dalam membangun perdamaian. Peserta didik dapat diajak untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti lintas agama, kunjungan ke tempat ibadah lain, atau kegiatan bakti sosial. Pengalaman langsung ini akan membantu peserta didik memahami pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam. Pembelajaran kontekstual seperti ini memperkuat pemahaman bahwa nilai-nilai Islam relevan dalam kehidupan nyata.

PAI juga dapat mengembangkan pembelajaran berbasis studi kasus (*case-based learning*) terkait konflik sosial dan keagamaan. Peserta didik diajak untuk menganalisis kasus nyata, mengidentifikasi akar masalah, serta merumuskan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Strategi ini melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus membangun keterampilan resolusi konflik secara konstruktif. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata.

Di era digital, strategi yang tidak kalah penting adalah penguatan literasi digital dan keagamaan. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk menyaring informasi, menghindari hoaks, serta memahami konten keagamaan secara kritis. Banyak konflik berbasis agama dipicu oleh misinformasi di media sosial, sehingga literasi digital menjadi bagian penting dalam pendidikan perdamaian. UNESCO (2017) menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah ekstremisme melalui penguatan literasi media dan pemikiran kritis.

Selanjutnya, keteladanan guru (*teacher modeling*) menjadi strategi kunci dalam pembelajaran PAI. Guru sebagai figur sentral harus mampu menunjukkan sikap toleran, adil, dan menghargai perbedaan dalam interaksi sehari-hari. Keteladanan ini memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk karakter peserta didik, karena

nilai-nilai perdamaian tidak hanya diajarkan, tetapi juga dicontohkan secara nyata.

Terakhir, penting untuk mengintegrasikan evaluasi berbasis sikap (*attitude assessment*) dalam pembelajaran PAI. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada sikap dan perilaku peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai perdamaian. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi, jurnal refleksi, dan penilaian diri untuk melihat sejauh mana peserta didik telah menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

C. Dialog Antaragama dalam Perspektif Pendidikan

a) Pengertian dan tujuan dialog antaragama

Dialog antaragama dalam perspektif pendidikan merupakan suatu proses komunikasi yang terbuka, setara, dan saling menghargai antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang agama berbeda, dengan tujuan untuk saling memahami, bukan untuk memaksakan keyakinan. Dalam konteks pendidikan, dialog antaragama tidak hanya dipahami sebagai percakapan formal, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dialog ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bahwa perbedaan agama adalah realitas sosial yang harus disikapi secara bijaksana dan konstruktif.

Secara konseptual, dialog antaragama menekankan prinsip saling mendengarkan (*mutual listening*), saling belajar (*mutual learning*), dan saling menghargai (*mutual respect*). Dialog tidak bertujuan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan untuk memahami perspektif masing-masing pihak secara lebih mendalam. Dalam hal ini, Hans Küng menyatakan bahwa tidak akan ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antaragama, dan tidak akan ada perdamaian antaragama tanpa dialog yang jujur dan terbuka. Pandangan ini menegaskan bahwa dialog antaragama memiliki peran

strategis dalam menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman.

Dalam konteks pendidikan, dialog antaragama memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, membangun pemahaman yang benar terhadap ajaran agama lain. Melalui dialog, peserta didik dapat mengenal nilai-nilai universal yang ada dalam berbagai agama, seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Pemahaman ini penting untuk menghindari stereotip, prasangka, dan kesalahpahaman yang sering menjadi pemicu konflik.

Kedua, menumbuhkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Dialog antaragama membantu peserta didik untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sosial. Sikap toleransi ini tidak berarti mencampuradukkan keyakinan, tetapi menghormati hak setiap individu untuk menjalankan agamanya. Dalam perspektif ini, UNESCO menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mempromosikan budaya damai dan saling pengertian antarbudaya dan antaragama.

Ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja sama lintas budaya. Dialog antaragama melatih peserta didik untuk berkomunikasi secara efektif, menyampaikan pendapat dengan santun, serta bekerja sama dengan orang lain yang memiliki latar belakang berbeda. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan global yang semakin terhubung dan beragam.

Keempat, mencegah konflik berbasis agama dan membangun perdamaian. Dengan adanya dialog yang konstruktif, potensi konflik dapat diminimalkan karena setiap pihak memiliki ruang untuk saling memahami dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Dialog antaragama menjadi sarana preventif dalam menghindari radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam keharmonisan sosial.

Selain itu, dalam perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI), dialog antaragama juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi perdamaian dan

penghormatan terhadap perbedaan. Islam mengajarkan pentingnya berdialog dengan cara yang baik (bil hikmah wa al-mau'izhah al-hasanah), yang menekankan pendekatan bijaksana, santun, dan argumentatif. Hal ini menunjukkan bahwa dialog antaragama bukan hanya relevan secara sosial, tetapi juga memiliki landasan teologis dalam ajaran Islam.

b) Model-model dialog antaragama dalam pendidikan

Dialog antaragama dalam konteks pendidikan dapat dikembangkan melalui berbagai model yang dirancang untuk menumbuhkan pemahaman, toleransi, dan kerja sama di tengah keberagaman. Model-model ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam praktik pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengalami secara langsung proses interaksi lintas agama yang konstruktif dan bermakna.

Salah satu model yang umum digunakan adalah dialog informatif (informational dialogue), yaitu dialog yang bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan tentang ajaran, praktik, dan nilai-nilai masing-masing agama. Dalam model ini, peserta didik diperkenalkan pada konsep dasar agama lain secara objektif dan proporsional. Tujuannya adalah untuk mengurangi prasangka dan kesalahpahaman yang sering muncul akibat kurangnya informasi. Model ini penting sebagai tahap awal dalam membangun pemahaman lintas agama yang benar.

Model berikutnya adalah dialog reflektif (reflective dialogue), yang menekankan pada proses perenungan dan pemaknaan terhadap pengalaman keberagaman masing-masing individu. Peserta didik tidak hanya mendengarkan informasi, tetapi juga diajak untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka yakini serta menemukan titik temu dengan nilai-nilai universal dari agama lain. Dalam konteks ini, Hans Küng menekankan pentingnya menemukan etika global (global ethics) sebagai dasar bersama dalam dialog antaragama.

Selanjutnya, terdapat dialog kolaboratif (*collaborative dialogue*), yaitu dialog yang diwujudkan melalui kerja sama nyata dalam kegiatan sosial. Peserta didik dari latar belakang agama yang berbeda diajak untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kemanusiaan, seperti kegiatan sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. Model ini menekankan bahwa kerja sama lintas agama dapat memperkuat persatuan dan mengurangi potensi konflik. Melalui pengalaman bersama, peserta didik belajar bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk berbuat kebaikan bersama.

Model lain yang juga penting adalah dialog kehidupan (*dialogue of life*). Model ini tidak selalu dilakukan dalam forum formal, tetapi terjadi dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah atau masyarakat. Peserta didik belajar untuk hidup berdampingan, saling menghormati, dan berbagi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Dialog kehidupan ini menjadi bentuk paling nyata dari toleransi karena berlangsung secara alami dan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat dialog aksi (*dialogue of action*) yang berfokus pada keterlibatan bersama dalam menyelesaikan masalah sosial. Dalam model ini, peserta didik diajak untuk bersama-sama merespons isu-isu seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau konflik sosial. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan UNESCO yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana membangun budaya damai melalui aksi nyata dan kolaborasi lintas budaya.

Dalam konteks pembelajaran, model-model dialog antaragama ini dapat diintegrasikan melalui berbagai metode seperti diskusi kelas, studi kasus, role play, proyek kolaboratif, dan kegiatan ekstrakurikuler. Guru memiliki peran penting dalam merancang suasana dialog yang aman, terbuka, dan inklusif, sehingga peserta didik merasa nyaman untuk berbagi dan belajar dari perbedaan.

c) Peran lembaga pendidikan dalam memfasilitasi dialog

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi dialog antaragama sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan damai. Sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempertemukan individu dari latar belakang yang beragam. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan menjadi arena penting untuk menumbuhkan budaya dialog yang sehat dan konstruktif.

Salah satu peran utama lembaga pendidikan adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman. Lingkungan yang inklusif memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan identitas keagamaannya tanpa rasa takut atau diskriminasi. Suasana yang terbuka dan saling menghargai menjadi prasyarat utama bagi berlangsungnya dialog yang efektif. Ketika peserta didik merasa dihargai, mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain.

Selain itu, lembaga pendidikan berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai dialog dalam kurikulum dan pembelajaran. Materi pembelajaran, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), dapat dirancang untuk memuat isu-isu keberagaman, toleransi, dan dialog antaragama. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran dialogis, seperti diskusi kelompok, debat konstruktif, dan studi kasus, untuk melatih peserta didik dalam berkomunikasi secara santun dan menghargai perbedaan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses dialog yang membebaskan dan membangun kesadaran kritis.

Lembaga pendidikan juga memiliki peran dalam memfasilitasi interaksi langsung antar peserta didik dari latar belakang agama yang berbeda. Kegiatan seperti dialog lintas agama, seminar, workshop, atau kunjungan ke tempat ibadah dapat menjadi sarana efektif untuk

mempertemukan peserta didik dalam suasana yang konstruktif. Interaksi langsung ini penting untuk mengurangi stereotip dan membangun pemahaman yang lebih mendalam. Dalam hal ini, UNESCO menekankan bahwa pendidikan harus mendorong interaksi lintas budaya sebagai bagian dari upaya membangun perdamaian global.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas pendidik dalam memfasilitasi dialog. Guru perlu dibekali dengan kompetensi pedagogis dan sosial yang memadai untuk mengelola dialog antaragama secara efektif. Mereka harus mampu menciptakan suasana diskusi yang kondusif, mengelola perbedaan pendapat, serta mencegah potensi konflik yang mungkin muncul. Dengan demikian, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dialog dan mediator dalam interaksi sosial peserta didik.

Selanjutnya, lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai agen pembentukan budaya damai (*culture of peace*). Melalui berbagai program dan kebijakan, sekolah dapat menanamkan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler, program penguatan karakter, dan budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Budaya damai ini akan membentuk kebiasaan positif yang terbawa hingga ke kehidupan masyarakat luas.

Selain itu, lembaga pendidikan dapat berperan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat dan lembaga keagamaan. Kolaborasi ini penting untuk memperluas ruang dialog di luar lingkungan sekolah. Kegiatan bersama dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, atau komunitas lintas agama dapat memperkaya pengalaman peserta didik dalam memahami keberagaman secara nyata.

d) Tantangan dan peluang dialog antaragama di era global

Dialog antaragama di era global menghadapi dinamika yang semakin kompleks seiring dengan

perkembangan teknologi, mobilitas manusia, dan intensitas interaksi lintas budaya. Globalisasi telah membuka ruang pertemuan yang luas antarindividu dari berbagai latar belakang agama, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru yang perlu direspons secara bijaksana. Dalam konteks pendidikan, memahami tantangan dan peluang ini menjadi penting agar dialog antaragama dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya penyebaran intoleransi dan radikalisme melalui media digital. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan penyebaran ideologi ekstrem secara cepat dan luas, terutama melalui media sosial. Informasi yang bersifat provokatif, hoaks, dan ujaran kebencian dapat memicu konflik antaragama jika tidak disikapi secara kritis. Dalam hal ini, UNESCO menekankan pentingnya literasi media dan pendidikan kritis untuk mencegah ekstremisme di kalangan generasi muda.

Tantangan berikutnya adalah kuatnya stereotip dan prasangka antar kelompok agama. Meskipun interaksi antaragama semakin terbuka, masih banyak individu yang memiliki pemahaman yang terbatas atau keliru tentang agama lain. Stereotip ini seringkali diwariskan secara sosial dan diperkuat oleh narasi yang tidak objektif. Akibatnya, dialog antaragama menjadi sulit dilakukan karena adanya rasa curiga dan ketidakpercayaan.

Selain itu, terdapat juga tantangan politisasi agama dalam kehidupan publik. Dalam beberapa konteks, agama sering digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik, yang dapat memperuncing perbedaan dan memicu konflik. Situasi ini membuat dialog antaragama menjadi lebih sensitif dan kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga kepentingan sosial dan politik.

Namun demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, era global juga menawarkan sejumlah peluang besar bagi pengembangan dialog antaragama. Salah

satunya adalah kemudahan akses informasi dan komunikasi lintas budaya. Teknologi digital memungkinkan individu untuk belajar tentang agama lain secara lebih mudah dan langsung dari sumber yang beragam. Platform digital juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang dialog virtual yang mempertemukan berbagai perspektif secara konstruktif.

Peluang lainnya adalah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya perdamaian dan toleransi. Berbagai organisasi internasional dan komunitas global активно mendorong dialog antaragama sebagai bagian dari upaya membangun perdamaian dunia. Dalam konteks ini, Hans Küng mengemukakan gagasan tentang etika global (global ethics) yang menekankan nilai-nilai bersama antaragama sebagai dasar untuk hidup berdampingan secara damai.

Era global juga membuka peluang bagi penguatan pendidikan multikultural dan interkultural. Lembaga pendidikan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman. Program-program seperti pertukaran pelajar, kolaborasi internasional, dan kegiatan lintas budaya dapat memperkaya pengalaman peserta didik dalam memahami perbedaan.

Selain itu, terdapat peluang dalam pengembangan kolaborasi lintas agama untuk isu-isu kemanusiaan global. Tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan krisis kemanusiaan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk komunitas agama. Dialog antaragama dapat menjadi dasar untuk membangun solidaritas dan aksi bersama dalam menghadapi masalah-masalah tersebut.

D. Praktik PAI dalam Membangun Harmoni Sosial di Sekolah dan Masyarakat

Praktik Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membangun harmoni sosial di sekolah dan masyarakat merupakan wujud nyata dari implementasi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. PAI tidak hanya berfungsi

sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan keadilan. Dalam konteks masyarakat yang multikultural, praktik PAI menjadi sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman agama, budaya, dan latar belakang sosial.

Di lingkungan sekolah, praktik PAI dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran. Guru PAI tidak hanya menyampaikan materi ajar secara normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial yang dihadapi peserta didik. Nilai-nilai seperti toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan keadilan ('adl) diajarkan melalui pendekatan kontekstual, sehingga peserta didik mampu memahami relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan pendekatan penting dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang plural.

Selain itu, praktik PAI juga dapat dilakukan melalui pembiasaan budaya sekolah yang inklusif dan toleran. Sekolah sebagai ruang sosial memiliki peran besar dalam membentuk interaksi antar peserta didik. Kegiatan seperti kerja kelompok lintas latar belakang, peringatan hari besar keagamaan dengan semangat saling menghormati, serta program penguatan karakter menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai harmoni sosial. Dalam hal ini, keteladanan guru sangat penting sebagai role model dalam menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan menyelesaikan konflik secara damai.

Lebih lanjut, praktik PAI dapat dikembangkan melalui kegiatan dialog dan kolaborasi lintas agama di lingkungan sekolah. Misalnya, penyelenggaraan forum diskusi antar peserta didik dengan latar belakang agama berbeda, kunjungan ke tempat ibadah, atau kegiatan sosial bersama. Aktivitas ini memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam berinteraksi dengan perbedaan, sehingga mampu mengurangi prasangka dan membangun

empati. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire yang menekankan pentingnya pendidikan dialogis dalam membangun kesadaran sosial.

Di luar lingkungan sekolah, praktik PAI dalam membangun harmoni sosial dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan masyarakat. Peserta didik dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, gotong royong, atau program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai kelompok agama. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama.

Praktik lainnya adalah penguatan literasi keagamaan dan digital dalam masyarakat. Di era digital, banyak konflik sosial dipicu oleh penyebaran informasi yang tidak akurat atau provokatif. Oleh karena itu, PAI perlu membekali peserta didik dengan kemampuan untuk memahami ajaran agama secara benar serta menyaring informasi secara kritis. UNESCO (2017) menekankan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah ekstremisme melalui penguatan literasi media dan pemikiran kritis.

Selain itu, praktik PAI juga mencakup penguatan nilai-nilai ukhuwah (persaudaraan), baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah (kebangsaan), maupun ukhuwah insaniyah (kemanusiaan). Ketiga konsep ini menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, tidak hanya di antara sesama Muslim, tetapi juga dengan seluruh umat manusia. Melalui pemahaman ini, peserta didik diajak untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman.

Dalam praktiknya, keberhasilan PAI dalam membangun harmoni sosial sangat bergantung pada sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan keluarga yang mendukung nilai-nilai toleransi serta masyarakat yang kondusif akan memperkuat hasil pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, kolaborasi antar berbagai pihak menjadi kunci dalam menciptakan

ekosistem pendidikan yang mendukung terciptanya harmoni sosial.

E. Studi Kasus Penerapan PAI dalam Masyarakat Multikultural

Penerapan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam masyarakat multikultural dapat dilihat melalui berbagai praktik nyata yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam mampu berkontribusi dalam membangun harmoni sosial. Studi kasus menjadi pendekatan penting untuk memahami bagaimana konsep-konsep seperti toleransi, moderasi beragama, dan dialog antaragama diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui studi kasus, pembelajaran PAI tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif sesuai dengan realitas sosial yang dihadapi.

Salah satu contoh penerapan PAI dalam masyarakat multikultural dapat ditemukan di lingkungan sekolah yang memiliki peserta didik dari berbagai latar belakang agama. Di beberapa sekolah di Indonesia, guru PAI mengembangkan model pembelajaran inklusif dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Misalnya, peserta didik diajak untuk berdiskusi tentang pentingnya menghormati perbedaan keyakinan serta dilibatkan dalam kegiatan sosial bersama tanpa memandang latar belakang agama. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun sikap saling menghargai dan mengurangi potensi konflik antar peserta didik. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menekankan bahwa pendidikan berbasis moderasi beragama menjadi kunci dalam menjaga kerukunan di lingkungan pendidikan.

Studi kasus lain dapat dilihat pada praktik kegiatan lintas agama di masyarakat, seperti kerja bakti, bakti sosial, dan perayaan hari besar nasional yang melibatkan berbagai kelompok agama. Dalam kegiatan tersebut, nilai-nilai PAI seperti ukhuwah (persaudaraan), gotong royong, dan kepedulian sosial diimplementasikan secara nyata. Peserta didik yang terlibat dalam kegiatan ini memperoleh

pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan perbedaan, sehingga mampu mengembangkan empati dan sikap toleran. Hal ini sejalan dengan pandangan UNESCO yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pendidikan untuk membangun budaya damai.

Contoh lainnya adalah penerapan PAI dalam program dialog antaragama berbasis komunitas. Di beberapa daerah, lembaga pendidikan bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat untuk menyelenggarakan forum dialog yang melibatkan generasi muda dari berbagai latar belakang agama. Dalam forum ini, peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan membangun pemahaman bersama tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatan semacam ini tidak hanya memperluas wawasan peserta didik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas.

Selain itu, terdapat juga praktik PAI dalam penguatan literasi digital keagamaan di masyarakat multikultural. Mengingat banyaknya informasi keagamaan yang beredar di media sosial, peserta didik dibekali dengan kemampuan untuk menyaring informasi dan memahami ajaran agama secara kritis. Program ini bertujuan untuk mencegah penyebaran paham radikal dan intoleran yang dapat memicu konflik sosial. Dalam konteks ini, pendidikan PAI berperan sebagai filter yang membantu peserta didik dalam memahami agama secara moderat dan kontekstual.

Studi kasus yang tidak kalah penting adalah penerapan nilai-nilai PAI dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Dalam beberapa kasus konflik berbasis agama, tokoh pendidikan dan agama menggunakan pendekatan dialog, musyawarah, dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan permasalahan. Nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), perdamaian (*ṣulh*), dan pemaafan (*'afw*) menjadi dasar dalam proses resolusi konflik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa PAI memiliki kontribusi nyata dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas sosial.

Keberhasilan penerapan PAI dalam masyarakat multikultural tidak terlepas dari sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Sekolah berperan

sebagai pusat pembelajaran, keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pembentukan karakter, dan masyarakat sebagai ruang praktik nilai-nilai tersebut. Kolaborasi yang baik antar ketiga elemen ini akan memperkuat implementasi nilai-nilai PAI dalam kehidupan sehari-hari.

BAB 7

Kurikulum dan Materi PAI Berbasis Multikulturalisme

A. Konsep Kurikulum PAI Berbasis Multikultural

Realitas sosiologis Bangsa Indonesia yang ditandai dengan kemajemukan etnis, budaya, bahasa, dan agama merupakan anugerah teologis sekaligus tantangan pedagogis bagi integritas nasional. Keberagaman ini, jika tidak dikelola dengan paradigma pendidikan yang inklusif, berpotensi memicu fragmentasi sosial dan konflik horizontal yang destruktif. Dalam lanskap pendidikan nasional, rekonstruksi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi sebuah keniscayaan akademik yang mendesak. PAI tidak lagi memadai jika hanya diajarkan sebagai sekumpulan doktrin ritual-formal yang bersifat eksklusif; ia harus bertransformasi menjadi sebuah sistem pendidikan yang berbasis multikultural untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan universal. Kurikulum PAI berbasis multikultural dirancang untuk membantu peserta didik memahami bahwa perbedaan identitas adalah *sunnatullah* atau ketetapan Tuhan yang harus dihargai sebagai modalitas kekuatan peradaban, bukan sebagai sumber perpecahan .

Pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural didasarkan pada landasan filosofis yang kokoh, bertujuan untuk menciptakan ruang diskursus pendidikan yang menghargai martabat manusia tanpa memandang latar belakang primordial. Landasan ini mencakup beberapa pilar utama, yaitu humanisme, pluralisme, inklusivisme, dan konstruktivisme. Filosofi humanisme dalam pendidikan

Islam menekankan pada penghargaan terhadap hak asasi dan martabat setiap individu, memposisikan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi spiritual yang setara di hadapan pencipta . Pluralisme membantu peserta didik menyadari bahwa kebenaran dalam ranah sosial-budaya bersifat majemuk dan kontekstual, sementara inklusivisme menjembatani pemahaman antarumat beragama melalui dialog yang terbuka dan kebersamaan.

Secara teologis, konsep kurikulum ini berakar kuat pada teks-teks otoritatif Islam. Al-Qur'an dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 memberikan penegasan ontologis bahwa penciptaan manusia dalam berbagai bangsa dan suku bertujuan agar mereka saling mengenal (*li-ta'arafu*). Prinsip ini memberikan legitimasi keagamaan bahwa keberagaman adalah desain ilahiyah yang menuntut interaksi positif, bukan penafian terhadap eksistensi kelompok lain. Selain itu, misi Islam sebagai *rahmatan lil-'alamīn* (rahmat bagi seluruh alam) menuntut PAI untuk mampu memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada seluruh makhluk, melintasi batas-batas identitas

Dalam lingkup kementerian, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 menjadi instrumen penting dalam penyempurnaan kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah. Kebijakan ini menekankan pentingnya mempersiapkan generasi yang memiliki mindset moderat, inklusif, dan berakhlak mulia guna menghadapi tantangan global abad ke-21. KMA ini mendorong pendidik untuk lebih adaptif dalam mengembangkan materi yang relevan dengan semangat kebangsaan (*hubbul wathan*) tanpa meninggalkan esensi doktrinal agama. Selain itu, Kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini memperkuat dimensi multikultural melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), khususnya pada tema "Bhinneka Tunggal Ika", yang memberikan ruang fleksibilitas bagi sekolah untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pembelajaran.

Sebagai sebuah rancangan pendidikan yang sistematis, kurikulum PAI berbasis multikultural mencakup empat komponen utama yang saling berinteraksi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Dalam paradigma multikultural, setiap komponen ini direkonstruksi untuk mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang inklusif dan demokratis.

Integrasi nilai multikultural dalam PAI dibangun di atas fondasi teologis yang kokoh, di mana prinsip-prinsip Islam dipandang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Beberapa nilai inti yang menjadi pilar dalam diskursus ini mencakup *tasamuh* (toleransi), *musawah* (kesetaraan), *tawassuth* (moderasi), dan *'adl* (keadilan).

1) Konsep Tasamuh (Toleransi)

Tasamuh berasal dari akar kata *samaha* yang berarti tenggang rasa atau kemurahan hati. Secara istilah, *tasamuh* adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan yang mengedepankan rasa saling menghargai dalam batas-batas yang digariskan agama Islam. Menurut Syaikh Yusuf Qardhawi, dorongan utama bagi seorang Muslim untuk bersikap toleran adalah keyakinan akan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, serta kesadaran bahwa perbedaan di dunia merupakan kehendak Allah atau *sunnatullah*. Dalam praktiknya, toleransi dalam Islam tidak berarti mencampurkan keimanan atau ritual, melainkan memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan. Hal ini tercermin dalam larangan Allah bagi umat-Nya untuk tidak menghina sesembahan agama lain guna menghindari konflik yang lebih besar.

2) Konsep Musawah (Kesetaraan)

Musawah merujuk pada prinsip kesamaan dan ekualitas martabat manusia. Secara istilah, *musawah* adalah sikap untuk memandang setiap manusia sebagai setara baik dari segi hakikat maupun hak-hak dasarnya. Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki asal-usul yang sama, sehingga tidak ada satu kelompok pun yang

lebih tinggi berdasarkan ras, etnis, atau status sosial. Prinsip ini berimplikasi pada persamaan di depan hukum, persamaan hak dalam mendapatkan jabatan publik, serta kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama. Dalam dunia pendidikan, *musawah* menjadi landasan untuk meniadakan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama bagi setiap siswa untuk mengembangkan potensinya.

3) Konsep *Tawassuth* dan *Wasathiyyah* (Moderasi)

Tawassuth adalah sikap berada di tengah-tengah, tidak condong pada ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Nilai ini sangat krusial dalam menghadapi perbedaan pendapat fungsional dalam masyarakat. Dalam Kurikulum Merdeka, nilai ini diterjemahkan melalui kompetensi peserta didik untuk bernalar kritis dalam menganalisis perbedaan pendapat sehingga berperilaku moderat atau *wasathiyyah*. Sikap moderat mencakup tiga aspek utama: akidah (menghindari paham jabr dan ikhtiar mutlak), akhlak (keseimbangan antara berbagai karakter), dan syariat (kemudahan yang tidak melanggar prinsip).

B. Integrasi Nilai Multikultural dalam Capaian Pembelajaran PAI

Indonesia merupakan laboratorium sosial terbesar di dunia yang menyatukan ribuan entitas budaya, bahasa, dan keyakinan dalam satu bingkai kenegaraan. Realitas sosiologis ini menuntut sistem pendidikan yang tidak hanya mampu mentransfer pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai perekat sosial. Dalam konteks ini, istilah multikulturalisme berakar dari konsep kebudayaan yang dipahami sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, di mana kebudayaan universal masyarakat mirip dengan sebuah mosaik yang terdiri dari berbagai kebudayaan kelompok kecil yang bersatu membentuk masyarakat yang lebih besar. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi strategis untuk menjadi garda terdepan dalam merawat

kebinekaan tersebut melalui internalisasi nilai-nilai inklusif dan moderat.

Secara filosofis, multikulturalisme dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar fenomena sosiologis, melainkan fitrah kemanusiaan yang diakui secara teologis. Islam mengakui adanya perbedaan budaya, etnis, agama, dan bahasa sebagai kekayaan sosial yang perlu dijaga. Pendidikan multikultural muncul sebagai respons terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas di masa lalu, yang kini bertransformasi menjadi penghormatan terhadap identitas unik setiap individu dalam kerangka keadilan sosial. Integrasi nilai multikultural dalam PAI bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman, mencegah konflik sosial, dan membentuk karakter peserta didik yang toleran di tengah kompleksitas masyarakat global.

Urgensi integrasi ini semakin menguat seiring dengan pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia menuju Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberikan otonomi yang lebih besar bagi satuan pendidikan untuk menyusun pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial budaya mereka. PAI tidak lagi dipandang sebagai mata pelajaran yang dogmatis-eksklusif, melainkan sebagai media untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman dasar agama Islam yang berorientasi pada kemanusiaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Struktur Capaian Pembelajaran PAI dalam Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka mengorganisasi kompetensi melalui Capaian Pembelajaran (CP) yang disusun berdasarkan fase-fase perkembangan peserta didik.⁷ PAI dan Budi Pekerti diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman dasar agama yang meliputi kecenderungan kepada kebaikan (*al-hanifiyyah*), akhlak mulia (*makarim al-akhhlak*), sikap toleransi (*al-samhah*), dan kasih sayang untuk alam semesta (*rahmat li al-alamin*).

Muatan materi PAI terbagi ke dalam lima elemen utama yang masing-masing mengintegrasikan nilai multikultural secara inheren:

- a) Al-Qur'an dan Hadis: Fokus pada pemahaman ayat-ayat tentang keragaman dan moderasi beragama sebagai dasar pijakan hidup dalam masyarakat majemuk.
- b) Akidah: Menanamkan keyakinan bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku agar saling mengenal (*ta'aruf*), sehingga keimanan harus membuahkan sikap inklusif.
- c) Akhlak: Meliputi akhlak kepada Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan alam. Elemen ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan sebagai manifestasi dari ketaatan kepada Tuhan.
- d) Fikih: Mengajarkan ketentuan ibadah dan muamalah yang menghargai hak-hak orang lain, termasuk dalam konteks interaksi sosial dengan penganut agama berbeda.
- e) Sejarah Peradaban Islam (SPI): Menyajikan narasi sejarah tentang kepemimpinan yang adil dan peran tokoh-tokoh Islam dalam membangun persatuan bangsa, memberikan inspirasi bagi peserta didik untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Capaian Pembelajaran ini tidak hanya mengejar penguasaan kognitif, tetapi juga penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila (Musdalipah: 2023). Dimensi "Berkebinekaan Global" menjadi payung bagi integrasi nilai multikultural, di mana pelajar Indonesia diharapkan mampu mempertahankan budaya luhur namun tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain.

2. Mekanisme Integrasi Nilai Multikultural pada Setiap Elemen Pembelajaran

Integrasi nilai multikultural dalam PAI dilakukan secara sistemik melalui penjabaran elemen-elemen CP. Proses ini memastikan bahwa setiap aspek ajaran Islam dipahami dalam konteks keberagaman Indonesia.

a. Elemen Al-Qur'an dan Hadis

Pada elemen ini, peserta didik diajak untuk menggali teks-teks suci yang menegaskan kemuliaan manusia tanpa memandang latar belakang identitas. Ayat seperti Surat Al-Hujurat : 13 menjadi rujukan utama yang menjelaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa adalah instrumen untuk saling mengenal, bukan untuk saling membenci (Denti Amaliya 2025). Melalui pemahaman ini, PAI membangun kesadaran bahwa keragaman adalah desain ilahi yang harus disyukuri. Integrasi ditekankan pada analisis kritis terhadap ayat-ayat moderasi beragama untuk membentengi peserta didik dari paham radikalisme.

b. Elemen Akidah

Dalam perspektif multikultural, akidah tidak dipahami sebagai sekat yang memisahkan "kita" dan "mereka", melainkan sebagai sumber motivasi untuk berbuat baik kepada sesama. Peserta didik memahami asmaulhusna dan rukun iman sebagai landasan untuk mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah. Pemahaman cabang-cabang iman (*syu'ab al-iman*) mencakup aspek sosial seperti menjaga lisan dari menghina keyakinan lain dan menunjukkan integritas dalam pergaulan lintas iman.

c. Elemen Akhlak

Elemen akhlak merupakan inti dari implementasi nilai multikultural. Di sini, peserta didik dilatih untuk mempraktikkan *tasamuh* dan *musawah* dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terhadap sesama manusia mencakup sikap ramah kepada tetangga tanpa membedakan, saling tolong-menolong saat hari raya, dan menghargai kedudukan serta profesi orang lain. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembentukan karakter yang memiliki empati tinggi terhadap penderitaan orang lain, terlepas dari perbedaan agama atau etnis.

d. Elemen Fikih

Fikih multikultural mengajarkan bahwa syariat Islam menjunjung tinggi keadilan sosial. Materi muamalah memberikan kerangka kerja tentang bagaimana berinteraksi

secara ekonomi dan sosial dengan non-muslim dengan cara yang adil dan tidak merugikan. Prinsip *musawah* diterapkan dalam pemahaman bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Selain itu, fikih juga mengajarkan pentingnya menjaga kerukunan melalui ketentuan-ketentuan ibadah yang tidak mengganggu ketertiban umum.

e. Elemen Sejarah Peradaban Islam

Sejarah Peradaban Islam berfungsi untuk memberikan teladan nyata. Kisah Rasulullah SAW yang mengangkat mantan budak seperti Usamah bin Zaid menjadi panglima perang adalah bukti nyata penerapan *musawah* di awal Islam. Di Indonesia, sejarah masuknya Islam yang damai melalui akulturasi budaya menunjukkan bahwa Islam selalu menghargai kearifan lokal. Pembelajaran SPI diarahkan agar peserta didik memahami peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan, sehingga tumbuh rasa cinta tanah air yang kuat sebagai bagian dari iman.

Integrasi nilai multikultural dalam Capaian Pembelajaran PAI pada Kurikulum Merdeka merupakan manifestasi dari transformasi pendidikan Islam yang lebih humanis dan moderat. Nilai-nilai seperti *tasamuh*, *musawah*, dan *tawassuth* yang terjalin dalam elemen-elemen Al-Qur'an Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan SPI, memberikan kerangka kerja komprehensif untuk membangun karakter peserta didik yang relevan dengan kebutuhan zaman.

f. Pengembangan Materi Ajar PAI yang Inklusif dan Kontekstual

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia saat ini berada pada titik krusial transformasi paradigmatis yang menuntut reorientasi mendalam terhadap kurikulum, metodologi, dan materi ajar. Pergeseran ini bukan sekadar respons terhadap perubahan kebijakan administratif, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, mulai dari revolusi industri 4.0, krisis lingkungan global, hingga

dinamika masyarakat multikultural yang rentan terhadap polarisasi ideologis. Pengembangan materi ajar PAI yang inklusif dan kontekstual menjadi kata kunci dalam memastikan bahwa ajaran agama Islam tetap relevan sebagai panduan hidup yang memberikan rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*) tanpa kehilangan esensi transendentalnya. Analisis ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana integrasi nilai-nilai moderasi beragama, kearifan lokal, dan kesadaran ekologis dapat diwujudkan melalui prosedur desain instruksional yang sistematis dalam kerangka Kurikulum Merdeka.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung PAI yang lebih inklusif dan moderat. Salah satu kebijakan yang paling transformatif di lingkungan madrasah adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab, serta KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Kebijakan ini merupakan langkah adaptasi terhadap tuntutan abad ke-21 yang mengharuskan pendidikan agama tidak hanya berhenti pada tataran kognitif, tetapi menjadi jalan hidup (*way of life*) bagi peserta didik.

KMA 183 tahun 2019 mempertegas bahwa arah penguatan PAI di madrasah harus mampu menyiapkan peserta didik sebagai warga dunia (*global citizenship*) yang memiliki akar kuat pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Perubahan yang dibawa oleh KMA ini meliputi penyempurnaan substansi materi pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) untuk mengakomodasi isu-isu modern seperti etika bersosial media, antikorupsi, dan moderasi beragama. Menariknya, dokumen KMA 183 mencapai 466 halaman, meningkat signifikan dari kurikulum sebelumnya yang hanya 321 halaman, menunjukkan kedalaman analisis dan rincian kompetensi yang diharapkan.

Pendidikan inklusif dalam PAI memiliki dua pengertian utama yang saling berkaitan: inklusi sosial terhadap keragaman identitas dan inklusi pedagogis terhadap siswa dengan hambatan belajar atau berkebutuhan khusus. PAI inklusif bertujuan menanamkan sikap menghargai keberagaman budaya, etnis, dan agama sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri, bukan sebagai pemicu konflik. Dalam konteks sekolah multikultural, guru PAI dituntut untuk memiliki kompetensi multikultural agar materi yang disampaikan tidak menyinggung perasaan siswa non-Muslim yang mungkin berada di kelas yang sama atau berada dalam lingkungan sekolah yang sama.

Implementasi PAI untuk siswa berkebutuhan khusus menuntut adanya modifikasi kurikulum dan adaptasi materi. Guru PAI harus berkolaborasi dengan guru pendamping khusus (*shadow teacher*) untuk menyusun strategi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan kemampuan fisik siswa. Penggunaan metode yang bervariasi, media audio-visual, serta pelibatan orang tua dalam proses pendampingan menjadi faktor kunci keberhasilan PAI inklusif. Prinsip *Universal Design for Learning* (UDL) sangat relevan di sini, di mana penilaian dilakukan secara fleksibel dan instruksi diberikan dengan dukungan *scaffolding* sesuai kebutuhan individu siswa.

Keberagaman agama di kelas sering kali menimbulkan tantangan berupa kekhawatiran orang tua non-Muslim bahwa PAI akan memengaruhi keyakinan anak mereka. Untuk mengatasi hal ini, pengembangan materi PAI harus ditekankan pada nilai-nilai universal seperti persaudaraan, kasih sayang, dan integritas moral yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, PAI di sekolah dasar multikultural tidak hanya berfungsi sebagai pengajaran doktrin bagi siswa Muslim, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter inklusif bagi seluruh komunitas sekolah.

Pembelajaran Kontekstual atau *Contextual Teaching and Learning* (CTL) adalah pendekatan yang

menghubungkan materi ajar dengan situasi dunia nyata siswa. Dalam PAI, CTL bertujuan agar ajaran agama tidak dianggap sebagai sekumpulan teks mati, melainkan sebagai pedoman yang hidup dan relevan dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. Dengan menghubungkan ajaran Islam dengan konteks personal, sosial, dan kultural, siswa akan lebih termotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam tindakan nyata.

Contoh konkret aplikasi CTL dalam PAI adalah pada materi shalat. Alih-alih hanya menghafal bacaan dan gerakan, guru dapat mengaitkan shalat dengan konsep manajemen waktu (sholat tepat waktu), kebersihan diri (wudhu), dan ketenangan jiwa dalam menghadapi tekanan hidup. Begitu pula dalam materi zakat, siswa dapat dilibatkan dalam simulasi pengelolaan dana sosial di sekolah untuk menumbuhkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung.

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat yang sering kali selaras dengan prinsip-prinsip universal Islam. Integrasi kearifan lokal ke dalam PAI bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang "membumi" dan memperkuat identitas budaya peserta didik tanpa mengabaikan nilai religius. Kearifan lokal dapat dijadikan media untuk menjelaskan konsep agama yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah diterima oleh siswa.

Di berbagai wilayah Indonesia, integrasi ini telah dipraktikkan dengan beragam cara. Di Minangkabau, nilai-nilai musyawarah dan gotong royong dijadikan sebagai penguatan materi akhlak dan muamalah. Di Bengkulu, tradisi adat seperti *Besuroh* atau *Nyelabar* digunakan untuk menjelaskan nilai hormat kepada orang tua dan tetangga dalam perspektif Islam. Tradisi keagamaan daerah seperti Yasinan, Doa Tolak Bala, atau perayaan Maulid Nabi yang spesifik di suatu daerah dapat dijadikan bahan diskusi kelas untuk menjelaskan makna spiritual di balik budaya tersebut.

Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur menawarkan contoh unik tentang kerukunan dalam keberagaman yang didukung oleh kearifan lokal. Meskipun mayoritas penduduknya non-Muslim, masyarakat Kupang sangat menghargai perbedaan melalui filosofi *Muki Nena* (rasa memiliki) dan *Lil Au Zero Dael Banan*. Nilai-nilai lokal seperti *Nusi* (gotong royong) dan *Butukila* (tali persaudaraan) terbukti mampu menjadi benteng dari konflik antaragama. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam materi PAI di wilayah tersebut sangat efektif untuk membentuk karakter siswa yang inklusif dan sadar akan pentingnya menjaga harmoni sosial sebagai bagian dari pengamalan iman.

Pengembangan materi PAI yang responsif lingkungan dapat dilakukan melalui reinterpretasi elemen mata pelajaran. Dalam Fikih, dapat diperkenalkan konsep *Fiqh al-Bi'ah* (Fikih Lingkungan) yang mengatur tata cara bersuci dengan hemat air atau aturan mengenai kepemilikan lahan dan perlindungan satwa. Dalam elemen Al-Qur'an Hadis, penekanan diberikan pada ayat-ayat yang memerintahkan pelestarian bumi dan hadis tentang menanam pohon sebagai sedekah jariyah. Kegiatan aksi nyata seperti program "*Green Qur'anic School*", pengelolaan sampah di sekolah, dan pembuatan taman sekolah dapat menjadi praktik langsung yang mengubah pengetahuan kognitif menjadi kesadaran emosional dan keterlibatan spiritual.

Pengembangan materi ajar PAI yang inklusif dan kontekstual memerlukan pendekatan desain instruksional yang terstruktur agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Model *Dick and Carey* sering dijadikan rujukan karena langkah-langkahnya yang prosedural dan sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi sumatif. Model ini memastikan bahwa setiap komponen pembelajaran, mulai dari materi, strategi, hingga alat penilaian, saling terkait dan mendukung pencapaian kompetensi.

Langkah-langkah pengembangan materi ajar PAI menggunakan model sistematis meliputi:

- a) Identifikasi Tujuan Pembelajaran: Menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran, misalnya memahami konsep zakat dalam konteks keadilan sosial.
- b) Analisis Instruksional: Memecah tujuan umum menjadi keterampilan-keterampilan bagian yang lebih kecil dan menentukan urutan logis penyampaian materi.
- c) Analisis Peserta Didik dan Konteks: Mengidentifikasi karakteristik siswa (kognitif, minat, latar belakang budaya) serta lingkungan tempat belajar untuk memastikan materi yang dikembangkan relevan dan dapat diakses oleh semua.
- d) Merumuskan Tujuan Pembelajaran Khusus: Menyusun indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diamati.
- e) Pengembangan Instrumen Penilaian: Menyiapkan alat ukur yang sesuai dengan tujuan khusus, baik berupa tes tertulis maupun penilaian kinerja/praktik.
- f) Pengembangan Strategi Pembelajaran: Memilih metode (seperti PBL atau diskusi kelompok) dan media yang mendukung pencapaian tujuan.
- g) Pengembangan dan Pemilihan Bahan Ajar: Menyusun modul, buku teks, atau media digital yang mengintegrasikan nilai inklusivitas dan konteks lokal.
- h) Evaluasi Formatif: Melakukan uji coba terbatas untuk mendapatkan masukan guna merevisi dan menyempurnakan materi ajar.
- i) Revisi Pembelajaran: Memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama tahap evaluasi formatif.
- j) Evaluasi Sumatif: Melakukan penilaian akhir untuk mengukur efektivitas materi ajar dalam skala yang lebih luas setelah implementasi penuh.

Pengembangan materi ajar PAI yang inklusif dan kontekstual merupakan keniscayaan untuk memastikan

bahwa pendidikan agama tetap berperan sentral dalam membentuk karakter bangsa di era globalisasi. PAI tidak boleh lagi dilihat sebagai subjek yang terisolasi dari realitas dunia nyata, melainkan harus menjadi katalis bagi perubahan sosial, harmoni antaragama, dan pelestarian lingkungan. Melalui integrasi nilai moderasi beragama (*wasathiyah*), pemanfaatan kearifan lokal, serta kesadaran ekologis, PAI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya saleh secara individual tetapi juga saleh secara sosial dan ekologis.

Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sumber belajar multimedia yang variatif, serta kolaborasi yang erat antara sekolah, keluarga, dan tokoh masyarakat. Kurikulum Merdeka dan kebijakan KMA 183/184 telah menyediakan payung hukum yang memadai, namun keberhasilannya sangat bergantung pada inovasi dan kreativitas pendidik di tingkat kelas. Dengan komitmen yang kuat, PAI akan mampu menjawab tantangan zaman dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab, toleran, dan berkelanjutan sesuai dengan visi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

g. Analisis Buku Teks PAI dalam Perspektif Multikulturalisme

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia memegang peranan yang sangat strategis dalam membentuk fondasi moral dan etika individu di tengah realitas kemajemukan bangsa. Sebagai instrumen utama dalam proses transmisi nilai, buku teks PAI bukan sekadar materi ajar teknis, melainkan representasi dari visi negara dalam mengelola keragaman etnis, budaya, dan agama. Di tengah dinamika globalisasi dan ancaman polarisasi sosial yang ditandai dengan munculnya paham intoleransi serta radikalisme, evaluasi terhadap konten buku teks PAI dalam perspektif multikulturalisme menjadi sebuah urgensi akademis dan sosial. Analisis ini mengevaluasi sejauh mana

buku teks tersebut berhasil mengintegrasikan nilai-nilai universal seperti keragaman (*diversity*), toleransi (*tasamuh*), kesetaraan (*equality*), dan keadilan sosial (*al-adalah*) guna mewujudkan harmoni dalam pluralitas bangsa Indonesia.

Landasan teologis utama yang sering diintegrasikan dalam buku teks PAI adalah Surah Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa penciptaan manusia dalam keberagaman suku dan bangsa bertujuan agar mereka saling mengenal (*li-ta'arafu*). Ayat ini menjadi titik tolak bahwa keberagaman adalah takdir Ilahi atau *sunnatullah* yang harus dihargai sebagai anugerah, bukan sebagai sumber perpecahan. Selain itu, konsep *ummatan wasathan* yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 memberikan kerangka kerja bagi pembentukan karakter peserta didik yang adil, seimbang, dan mampu menjadi saksi atas kebenaran di tengah masyarakat yang heterogen.

Implementasi prinsip-prinsip ini dalam buku teks bertujuan untuk membentuk "muslim nasionalis" yang memiliki kedalaman spiritual sekaligus komitmen kebangsaan yang kuat. Pendidikan multikultural dalam PAI berupaya mentransformasikan wacana akademik menjadi sikap, nilai, dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga institusi pendidikan dapat berperan strategis dalam mengurangi segregasi sosial yang berbasis agama atau etnis.

Perubahan kurikulum di Indonesia secara langsung berdampak pada struktur dan muatan multikulturalisme dalam buku teks PAI. Kurikulum 2013 (K13) menekankan pada keterpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Namun, evaluasi kritis menunjukkan bahwa dalam K13, muatan moderasi beragama seringkali masih bersifat global dan kurang spesifik, sehingga sulit bagi siswa untuk menginternalisasi contoh perilaku moderat secara mendalam.

Kurikulum Merdeka hadir dengan pendekatan yang lebih fleksibel, terbuka, dan holistik. Perbedaan mendasar

terletak pada pergeseran dari fokus materi (*content-based*) menuju fokus kompetensi (*competency-based*). Inovasi paling signifikan dalam Kurikulum Merdeka adalah introduksi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang menempatkan dimensi berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis sebagai indikator utama keberhasilan pendidikan.

1. Analisis Konten Berdasarkan Elemen Pembelajaran PAI

Buku teks PAI dalam Kurikulum Merdeka disusun berdasarkan lima elemen kunci yang masing-masing mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara yang berbeda.

a. Al-Qur'an dan Hadis

Materi Al-Qur'an dan Hadis diarahkan untuk membangun kesadaran kritis bahwa perbedaan adalah ketetapan Tuhan yang harus dikelola melalui dialog. Selain ayat-ayat tentang toleransi seperti Surah Al-Kafirun dan Surah Yunus: 40-41, buku teks juga memasukkan hadis-hadis tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia dan larangan menyakiti non-muslim yang hidup berdamaian dengan umat Islam (*mu'ahad*). Penekanan pada tafsir yang moderat bertujuan agar siswa tidak mudah mengkafirkan atau membid'ahkan orang lain hanya karena perbedaan pemahaman keagamaan.

b. Akidah dan Akhlak

Elemen akidah tidak lagi hanya membahas masalah ketauhidan secara abstrak, tetapi menghubungkannya dengan tanggung jawab sosial melalui konsep *Syuhrah Iman* (cabang-cabang iman). Di sisi lain, elemen akhlak berfokus pada pembentukan karakter yang memiliki empati tinggi, etos kerja, dan etika berkomunikasi di media sosial guna menghindari konflik. Nilai-nilai seperti kejujuran (*amanah*), kedermawanan, dan kesantunan diajarkan sebagai bagian integral dari identitas muslim di ruang publik.

c. Fikih

Dalam perspektif multikultural, materi fikih diorientasikan pada kemaslahatan umat melalui konsep *Al-*

kulliyyāt al-khamsah (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Materi ekonomi syariah, seperti asuransi, perbankan, dan koperasi syariah, dipresentasikan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan ekonomi dan pemberdayaan sosial. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dijelaskan bukan hanya sebagai ritual individu, melainkan sebagai instrumen strategis untuk distribusi kekayaan yang adil guna mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat majemuk.

d. Sejarah Peradaban Islam (SKI)

Sejarah berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi siswa dalam mempraktikkan toleransi. Narasi mengenai Piagam Madinah ditekankan sebagai tonggak sejarah masyarakat multikultural pertama yang menjamin hak-hak minoritas dan menerapkan prinsip supremasi hukum. Selain itu, sejarah penyebaran Islam di Indonesia oleh Wali Songo disajikan sebagai model dakwah yang akomodatif terhadap budaya lokal, menunjukkan bahwa Islam dapat bersinergi dengan tradisi nusantara tanpa menghilangkan jati diri masing-masing.

2. Evaluasi Kesenjangan Gender dan Keadilan Sosial

Meskipun terdapat upaya besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural, analisis kritis terhadap buku teks PAI mengungkapkan adanya tantangan yang signifikan dalam hal kesetaraan gender dan keadilan bagi kelompok marginal.

a. Analisis Representasi dan Bias Gender

Penelitian menunjukkan bahwa buku teks PAI masih sering mereproduksi narasi patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama di ranah publik. Berdasarkan analisis visual terhadap buku teks kelas X dan XII, ditemukan dominasi gambar tokoh laki-laki dibandingkan perempuan. Dalam satu kasus, gambar laki-laki muncul sebanyak 31 kali sementara perempuan hanya 5 kali. Selain itu, peran perempuan sering kali digambarkan terbatas pada ranah domestik atau sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan.

Tabel 3: Temuan Bias Gender dalam Materi Fikih Tertentu

Topik Materi	Narasi yang Mengandung Bias	Perspektif Multikultural/Kesetaraan
Syarat Haji	Kewajiban didampingi mahram bagi wanita.	Perlunya menyertakan pandangan lain yang memperbolehkan wanita bepergian jika kondisi aman.
Kepemimpinan	Laki-laki dianggap pemimpin keluarga secara kodrati karena kelebihan fisik/mental.	Kepemimpinan didasarkan pada kompetensi dan kesepakatan bersama, bukan jenis kelamin.
Wali Nikah	Syarat wali harus laki-laki tanpa diskusi perkembangan hukum.	Eksplorasi pemikiran hukum Islam kontemporer yang lebih inklusif bagi perempuan.
Aurat	Penekanan berlebihan pada pakaian wanita sebagai standar moralitas.	Fokus pada substansi kesantunan dan kehormatan diri bagi kedua gender.

Namun, terdapat perkembangan positif dalam buku teks Kurikulum Merdeka edisi terbaru. Materi "Sabar dalam Menghadapi Musibah" mulai menekankan bahwa semua individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum Islam tanpa memandang jenis kelamin. Ilustrasi dalam materi "Indahnya Kehidupan Bermakna" juga mulai menunjukkan partisipasi sosial laki-laki dan perempuan secara setara di lingkungan masjid.

3. Keadilan Sosial dan Perlindungan Kelompok Rentan

Keadilan sosial dalam PAI ditekankan melalui prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan dan distribusi hak yang adil. Keadilan tidak dimaknai sebagai kesamaan jumlah secara subjektif, melainkan kesamaan hak setiap orang yang harus dilindungi. Hal ini relevan dengan upaya

meminimalisir perilaku diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis atau agama di lingkungan sekolah. Kurikulum PAI diharapkan menjadi ruang yang mendidik peserta didik menjadi warga negara yang religius sekaligus inklusif. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan multikultural adalah bagaimana buku teks PAI mempresentasikan penganut agama lain. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, interaksi lintas iman adalah sebuah keniscayaan sehari-hari.

Buku teks PAI umumnya telah memenuhi kelayakan isi secara administratif terkait toleransi, namun representasi visual tokoh agama lain dan budaya lokal yang spesifik masih dianggap terbatas. Toleransi sering kali dipahami secara pasif, yakni tidak mengganggu peribadatan orang lain, namun kurang memberikan panduan tentang dialog proaktif atau kerjasama kemanusiaan lintas iman. Beberapa buku teks mulai memasukkan latihan atau contoh dialog antarumat beragama, seperti penggunaan studi kasus isu kerukunan di Indonesia untuk melatih empati sosial. Siswa diajak untuk memahami bahwa moderasi beragama adalah kunci untuk membuka diri satu sama lain dan menjaga harmoni nasional. Penguatan nilai *Bhinneka Tunggal Ika* diintegrasikan melalui penegasan bahwa seseorang tidak boleh melihat kepentingannya sendiri atau golongannya lebih utama daripada kepentingan bersama.

4. Strategi Penguatan Multikulturalisme di Masa Depan

Guna meningkatkan efektivitas buku teks PAI dalam mengintegrasikan nilai multikulturalisme, beberapa strategi penguatan perlu dilakukan secara sistematis. Buku teks perlu menyajikan narasi yang lebih dekat dengan kehidupan nyata siswa. Misalnya, dengan memasukkan lebih banyak contoh kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai alat penyelesaian konflik di tengah masyarakat. Integrasi kearifan lokal terbukti dapat memperkuat nilai kebajikan sosial pada anak. Selain itu, bahasa yang digunakan harus bergeser dari bahasa yang normatif-teksual menuju bahasa yang komunikatif dan reflektif.

Di era digital, penggunaan konten video, aplikasi interaktif, dan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk mendiseminasikan nilai moderasi beragama. Sekolah dasar dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan tarian, musik, dan bahasa daerah sebagai bagian dari pendidikan kebhinekaan yang menyenangkan.

Revisi terhadap ilustrasi dan teks yang mengandung bias gender harus dilakukan secara berkala. Materi ajar harus mampu merepresentasikan kesetaraan, keadilan, dan kebebasan bagi semua gender baik dalam aspek pekerjaan, olahraga, maupun peran kepemimpinan di sekolah. Guru harus diperlakukan sebagai agen perubahan yang memberikan perhatian setara terhadap kebutuhan murid laki-laki dan perempuan.

Untuk masa depan, diperlukan komitmen institusional yang lebih kuat dalam mereformasi kurikulum agar lebih responsif gender dan inklusif secara sosial. PAI harus mampu mentransformasikan peserta didik menjadi individu yang tidak hanya kokoh secara spiritual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, rasa hormat terhadap perbedaan, serta semangat persatuan yang tinggi. Dengan menjadikan pendidikan multikultural sebagai strategi preventif terhadap konflik sosial, PAI akan terus berperan sebagai pilar utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah arus globalisasi yang terus berubah. Sebagaimana pesan universal dalam Al-Qur'an, keberagaman adalah kehendak Ilahi yang harus dikelola demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bersama.

h. Tantangan dan Strategi Implementasi Kurikulum PAI Multikultural

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia saat ini berada pada titik nadir transformasi yang menuntut redefinisi peran dan fungsinya dalam masyarakat yang semakin plural. Sebagai instrumen strategis dalam pembentukan karakter, PAI tidak lagi cukup hanya mengajarkan aspek teologis-ritual semata, melainkan harus mampu menjadi katalisator bagi terciptanya harmoni sosial

melalui paradigma multicultural. Pendidikan multikultural dalam konteks PAI didefinisikan sebagai sebuah strategi pembelajaran yang memanfaatkan keragaman latar belakang budaya, etnis, dan agama peserta didik untuk memperkuat konsep kesetaraan, demokrasi, dan keadilan sosial. Urgensi penerapan kurikulum ini di Indonesia bersifat eksistensial, mengingat kemajemukan bangsa yang mencakup ratusan etnis dan bahasa menyimpan potensi konflik horizontal jika tidak dikelola melalui pendidikan yang inklusif. Secara teoretis, pengembangan kurikulum PAI multikultural di Indonesia bersandar pada prinsip *hablum min al-nas* yang menekankan pentingnya memelihara hubungan baik sesama manusia tanpa memandang perbedaan primordial. Landasan ini diperkuat oleh nilai-nilai universal Islam seperti *al-musawah* (kesetaraan), *al-'adl* (keadilan), dan *al-musyawaharah* (demokrasi), yang secara historis telah dipraktikkan oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah untuk mengelola keragaman masyarakat Madinah.

Meskipun urgensi pendidikan multikultural telah diakui secara luas, implementasinya dalam kurikulum PAI menghadapi berbagai hambatan struktural, psikologis, dan pedagogis yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya muncul dari dalam sistem pendidikan itu sendiri, tetapi juga merupakan refleksi dari dinamika sosial politik yang lebih luas di Indonesia.

1. Tantangan Implementasi Kurikulum PAI Multikultural

a. Keterbatasan Kemampuan dan Kesadaran Guru:

Guru merupakan variabel paling krusial dalam keberhasilan implementasi kurikulum, namun dalam konteks PAI multikultural, guru sering kali menjadi titik lemah utama. Keterbatasan kemampuan guru tidak hanya merujuk pada aspek teknis-pedagogis, tetapi juga pada kedalaman kesadaran multikultural yang mereka miliki. Banyak guru PAI masih terjebak dalam paradigma pendidikan konvensional yang bersifat monolitik dan doktriner. Mereka cenderung memahami agama sebagai entitas yang kaku dan eksklusif, sehingga mengalami

kesulitan saat harus mengintegrasikan nilai-nilai inklusivitas ke dalam ruang kelas yang heterogen. Fenomena ini sering kali berakar dari latar belakang pendidikan pra-jabatan yang tidak memadai dalam membekali calon pendidik dengan kompetensi multikultural yang esensial.

Ketidaksiapan ini mewujudkan dalam ketidakmampuan guru untuk memfasilitasi dialog antarbudaya yang konstruktif. Alih-alih menjadi agen moderasi, beberapa guru justru secara tidak sadar memperkuat stereotip dan prasangka melalui bahasa yang digunakan atau cara mereka menyajikan materi. Keterbatasan kesadaran juga terlihat pada resistensi psikologis terhadap perubahan; adanya kekhawatiran bahwa mengajarkan nilai-nilai multikultural akan melemahkan akidah siswa atau mengarah pada sinkretisme agama. Selain itu, terdapat masalah kepribadian guru yang kurang terbuka terhadap perbedaan dan kenyamanan dalam kultur sekolah yang homogen, yang pada akhirnya menghambat terciptanya lingkungan belajar yang inklusif. Tanpa kompetensi sosial dan profesional yang progresif, guru akan kesulitan merancang strategi pembelajaran yang mampu menyentuh ranah kognitif, afektif, dan sosial peserta didik secara seimbang.

b. Keterbatasan Bahan Ajar (Dominasi Narasi Normatif dan Bias Representasi)

Bahan ajar, khususnya buku teks, berfungsi sebagai panduan utama dalam proses pembelajaran, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak buku teks PAI belum mencerminkan semangat multikulturalisme secara mendalam. Analisis terhadap buku teks PAI tingkat dasar menunjukkan adanya kecenderungan narasi yang terlalu normatif, kering, dan kurang kontekstual dengan pengalaman hidup sehari-hari siswa yang beragam. Sering kali, materi yang disajikan lebih mengedepankan aspek administratif-teologis daripada penguatan nilai-nilai karakter yang inklusif dan humanis.

Salah satu masalah utama adalah bias representasi, baik secara visual maupun tekstual. Ilustrasi dalam buku

teks sering kali gagal menggambarkan keragaman sosial budaya Indonesia yang sebenarnya, di mana tokoh-tokoh agama atau representasi budaya tertentu masih sangat terbatas dan tidak proporsional. Hal ini dapat menyebabkan siswa dari kelompok minoritas merasa tidak terwakili atau bahkan merasa teralienasi dari narasi besar pendidikan agama nasional. Selain itu, materi sejarah kebudayaan Islam (SKI) terkadang masih berfokus pada kejayaan masa lalu dalam konteks penaklukan, daripada mengeksplorasi sejarah dialog antarbudaya dan kontribusi intelektual Islam dalam membangun peradaban dunia yang inklusif.

Keterbatasan bahan ajar ini juga mencakup aspek metodologis. Banyak buku teks yang dirancang tanpa variasi metode pembelajaran yang menantang kemampuan berpikir kritis siswa. Materi yang terlalu berat dan bahasa yang sulit dipahami bagi siswa dengan latar belakang bahasa atau budaya yang berbeda menjadi hambatan pedagogis yang signifikan. Di daerah-daerah terpencil, tantangan ini semakin diperburuk oleh minimnya akses terhadap sumber belajar digital dan infrastruktur teknologi, sehingga guru terpaksa mengandalkan materi seadanya yang mungkin tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Pengembangan bahan ajar yang progresif, inklusif secara visual, dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik menjadi syarat mutlak agar PAI mampu memberikan makna yang mendalam bagi pembentukan jati diri bangsa yang majemuk.

c. Kompleksitas Isu Sensitif Labirin Pluralisme dan Radikalisme

Mengintegrasikan isu-isu sensitif ke dalam kurikulum PAI merupakan salah satu tantangan paling berat bagi pendidik. Isu-isu seperti pluralisme agama, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan minoritas sering kali dianggap sebagai "wilayah berbahaya" yang dapat memicu kontroversi ideologis. Ada tarikan kuat antara kewajiban menjaga kemurnian akidah dengan tuntutan untuk bersikap inklusif terhadap kelompok lain. Tanpa

pemahaman yang jernih, pendidikan multikultural sering kali salah kaprah dianggap sebagai upaya menyamakan semua agama, yang kemudian memicu resistensi dari kelompok-kelompok konservatif di masyarakat .

Dalam lingkungan sekolah yang plural, isu sensitif ini bisa mewujud dalam bentuk prasangka sosial, *stereotip*, atau bahkan diskriminasi terselubung yang dialami oleh siswa dari latar belakang yang berbeda. Konflik identitas yang dipicu oleh polarisasi ideologi di tingkat nasional sering kali terbawa ke dalam interaksi di kelas, menciptakan suasana belajar yang tegang dan tidak produktif. Guru PAI sering kali merasa tidak memiliki otoritas atau keterampilan yang cukup untuk menengahi perbedaan pandangan teologis yang tajam di antara siswa, sehingga mereka lebih memilih untuk menghindari topik tersebut daripada menjadikannya sebagai sarana pembelajaran untuk saling menghargai.

Tantangan lain adalah upaya penanggulangan radikalisme melalui pendidikan agama. Di satu sisi, PAI diharapkan menjadi benteng pertahanan terhadap paham ekstrem, namun di sisi lain, kurikulum yang terlalu menekankan pada eksklusivisme doktrinal tanpa memberikan ruang bagi pemikiran kritis dapat secara tidak sengaja menyuburkan benih-benih intoleransi. Mengelola kompleksitas ini memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, di mana nilai-nilai moderasi beragama harus diinternalisasi sebagai ruh utama dalam setiap materi PAI .

d. Tekanan Modernisasi dan Waktu

Modernisasi dan digitalisasi membawa dampak ganda bagi implementasi kurikulum PAI multikultural. Di satu sisi, teknologi menawarkan alat baru untuk pembelajaran yang lebih luas, namun di sisi lain, ia membawa tekanan berupa arus informasi yang tidak terfilter dan paparan konten keagamaan digital yang sering kali bersifat eksklusif dan provokatif. Siswa masa kini lebih banyak menghabiskan waktu di ruang digital daripada di ruang kelas, di mana mereka dapat dengan mudah terpapar pada paham

keagamaan yang keras yang mengancam nilai-nilai moderasi yang diajarkan di sekolah .

Tekanan ini semakin diperparah oleh alokasi waktu kurikulum yang sangat terbatas. Guru PAI sering kali dihadapkan pada dilema antara mengejar ketuntasan materi yang luas dan padat secara administratif dengan kebutuhan untuk melakukan pendalaman nilai-nilai multikultural melalui diskusi dan refleksi. Kurikulum yang terlalu berorientasi pada hasil kognitif jangka pendek menyebabkan proses internalisasi nilai-nilai karakter yang membutuhkan waktu panjang sering kali terabaikan. Fragmentasi nilai juga terjadi karena adanya ketidakselarasan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan realitas sosial yang dialami siswa di luar sekolah, termasuk pengaruh dari keluarga atau lingkungan masyarakat yang mungkin tidak mendukung semangat multikulturalisme.

2. Strategi Implementasi Kurikulum PAI Multikultural

Menghadapi berbagai tantangan di atas, diperlukan strategi yang integratif dan sistemik untuk memastikan kurikulum PAI multikultural dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata pada perilaku peserta didik. Strategi ini harus menyentuh aspek pengembangan sumber daya manusia, metodologi pengajaran, iklim sekolah, hingga interaksi sosial di masyarakat.

a. Pelatihan dan Pengembangan Guru

Transformasi guru merupakan prioritas utama dalam strategi implementasi. Pelatihan guru tidak boleh lagi hanya bersifat formalitas administratif, melainkan harus menysasar pada perubahan paradigma berpikir (*mindset shift*). Pendidik perlu dibekali dengan keterampilan menanamkan nilai-nilai inti seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme ke dalam proses pembelajaran sehari-hari. Pelatihan ini harus mencakup pendalaman metodologi pengajaran yang aktif dan interaktif, seperti simulasi, studi kasus, dan kunjungan lapangan yang memungkinkan guru untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.

Selain itu, penguatan kompetensi multikultural harus dianggap sebagai kebutuhan esensial bagi guru di era global. Guru PAI harus dilatih untuk menjadi agen moderasi beragama yang mampu menerjemahkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan (*'adl*) dalam konteks masyarakat yang majemuk. Pengembangan profesional juga harus mencakup peningkatan literasi digital agar guru mampu mendesain konten pembelajaran yang menarik dan mampu menandingi narasi-narasi ekstrem di ruang siber. Dukungan dari institusi, seperti pemberian kuota pelatihan, penyediaan mentor, dan kolaborasi antar-guru, menjadi kunci agar inovasi kurikulum ini dapat terus berlanjut dan berkembang.

Strategi implementasi yang efektif dalam PAI multikultural adalah penggunaan metode pembelajaran yang dialogis dan interaktif. Metode ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menghargai perbedaan pendapat dan menumbuhkan toleransi melalui partisipasi aktif siswa. Melalui diskusi kelompok lintas budaya, siswa diajak untuk saling berbagi perspektif dan merasakan pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran kolaboratif semacam ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa tentang agama lain, tetapi juga melatih keterampilan sosial dan empati mereka.

Metode dialogis juga melibatkan penggunaan teknologi sebagai jembatan komunikasi. Siswa dapat didorong untuk terlibat dalam proyek digital bersama, seperti membuat kampanye perdamaian atau video dokumentasi tentang keragaman budaya di lingkungan mereka. Dengan cara ini, siswa belajar untuk melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai aset kekayaan budaya yang harus dirawat bersama. Penggunaan metode *role-playing* atau bermain peran juga dapat membantu siswa untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga mereka dapat lebih memahami kesulitan atau perasaan kelompok minoritas dalam menghadapi tantangan

sosial.¹⁶ Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menciptakan ruang aman di kelas, di mana setiap siswa merasa dihargai dan tidak takut untuk berekspresi.

b. Penguatan Lingkungan Sekolah (*Hidden Curriculum*)
Internalisasi Nilai melalui Habitulasi

Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi merupakan strategi yang sangat ampuh untuk menanamkan nilai-nilai multikultural tanpa harus tertulis secara eksplisit dalam rencana pelajaran. Nilai-nilai ini disampaikan melalui pesan-pesan yang dibawa oleh budaya sekolah, interaksi sosial, dan kebijakan institusional. Lingkungan sekolah yang inklusif secara otomatis akan mengajarkan siswa tentang arti pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Misalnya, kebijakan sekolah yang memberikan fasilitas yang adil bagi seluruh kegiatan keagamaan atau perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pelayanan administratif merupakan bentuk nyata dari implementasi ini.

Habitulasi atau pembiasaan menjadi inti dari strategi kurikulum tersembunyi. Kegiatan rutin seperti doa bersama, upacara bendera, dan budaya antre mengajarkan nilai kesetaraan dan kebersamaan secara bawah sadar. Selain itu, perilaku keteladanan dari guru dan staf sekolah merupakan kurikulum hidup yang paling efektif. Guru yang menunjukkan sikap rendah hati (*tawadhu*), disiplin, dan menghargai keberhasilan orang lain tanpa memandang latar belakangnya akan menjadi figur utama bagi siswa untuk meniru perilaku inklusif tersebut. Tata tertib sekolah yang diterapkan secara konsisten dan adil juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan karakter yang kuat untuk membiasakan siswa hidup dalam tatanan sosial yang teratur dan menghargai hak-hak individu lain.

c. Pendekatan Aksi Sosial: Belajar Hidup Berdampingan dalam Praktik Nyata

Strategi terakhir dan yang paling konkret adalah pendekatan aksi sosial. Strategi ini membawa siswa keluar

dari teori menuju praktik nyata di tengah masyarakat. Dengan terlibat dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas lintas agama dan etnis, siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai multikultural secara lebih mendalam. Contoh nyata dari pendekatan ini adalah program kunjungan ke rumah ibadah pemeluk agama lain, yang bertujuan untuk menghancurkan tembok ketidaktahuan dan mengurangi prasangka sosial yang sering kali menjadi akar dari intoleransi.

Selain itu, partisipasi dalam proyek pengabdian masyarakat atau bakti sosial bersama komunitas lintas iman dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang setara. Di lingkungan sekolah, aksi sosial dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang beragam atau proyek bersama antar kelas yang mendorong interaksi yang lebih intens di antara siswa yang berbeda latar belakang. Pemilihan kepemimpinan siswa yang dilakukan secara demokratis dan terbuka bagi siapa saja juga merupakan bentuk latihan aksi sosial yang penting untuk membangun karakter yang adil dan tidak diskriminatif. Melalui pengalaman praktis ini, diharapkan siswa tidak hanya cerdas secara intelektual tentang ajaran agamanya, tetapi juga mampu menjadi agen perdamaian dan rekonsiliasi yang aktif di tengah masyarakat yang pluralis.

Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai inklusivitas harus dimulai dari tingkat kebijakan hingga ke akar rumput di ruang-ruang kelas. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada sinergi antara kurikulum yang adaptif, guru yang progresif, lingkungan sekolah yang mendukung, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kerukunan.

Di masa depan, PAI multikultural diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam membangun "Indonesia Baru" yang menghargai setiap perbedaan sebagai anugerah Tuhan. Kurikulum ini harus terus berevolusi untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi era Society

5.0 di mana batas-batas fisik dan digital semakin kabur. Dengan landasan teologis yang kuat dan strategi implementasi yang tepat, Pendidikan Agama Islam akan mampu mencetak generasi emas yang tidak hanya kokoh imannya, tetapi juga luas wawasannya, dalam, empatinya, dan siap berkontribusi bagi perdamaian dunia di tengah kompleksitas global yang menyelimuti peradaban manusia saat ini.

BAB 8

Strategi, Model, dan Media Pembelajaran PAI Multikultural

A. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran PAI Multikultural

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia saat ini berada pada titik krusial dalam menghadapi arus globalisasi, digitalisasi, dan potensi fragmentasi sosial. Realitas kemajemukan bangsa Indonesia—yang terdiri dari ribuan suku, bahasa, serta beragam agama dan kepercayaan—menuntut sebuah model pendidikan yang tidak hanya berfokus pada dimensi ritual-normatif, tetapi juga pada dimensi sosial-transformatif. Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural muncul sebagai respons strategis terhadap tantangan tersebut, dengan tujuan menginternalisasi nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai sebuah keniscayaan teologis atau *sunatullah*. Melalui penguatan pendekatan humanis, dialogis, dan kontekstual, PAI diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang moderat (*wasathiyah*) dan mampu berkontribusi pada harmoni peradaban dunia.

Transformasi nilai-nilai multikultural ke dalam ruang kelas memerlukan pendekatan yang holistik. Pendekatan ini menggeser orientasi pembelajaran dari sekadar transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) menuju internalisasi nilai (*transfer of values*) dan pembentukan karakter.

1. Pendekatan Pembelajaran Multikultural

a. Pendekatan Humanis

Pendekatan humanis dalam PAI menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang memiliki potensi *fitrah* untuk

berkembang. Dalam konteks multikultural, pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam konteks kehidupan mereka yang beragam.

Pengembangan potensi diri mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dengan menciptakan lingkungan kelas yang inklusif—ramah, terbuka, dan aman—siswa diajak untuk merayakan keragaman budaya dan agama sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam masyarakat yang heterogen.

b. Pendekatan Dialogis

Pendekatan dialogis atau *hiwar* menekankan pada interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik, serta antar sesama peserta didik. Dialog dalam PAI multikultural bukan hanya sekadar debat untuk mencari kemenangan, melainkan sarana untuk saling memahami dan menghargai perspektif lain. Melalui metode diskusi kelompok kecil, jurnal reflektif, dan meditasi, siswa didorong untuk merenungkan bagaimana nilai-nilai pribadi mereka berinteraksi dengan ajaran Islam dan realitas sosial.

Pendekatan ini sangat penting untuk meruntuhkan eksklusivisme beragama yang sering kali muncul akibat pemahaman yang sempit terhadap teks suci. Dengan mendialogkan ajaran agama dengan isu-isu kemanusiaan, siswa dapat memahami bahwa inti dari beragama adalah menebarkan kedamaian dan keadilan, bukan menciptakan konflik.

c. Pendekatan Kontekstual, Relevansi dengan Realitas Sosial

Pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) bertujuan untuk menghubungkan materi PAI dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi siswa dalam

kehidupan sehari-hari. Kurikulum dirancang agar relevan dengan konteks sosial budaya Indonesia, seperti masalah keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan dalam masyarakat multicultural.

Model pembelajaran ini memastikan bahwa ajaran Islam tidak dipahami secara tekstual-literal saja, tetapi secara substantif-kontekstual. Misalnya, pembelajaran tentang *zakat* tidak hanya membahas rukun dan syaratnya, tetapi juga dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan tanggung jawab sosial umat Islam terhadap warga negara lainnya yang kurang beruntung, lintas batas agama dan etnis.

2. Strategi Pembelajaran Praktis dalam Implementasi PAI Multikultural

Keberhasilan pendekatan multikultural sangat bergantung pada strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru di lapangan. Strategi ini harus mampu menyentuh ranah kognitif (pemahaman), afektif (sikap), dan psikomotorik (perilaku) siswa.

a. Integrasi Nilai Budaya Lokal dan Kearifan Tradisional

Integrasi budaya lokal ke dalam kurikulum PAI merupakan langkah strategis untuk memperkuat identitas budaya siswa sekaligus menanamkan nilai-nilai Islam yang ramah budaya. Islam yang masuk ke Nusantara tidak menghapus budaya asli, melainkan berpadu dan melahirkan bentuk keberagaman yang khas, toleran, dan inklusif.

Beberapa metode integratif yang efektif meliputi:

- a) **Storytelling dan Tradisi Lisan:** Guru menyampaikan kisah-kisah Islami dengan mengaitkannya pada nilai-nilai kearifan lokal yang akrab bagi siswa, seperti kejujuran dan kesabaran dalam budaya setempat.
- b) **Penggunaan Lagu dan Kesenian Daerah:** Mengadaptasi media seni tradisional yang mengandung pesan moral Islami untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan familiar.

- c) Kegiatan Ritual dan Sosial Bersama: Melibatkan siswa dalam perayaan hari besar keagamaan atau kegiatan gotong royong masyarakat yang mengedepankan nilai persaudaraan (*ukhuwah*).

- b. Metode Diskusi Kelompok dan Studi Kasus

Metode diskusi memungkinkan siswa untuk berbagi sudut pandang yang berbeda mengenai masalah-masalah sosial di lingkungan mereka. Melalui studi kasus, siswa disajikan tantangan nyata multikultural, seperti cara mengatasi konflik antarumat beragama atau menangani prasangka etnis, kemudian diajak mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Islam.

Strategi ini melatih keterampilan sosial siswa dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam perbedaan. Diskusi yang dipandu dengan baik oleh guru akan membantu siswa membangun kepercayaan antarindividu dan melakukan rekonsiliasi tanpa kekerasan saat terjadi gesekan sosial.

- c. Pembelajaran Eksperiensial dan Proyek Kolaboratif

Pengalaman langsung (*experiential learning*) sering kali memberikan dampak yang lebih mendalam dibandingkan sekadar teori di kelas. Kegiatan seperti kunjungan ke rumah ibadah berbagai agama, partisipasi dalam dialog antaragama, atau proyek pelayanan masyarakat lintas budaya membantu siswa mengembangkan empati dan pemahaman yang tulus terhadap keberagaman.

Proyek kolaboratif, seperti pembuatan dokumenter tentang toleransi atau kampanye sosial di media digital, mendorong siswa untuk bekerja sama secara tim lintas latar belakang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga memperkuat ikatan emosional dan solidaritas sosial di antara mereka.

Masa depan harmoni sosial di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai multikultural ini mampu terinternalisasi menjadi karakter permanen pada generasi muda. PAI multikultural memberikan landasan teologis bahwa keberagaman adalah tanda kebesaran Tuhan

yang menuntut manusia untuk saling mengenal (*lita'arafu*) dan bekerja sama dalam kebaikan. Dengan menjadikan sekolah sebagai laboratorium kerukunan dan guru sebagai model perdamaian, bangsa Indonesia akan memiliki generasi moderat yang mampu menjaga kedaulatan nasional sekaligus berkontribusi positif dalam kancah peradaban dunia yang semakin terhubung dan kompleks. Transformasi pedagogis ini adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan damai di bawah naungan nilai-nilai ilahiyah yang inklusif.

B. Model Pembelajaran Inklusif dan Partisipatif

Komponen pertama dan paling mendasar dalam model ini adalah penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman. Inklusi dimulai dengan cara pandang yang terbuka dan menghargai hak asasi manusia, yang kemudian mewujudkan dalam budaya sekolah yang inklusif. Penerimaan berarti tidak hanya sekadar "memasukkan" anak berkebutuhan khusus (ABK) secara fisik ke dalam kelas, tetapi juga melibatkan mereka sepenuhnya dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan visi misi sekolah. Budaya ini menuntut penghapusan stigma dan prasangka melalui interaksi harian yang bermakna antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).

Budaya inklusi di sekolah diperkuat melalui pendidikan multikultural yang menanamkan karakter toleransi, keadilan, dan humanisme. Strategi ini membantu siswa menghargai perbedaan latar belakang ras, budaya, agama, hingga kemampuan fisik sebagai "harta karun" yang memperluas wawasan mereka. Dalam prakteknya, sekolah harus menerapkan kebijakan "nol toleransi" terhadap diskriminasi dan perundungan guna menciptakan lingkungan yang aman bagi semua. Dialog dan kolaborasi antar-siswa dari latar belakang yang berbeda merupakan teknik paling efisien untuk menjembatani kesenjangan budaya dan membangun empati secara organik.

Pembelajaran klasikal yang sama mengacu pada penempatan PDBK di kelas reguler bersama teman sebayanya secara penuh (*full inclusion*). Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan sosial dan memberikan akses pengalaman pendidikan yang sama bagi semua anak sebagai warga negara yang penuh. Penelitian menunjukkan bahwa model klasikal dapat meningkatkan keterampilan sosial dan rasa kebersamaan antara peserta didik reguler dan PDBK.

1. Dinamika Pengelolaan Kelas Inklusif

Kehadiran PDBK di kelas reguler menuntut perubahan manajemen kelas yang signifikan. Guru kelas tidak lagi berorientasi klasikal murni yang memperlakukan semua siswa sama, tetapi harus peka terhadap keberagaman kebutuhan. Penataan lingkungan kelas, seperti pengaturan tempat duduk, harus dipertimbangkan secara strategis; misalnya, menempatkan PDBK di baris depan agar lebih mudah fokus dan mendapatkan bantuan dari guru.

Satu risiko yang sering muncul adalah adanya "dua proses pembelajaran dalam satu kelas", di mana PDBK hanya berinteraksi dengan pendampingnya (*helper*) sementara guru fokus pada siswa reguler. Untuk menghindari hal ini, guru harus memastikan bahwa pendekatan dan strategi yang digunakan dapat melibatkan semua siswa secara proporsional. Guru juga didorong untuk menggunakan bahan ajar yang bersumber dari kehidupan nyata anak sehari-hari untuk menghubungkan materi dengan pengalaman mereka.

2. Kolaborasi Guru Kelas dan Guru Pembimbing Khusus

Keberhasilan pembelajaran klasikal sangat bergantung pada strategi *Co-Teaching* atau pengajaran tim antara Guru Kelas (GK) dan Guru Pembimbing Khusus (GPK). GPK hadir bukan untuk memisahkan PDBK, melainkan untuk memberikan dukungan teknis di dalam lingkungan kelas reguler. Model sinergi ini meliputi:

One Teach, One Assist: Salah satu guru menyampaikan materi inti, sementara guru lainnya

berkeliling memberikan bantuan teknis kepada siswa yang kesulitan, termasuk PDBK. *Station Teaching*: Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang berputar ke berbagai stasiun pembelajaran yang dikelola oleh GK dan GPK secara bergantian. *Parallel Teaching*: Kelas dibagi menjadi dua kelompok besar yang mempelajari materi yang sama secara bersamaan dengan bimbingan masing-masing guru untuk memperkecil rasio guru-murid.

Melalui sinergi ini, transisi antara materi umum dan adaptasi khusus berjalan mulus tanpa mengabaikan siswa yang mengalami kesulitan kognitif atau sensorik. GPK berperan menerjemahkan konsep abstrak guru kelas ke dalam bentuk konkret yang sesuai dengan gaya belajar PDBK.

3. Metodologi Pembelajaran Aktif dan Partisipatif

Pembelajaran aktif adalah strategi yang menuntut keterlibatan mental, fisik, dan sosial siswa secara totalitas dalam proses konstruksi pengetahuan. Dalam setting inklusif, partisipasi aktif sangat penting untuk meningkatkan harga diri dan motivasi PDBK, serta mendorong kemandirian mereka.

Project-Based Learning (PjBL) diakui sangat efektif untuk kelas inklusif karena memberikan konteks nyata yang relevan bagi siswa. Melalui PjBL, siswa tidak sekadar menerima informasi, melainkan aktif memecahkan masalah melalui kolaborasi kelompok. Bagi PDBK, PjBL menawarkan keunggulan berupa: Dukungan Diferensiasi: PjBL memungkinkan penyesuaian proyek sesuai minat dan kemampuan spesifik anak. Pengembangan Keterampilan Sosial: Kerja kelompok melatih kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama yang sangat dibutuhkan PDBK untuk berinteraksi dengan masyarakat. Peningkatan Self-Efficacy: Keberhasilan menyelesaikan proyek nyata secara nyata meningkatkan rasa percaya diri PDBK secara signifikan.

Metode *Peer Tutoring* melibatkan siswa yang memiliki kecepatan belajar tinggi untuk membantu temannya yang

mengalami hambatan. Siswa yang berperan sebagai tutor akan memperkuat pemahamannya sendiri, sementara siswa yang dibantu (tutee) merasa lebih berani bertanya dan berdiskusi karena tidak ada jarak otoritas seperti dengan guru. Di kelas yang heterogen, tutor sebaya memungkinkan penyelesaian masalah dalam skala kelompok kecil yang lebih efektif dan manusiawi.

Meskipun pembelajaran dilakukan di kelas reguler, kebutuhan unik setiap PDBK harus dipenuhi melalui dukungan individual yang terstruktur. Instrumen utama untuk layanan ini adalah Program Pembelajaran Individual (PPI) atau *Individualized Education Program* (IEP). PPI adalah rencana pendidikan tertulis yang dirancang khusus untuk satu siswa berdasarkan hasil asesmen fungsional yang komprehensif.

Peran GPK sangat sentral dalam memastikan dukungan individual berjalan efektif. GPK bertugas sebagai fasilitator dan mediator yang melayani segala kebutuhan PDBK, mulai dari menyusun PPI hingga melakukan bimbingan khusus di ruang sumber bagi anak yang mengalami hambatan signifikan dalam mengikuti kelas umum. GPK juga bertanggung jawab memberikan bantuan remedial atau pengayaan serta mendampingi guru kelas dalam memodifikasi bahan ajar agar sesuai dengan profil PDBK.

4. Lingkungan Fisik yang Adaptif dan Aksesibilitas

Lingkungan fisik sekolah inklusif harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi semua anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Aksesibilitas dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada akses fisik (infrastruktur), tetapi juga akses terhadap informasi, teknologi, dan peluang sosial.

a. Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Ramah Disabilitas

Sekolah harus memperbaiki fasilitas fisiknya agar dapat diakses secara mandiri oleh PDBK, terutama bagi mereka yang memiliki hambatan motorik atau sensorik. Beberapa

standar aksesibilitas fisik meliputi: Akses Mobilitas: Ketersediaan ramp (bidang miring) untuk kursi roda, pintu yang cukup lebar, serta lantai yang tidak licin. Penataan Ruang Kelas: Meja dan kursi yang dapat disesuaikan ketinggiannya (*adjustable table*) untuk pengguna kursi roda, serta ruang kelas yang cukup luas untuk pergerakan alat bantu mobilitas. Fasilitas Pendukung: Toilet aksesibel, pegangan tangan (*handrail*) di koridor, serta penanda taktil atau audio di area sekolah.

b. Media Pembelajaran dan Teknologi Asistif

Penyediaan alat bantu pembelajaran yang spesifik sangat menentukan keberhasilan PDBK dalam menyerap informasi. Dokumen Kemendikbudristek merinci kebutuhan media berdasarkan hambatan siswa sebagai berikut:

Kebutuhan Khusus	Media dan Alat Bantu Spesifik
Hambatan Penglihatan	Peta timbul, <i>Talking Clock</i> , mesin ketik Braille, komputer dengan program <i>Screen Reader</i> (seperti JAWS atau NVDA).
Hambatan Pendengaran	<i>Hearing Aid</i> (model saku atau belakang telinga), cermin latihan wicara, lampu aksen kontrol suara, serta alat musik perkusi untuk persepsi bunyi.
Hambatan Intelektual	Alat peraga konkret (<i>puzzle konstruksi</i>), media latihan kemandirian (<i>grooming set</i>), dan perlengkapan rumah tangga.
Hambatan Fisik	Alat latihan fisik seperti <i>pulley weight</i> , <i>treadmill jogger</i> , <i>walker</i> khusus CP, dan kursi khusus PDBK.

Di era digital, aksesibilitas teknologi dan informasi menjadi sangat vital. Penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa, video dengan teks, dan perangkat teknologi asistif lainnya dapat memperluas cakrawala PDBK dan mendukung komunikasi yang efektif di sekolah.

Model pembelajaran inklusif dan partisipatif adalah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak

hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dan humanis. Dengan mengintegrasikan enam komponen utama—penerimaan yang tulus, kurikulum yang fleksibel, pembelajaran klasikal yang aksesibel, metodologi aktif, dukungan individual yang presisi, serta lingkungan fisik yang adaptif—sekolah berubah menjadi laboratorium mini bagi terciptanya masyarakat inklusif di masa depan.

Keberhasilan model ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi peserta didik reguler yang belajar menjadi individu yang lebih empatik, toleran, dan siap menghadapi dinamika global yang beragam. Melalui sinergi yang kokoh antara kebijakan yang berpihak, kesiapan institusional, dan perubahan sikap sosial, Indonesia dapat mewujudkan janji konstitusi untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi semua anak, sehingga tidak ada satu pun anak yang tertinggal dari hak belajarnya. Transformasi ini adalah perjalanan panjang yang menuntut komitmen kolektif untuk terus meruntuhkan tembok-tembok hambatan demi masa depan generasi yang lebih setara dan bermartabat.

C. Media Pembelajaran PAI Berbasis Digital dan Budaya Lokal

Pergeseran paradigma pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 telah menempatkan teknologi digital bukan sekadar sebagai alat bantu, melainkan sebagai ekosistem utama dalam proses transmisi nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan esensi ajaran yang bersifat universal sembari mengemasnya dalam bentuk yang relevan dengan karakteristik generasi *digital native*. Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran PAI di tingkat sekolah menengah telah membawa transformasi signifikan, di mana teknologi memberikan kesempatan bagi para pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan inklusif. Namun, efektivitas transformasi ini tidak hanya

bergantung pada kecanggihan perangkat keras, tetapi juga pada kedalaman integrasi konten yang berakar pada budaya lokal untuk memastikan bahwa pendidikan agama tetap memiliki relevansi kontekstual bagi peserta didik.

Urgensi media pembelajaran PAI berbasis digital terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi internalisasi nilai-nilai Islam melalui pengalaman belajar yang imersif dan personal. Integrasi kearifan lokal ke dalam media digital berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teks suci dengan realitas sosial budaya peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih humanistik dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan mengadopsi kearifan lokal, PAI mampu membentuk karakter keberagamaan yang moderat, di mana siswa belajar untuk menghargai perbedaan dan membangun harmoni sosial di tengah kemajemukan bangsa. Hal ini menjadi sangat krusial di tengah maraknya radikalisme digital dan tantangan globalisasi yang cenderung menggerus identitas budaya lokal.

Implementasi teknologi dalam PAI menuntut pemahaman mendalam tentang interaksi antara konten, pedagogi, dan teknologi. Model *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) menjadi kerangka kerja utama yang menekankan pentingnya guru menguasai hubungan antara pengetahuan agama (content), cara mengajar yang efektif (pedagogy), dan pemanfaatan alat digital (technology).¹ Selain TPACK, model *Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition* (SAMR) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana teknologi meningkatkan kualitas instruksional, mulai dari sekadar mengganti media konvensional hingga mendefinisikan ulang tugas-tugas pembelajaran yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan tanpa teknologi.

Integrasi ini juga berdampak pada peningkatan lima domain kompetensi digital guru PAI, yaitu literasi informasi, komunikasi, pembuatan konten edukasi, keamanan digital, dan penyelesaian masalah teknis. Guru yang memiliki

kompetensi digital yang mumpuni mampu menyaring informasi keagamaan yang akurat dan etis, serta melindungi siswa dari konten negatif di dunia maya. Keberadaan teknologi digital juga terbukti mampu meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas belajar, terutama bagi siswa dengan motivasi rendah, dengan menyediakan konten yang lebih menarik seperti video animasi dan gamifikasi.

1. Implementasi Video Animasi Berbasis Cerita Rakyat dan Tokoh Lokal

Video animasi merupakan salah satu media yang paling efektif dalam menyampaikan pesan moral dan sejarah dalam PAI karena kemampuannya memvisualisasikan konsep abstrak melalui narasi yang kuat. Di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), kekayaan budaya berupa cerita rakyat dan sejarah penyebaran Islam menjadi sumber inspirasi yang tidak habis untuk dikembangkan dalam bentuk animasi digital.

Tokoh Si Pondik dalam khazanah cerita rakyat NTT memberikan ruang diskusi yang luas mengenai konsep akhlak mahmudah dan mazmumah. Dalam video animasi, Si Pondik sering digambarkan sebagai sosok yang cerdas namun menggunakan akalnya untuk menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Implementasi media ini dalam kelas PAI bertujuan untuk mengajak siswa berpikir kritis terhadap perilaku tokoh.

Secara teologis, kecerdasan Si Pondik dapat dikaitkan dengan sifat *fathanah*, namun tanpa diiringi oleh *siddiq* (kejujuran) dan *amanah* (kepercayaan), kecerdasan tersebut berubah menjadi *kidzib* (kebohongan) yang merugikan orang lain. Melalui animasi, guru dapat menonjolkan pesan bahwa kejujuran adalah fondasi utama keselamatan dunia dan akhirat. Selain itu, sifat serakah yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang ditipu Si Pondik memberikan pelajaran tentang bahaya *tamak* dan pentingnya sifat *qana'ah* (merasa cukup). Penggunaan media ini secara efektif mampu menghubungkan nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip

prinsip etika Islam secara lebih emosional dan mendalam bagi siswa.

2. Rekonstruksi Sejarah Lokal: Sultan Menanga dan Islamisasi di Solor

Integrasi tokoh sejarah lokal ke dalam media digital PAI membantu siswa memahami silsilah peradaban Islam di wilayah mereka sendiri. Sosok Sultan Menanga, atau Syahbudin bin Salman Al-Faris, merupakan figur sentral dalam sejarah Islam di NTT. Beliau adalah ulama asal Palembang yang menyebarkan Islam di Pulau Solor pada abad ke-15 melalui pendekatan budaya dan perkawinan.

Data Sejarah	Detail Informasi Tokoh/Situs	Implikasi Pembelajaran PAI
Tokoh Utama	Sultan Menanga (Syahbudin bin Salman Al-Faris).	Meneladani strategi dakwah yang damai dan inklusif.
Pusat Dakwah	Menanga, Pulau Solor, Flores Timur.	Membangun kebanggaan terhadap situs sejarah lokal.
Bukti Arkeologis	Benteng Lohayong dan Aliansi Solor Watanlema.	Membuktikan eksistensi peradaban Islam yang kuat sebelum era kolonial.
Metode Dakwah	Perdagangan, perkawinan, dan diplomasi politik dengan raja setempat.	Mengajarkan moderasi beragama melalui akulturasi budaya.

Penyusunan modul digital atau video dokumenter mengenai Sultan Menanga memungkinkan siswa untuk melihat Islam bukan sebagai agama pendatang, melainkan sebagai bagian integral dari sejarah identitas mereka. Bukti sejarah seperti Al-Qur'an tua di Alor yang dibawa oleh para penyebar Islam dari Ternate semakin memperkuat narasi tentang jaringan keilmuan Islam nusantara yang sangat

luas. Pemanfaatan media digital dalam mengangkat sejarah lokal ini sangat krusial untuk mencegah keterputusan generasi dari akar budayanya.

3. Integrasi Kearifan Lokal NTT dalam Materi Karakter dan Ekologi

Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan nilai kearifan lokal yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam aspek hubungan antarmanusia (*hablum minannas*) dan hubungan dengan alam (*hablum minal 'alam*). Integrasi nilai-nilai ini ke dalam media digital PAI memperkuat identitas kebangsaan dan moderasi beragama siswa.

Penggunaan video dalam PAI berfungsi sebagai *advance organizer* yang membekali siswa dengan struktur kognitif awal sebelum memasuki materi inti yang lebih kompleks. Hal ini membantu siswa dalam membangun pemahaman yang bermakna dan menghubungkan informasi baru dengan konsep-konsep yang sudah mereka pahami dalam budaya mereka sendiri.

Integrasi teknologi digital dan kearifan lokal dalam media pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman. Transformasi ini tidak hanya sebatas penggunaan perangkat canggih, tetapi mencakup restrukturisasi nilai di mana budaya lokal menjadi ruh dalam setiap konten digital yang dihasilkan. Video animasi mengenai cerita rakyat Si Pondik dan sejarah Sultan Menanga membuktikan bahwa narasi lokal mampu menjadi media yang efektif dalam mentransmisikan nilai etika dan sejarah secara emosional.

Masa depan PAI terletak pada kemampuan para pendidik untuk terus berinovasi, menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kedalaman nilai-nilai kearifan lokal, demi melahirkan generasi yang tidak hanya mahir secara teknis tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan integritas moral yang kokoh. Masa depan pendidikan agama adalah harmoni antara layar digital dan kearifan leluhur yang tak lekang oleh waktu.

D. Pembelajaran Dialogis dan Kolaboratif dalam PAI

Pendidikan Agama Islam (PAI) pada era kontemporer tengah berada dalam titik persimpangan yang krusial, di mana metode tradisional yang bersifat monologis-informatif mulai dipertanyakan efektivitasnya dalam menghadapi kompleksitas tantangan global. Perubahan paradigma pendidikan modern menuntut sebuah pendekatan yang tidak hanya bersifat transfer pengetahuan (transfer of knowledge), melainkan juga transformatif dan partisipatif. Dalam konteks ini, pembelajaran dialogis dan kolaboratif muncul sebagai jawaban atas kebuntuan metode konvensional yang cenderung pasif, dengan menawarkan model interaksi yang dinamis, egaliter, dan berakar kuat pada nilai-nilai profetik. Pembelajaran ini bukan sekadar teknik instruksional, melainkan sebuah manifestasi dari ajaran Islam yang mengedepankan kemanusiaan, persaudaraan, dan pencarian kebenaran melalui pertukaran gagasan yang sehat.

Secara ontologis, pembelajaran kolaboratif dalam PAI dipahami sebagai sebuah strategi atau pendekatan di mana peserta didik bekerja bersama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar tertentu, memecahkan masalah kompleks, atau membangun pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep keagamaan. Inti dari kolaborasi adalah adanya interdependensi positif, di mana setiap siswa merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab moral terhadap keberhasilan kolektif kelompoknya. Pendekatan ini secara mendasar berbeda dengan kerja kelompok biasa karena di dalamnya terdapat pembagian peran yang terstruktur, tanggung jawab individual yang jelas, serta proses interaksi promotif tatap muka yang intens.

Di sisi lain, pembelajaran dialogis menitikberatkan pada penciptaan ruang diskusi terbuka antara guru dan siswa untuk memperkuat refleksi personal terhadap ajaran agama Islam. Dialog dalam PAI bukan sekadar tanya jawab teknis, melainkan proses dialektika yang melibatkan

keterlibatan aktif siswa, kebebasan berpikir, penghormatan terhadap keragaman pendapat, dan refleksi kritis terhadap ajaran Islam dalam konteks kehidupan nyata. Melalui dialog, siswa tidak lagi dipandang sebagai bejana kosong yang hanya menerima informasi, melainkan sebagai subjek aktif yang mengonstruksi pemahaman keagamaannya melalui interaksi sosial yang bermakna.

Kebutuhan mendesak terhadap model kolaboratif ini juga dipicu oleh perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 5.0, yang menuntut keterampilan abad ke-21 yang dikenal sebagai 4C: *Creativity, Critical Thinking, Communication, dan Collaboration*. PAI sebagai garda terdepan pembentukan akhlak harus mampu mengintegrasikan keterampilan ini agar nilai-nilai agama tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi mampu menjadi solusi atas problematika sosial yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari.

1. Landasan Prinsip Islam dalam Pembelajaran Kolaboratif

Landasan pembelajaran kolaboratif dan dialogis dalam PAI memiliki akar teologis yang sangat dalam pada teks-teks suci Al-Qur'an dan tradisi kenabian. Islam tidak pernah memandang manusia sebagai entitas yang terisolasi, melainkan sebagai makhluk sosial yang diperintahkan untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan. Prinsip-prinsip Qur'ani seperti *Ta'awun*, *Syūrā*, dan *Ukhuwah* menjadi fondasi spiritual yang memberikan makna lebih pada setiap aktivitas kolaboratif di ruang kelas.

a. Prinsip Ta'awun (Tolong-Menolong dalam Kebaikan)

Landasan teologis utama bagi kolaborasi adalah Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, serta melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam konteks pendidikan, semangat *Ta'awun* mengimplikasikan bahwa tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi yang berakhlak adalah kewajiban bersama.

Analisis terhadap ayat ini menunjukkan bahwa kerja sama dalam pendidikan harus didasari oleh beberapa syarat penting agar bernilai spiritual tinggi. 1) Kepentingan dan Tujuan yang Sama: Kerja sama terbentuk karena adanya visi bersama untuk mencapai kebenaran dan rida Allah. 2) Keadilan: Setiap anggota kelompok memperoleh perlakuan dan hak yang sesuai dengan kontribusinya, tanpa adanya diskriminasi. 3) Saling Pengertian dan Membantu: Anggota kelompok harus bersedia memahami kelemahan sesama dan saling melayani guna mempercepat pencapaian tujuan kolektif. 4) Tanggung Jawab (Amanah): Setiap individu menyadari bahwa perannya dalam kelompok adalah bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada manusia maupun kepada Tuhan.

b. Syūrā (Musyawarah) sebagai Mekanisme Dialogis

Prinsip *Syūrā* atau musyawarah merupakan pilar utama dalam pengambilan keputusan dan pertukaran pendapat dalam Islam. Al-Qur'an menggambarkan musyawarah sebagai ciri utama orang-orang yang beriman. Dalam pembelajaran PAI, musyawarah diimplementasikan melalui diskusi kelompok di mana setiap siswa diberikan hak suara yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan gagasannya. Musyawarah mendidik siswa untuk memiliki sikap rendah hati (*tawadhu*), kesabaran dalam mendengarkan, serta kematangan emosional dalam menerima kritik.

Penggunaan metode diskusi yang berlandaskan *Syūrā* juga bertujuan untuk mencapai konsensus (*ijma*) atau setidaknya pemahaman bersama yang meminimalisir konflik. Dalam manajemen pendidikan Islam, musyawarah dianggap sebagai instrumen untuk menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang sehat, produktif, dan bernilai spiritual tinggi. Melalui mekanisme ini, dominasi individu dapat diredam, dan kecerdasan kolektif kelompok dapat dioptimalkan.

c. Ukhuwah (Persaudaraan) dan Etika Pergaulan

Pembelajaran kolaboratif dalam PAI didasarkan pada penanaman nilai *Ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan Islam, yang didefinisikan sebagai keterikatan hati dan jiwa melalui ikatan iman. Hubungan emosional yang kuat ini menumbuhkan empati dan keinginan untuk mendukung satu sama lain, terutama saat rekan sejawat menghadapi kesulitan dalam memahami materi pelajaran.

Berdasarkan Surah Al-Hujurat ayat 10-13, Islam menetapkan pedoman etika pergaulan yang sangat relevan dengan dinamika kelompok belajar: Penyelesaian Konflik secara Damai: Jika terjadi perbedaan pendapat yang tajam dalam diskusi, siswa diajarkan untuk melakukan *Ishlah* (perdamaian) dan tidak membiarkan perselisihan merusak hubungan persaudaraan. Larangan Merendahkan Orang Lain: Surah Al-Hujurat ayat 11 melarang sikap mengolok-olok atau mencela sesama anggota kelompok, karena boleh jadi orang yang direndahkan memiliki pemahaman yang lebih baik di sisi Allah. Menghargai Keberagaman: Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan latar belakang adalah sunnatullah yang bertujuan agar manusia saling mengenal (*Li-ta'arafu*). Dalam kelas PAI yang heterogen, prinsip ini mendorong siswa untuk menghargai perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, dan kemampuan akademik sebagai kekayaan bersama.

2. Implementasi Strategis dalam Kelas PAI

Penerapan pembelajaran dialogis dan kolaboratif menuntut transformasi dalam langkah-langkah instruksional yang dilakukan oleh pendidik. Implementasi yang baik tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui fase-fase yang terencana, mulai dari desain kurikulum hingga evaluasi akhir.

a. Persiapan dan Pembentukan Kelompok yang Berbasis Nilai

Langkah awal dimulai dengan perencanaan berbasis nilai Islam, di mana guru mengintegrasikan kutipan ayat Al-Qur'an atau Hadis dalam tujuan pembelajaran sebagai dasar

moral kolaborasi. Guru bertindak sebagai arsitek lingkungan belajar yang harus menyiapkan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun digital, untuk memfasilitasi interaksi.

Pembentukan kelompok harus dilakukan secara heterogen untuk mendorong pertukaran perspektif yang luas. Dalam konteks PAI, pembagian peran dalam kelompok sangat krusial untuk melatih tanggung jawab. Siswa tidak hanya dibagi berdasarkan tugas teknis, tetapi juga peran yang mencerminkan karakter Islami, seperti *Amir* (pemimpin) yang bertugas menjaga kerukunan, *Katib* (penulis) yang mencatat poin-poin hikmah, serta pengamat adab yang memastikan diskusi berjalan sesuai etika Islam.

b. Dinamika Dialog dan Diskusi Interaktif

Pada tahap ini, guru memulai kelas dengan menggali pengetahuan awal siswa (*prior knowledge*) dan mengaitkannya dengan problematika kehidupan sosial yang relevan, seperti isu kemiskinan, etika media sosial, atau pelestarian lingkungan. Dialog interaktif diciptakan melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memicu pemikiran kritis. Guru harus memberikan ruang bagi siswa untuk berpendapat secara bebas, menciptakan suasana demokratis di mana setiap suara dihargai.

Penting bagi guru untuk menyisipkan nilai-nilai keislaman di setiap sesi diskusi. Misalnya, saat membahas materi Hadis, siswa diajak melakukan refleksi personal terhadap makna teks tersebut bagi kehidupan mereka sehari-hari. Penggunaan media teknologi seperti platform diskusi daring dapat membantu mengakomodasi siswa yang memiliki tipe belajar berbeda atau cenderung pasif dalam interaksi langsung.

3. Manfaat Pembelajaran Dialogis dan Kolaboratif bagi Peserta Didik

Implementasi metode ini memberikan dampak transformatif yang luas, mencakup dimensi sosial, intelektual, dan spiritual siswa. Pembelajaran PAI yang kolaboratif mampu menjawab kritik terhadap pendidikan

agama yang sering dianggap terlalu abstrak dan tidak membumi.

a. Peningkatan Keterampilan Sosial dan Kecerdasan Interpersonal

Kecerdasan sosial dipahami sebagai kemampuan menjalin relasi interpersonal yang sehat dan berperilaku adaptif dalam lingkungan sosial yang beragam.⁴ Melalui pembelajaran kolaboratif, siswa mempraktikkan langsung nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan sikap lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Keterampilan komunikasi yang santun, kepemimpinan yang amanah, serta manajemen konflik secara dewasa menjadi kompetensi yang tumbuh secara natural dalam ekosistem belajar yang kolaboratif.

Selain itu, model ini meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat dan memperkuat rasa percaya diri bagi mereka yang sebelumnya pasif. Solidaritas dan modal sosial yang terbentuk di antara siswa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, yang sangat penting bagi pembentukan kesehatan mental dan emosional mereka.

b. Kedalaman Pemahaman Konseptual (Deep Understanding)

Pembelajaran dialogis memicu motivasi intrinsik siswa melalui interdependensi positif. Dengan terlibat aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah, siswa tidak hanya menghafal teks, tetapi memahami makna dan relevansi ajaran agama dalam konteks kehidupan nyata. Pengetahuan yang dikonstruksi melalui dialog bersama teman sebaya (*peer-to-peer interaction*) cenderung lebih menetap dalam memori jangka panjang dibandingkan informasi yang diterima secara pasif.

Nalar kritis siswa berkembang saat mereka diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengaitkan prinsip-prinsip Islam dengan isu-isu kontemporer seperti teknologi digital, lingkungan hidup, dan moderasi beragama. Hal ini menjadikan PAI sebagai ilmu yang hidup dan dinamis, yang

mampu memberikan panduan moral di tengah cepatnya perubahan global.

Pembelajaran PAI berbasis dialog dan kolaboratif menjadi benteng yang kuat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan, serta mencegah berkembangnya sikap ekstremisme dan intoleransi di lingkungan sekolah. Siswa diarahkan untuk menjadi agen perdamaian yang mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat multikultural.

Pembelajaran dialogis dan kolaboratif dalam Pendidikan Agama Islam bukan sekadar tren pedagogis, melainkan sebuah kebutuhan epistemologis untuk merekonstruksi cara umat Islam mempelajari dan mengamalkan agamanya. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Qur'ani seperti *Ta'awun*, *Syūrā*, dan *Ukhuwah*, pendekatan ini mampu mengubah kelas PAI menjadi ruang publik yang inklusif bagi pencarian kebenaran

E. Evaluasi Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural

Evaluasi pembelajaran PAI yang berwawasan multikultural memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari penilaian konvensional. Evaluasi ini harus berlandaskan pada prinsip keadilan, objektivitas, dan kebermanfaatan bagi pengembangan karakter siswa. Prinsip utama yang mendasari sistem ini adalah pengakuan bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang pengalaman yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut harus diakomodasi sebagai bagian dari proses belajar.

Pertama, prinsip objektivitas menuntut guru untuk menyelenggarakan proses penilaian yang tidak diskriminatif. Artinya, segala bentuk sikap, perkataan, dan instrumen penilaian tidak boleh menyinggung paham keberagaman internal (seperti perbedaan mazhab antara NU dan Muhammadiyah) maupun keberagaman eksternal (agama lain). Kedua, prinsip transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa kriteria penilaian jelas bagi semua

pihak, sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara edukatif.

Ketiga, evaluasi harus bersifat komprehensif dan berkesinambungan. Penilaian tidak boleh hanya dilakukan di akhir semester (sumatif), tetapi harus terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran (formatif) guna memantau perkembangan sikap dan perilaku siswa secara nyata. Keempat, prinsip responsivitas terhadap dinamika masyarakat menuntut kurikulum dan sistem evaluasi untuk selalu relevan dengan kebutuhan akan pengakuan keberagaman. Evaluasi yang efektif harus mampu memberikan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki program belajar sekaligus merangsang kegairahan siswa dalam meningkatkan prestasi sosial dan religiusnya.

Karakteristik materi yang relevan dengan evaluasi berbasis multikultural meliputi penghormatan terhadap perbedaan gaya pakaian, mata pencaharian, suku, dan etnis, serta kemampuan menampilkan perilaku yang didasari oleh keyakinan agama masing-masing dalam bingkai kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya alat ukur akademik, tetapi juga instrumen pembinaan moral yang mengedepankan prinsip inklusivitas dan berkeadilan.

1. Evaluasi Integrasi Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik

Model evaluasi PAI multikultural yang ideal harus menjangkau tiga ranah utama hasil belajar—kognitif, afektif, dan psikomotorik—secara seimbang dan terintegrasi. Selama ini, terdapat ketimpangan di mana penilaian seringkali hanya terfokus pada pengukuran aspek kognitif teoretis, sementara internalisasi nilai (afektif) dan pengamalan nyata (psikomotorik) kurang mendapat porsi yang memadai.

a. Ranah Kognitif dalam Konteks Multikultural

Ranah kognitif dalam PAI mencerminkan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses berpikir, memahami, dan menganalisis nilai-nilai keagamaan dalam realitas sosial. Dalam perspektif multikultural, evaluasi kognitif tidak hanya mengukur kemampuan menghafal ayat atau

hadis, tetapi juga kemampuan menilai dan mempertimbangkan isu-isu keberagaman secara kritis. Peserta didik diharapkan mampu menguasai pengetahuan keislaman yang bersifat konseptual, prosedural, dan faktual, seperti memahami sejarah Piagam Madinah sebagai landasan toleransi beragama.

Tingkatan berpikir dalam ranah kognitif ini mencakup:

- 1) Pemahaman mendalam: Tidak hanya tahu definisi toleransi, tetapi paham mengapa toleransi menjadi pondasi perdamaian dalam Islam.
- 2) Analisis Kritis: Kemampuan mengidentifikasi perilaku rasial, stereotip, dan labeling terhadap kelompok lain yang bertentangan dengan ajaran Islam.
- 3) Sintesis Nilai: Mengaitkan ajaran Islam dengan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kasih sayang untuk memberikan solusi atas masalah kemanusiaan.

b. Ranah Afektif sebagai Jantung Karakter Multikultural

Ranah afektif merupakan dimensi yang paling krusial dalam evaluasi multikultural karena berkaitan dengan pembentukan sikap, nilai, dan respons emosional terhadap perbedaan. Evaluasi afektif mencakup penilaian terhadap minat, motivasi, dan internalisasi nilai-nilai inklusivitas. Siswa dinilai berdasarkan kesediaan mereka untuk mendengarkan orang lain, empati terhadap kesulitan sesama, serta keberanian untuk membela keadilan tanpa melihat latar belakang primordial.

Indikator keberhasilan pada ranah afektif meliputi munculnya sikap toleran, gotong royong, dan hilangnya keinginan untuk bermusuhan. Evaluasi ini bertujuan menciptakan individu yang memiliki kejujuran, integritas, dan keyakinan bahwa setiap warga negara dalam masyarakat demokrasi berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Keberhasilan dalam ranah ini ditandai dengan perubahan sikap sehari-hari yang menghargai pluralitas sebagai modal sosial.

c. Ranah Psikomotorik: Keterampilan Berinteraksi dan Beribadah

Ranah psikomotorik berfokus pada kemampuan peserta didik dalam menerapkan keterampilan fisik dan tindakan nyata yang sejalan dengan pemahaman agamanya. Dalam konteks multikultural, hal ini melibatkan keterampilan praktis dalam berinteraksi sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dengan santun lintas budaya, partisipasi dalam kegiatan bakti sosial lintas agama, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan.

2. Metodologi dan Instrumen Evaluasi: Teknik Tes dan Non-Tes

Untuk mendapatkan gambaran yang holistik mengenai pencapaian siswa, evaluasi PAI multikultural harus menggunakan kombinasi berbagai teknik dan instrumen, baik yang bersifat tes maupun non-tes. Penggunaan instrumen yang bervariasi sangat penting karena perubahan sikap dan perilaku seringkali tidak dapat terukur secara akurat hanya melalui ujian tertulis.

a. Penerapan Tes dalam Ranah Kognitif

Tes tertulis, baik dalam bentuk pilihan ganda (*multiple choice*) maupun uraian (*essay*), tetap digunakan untuk mengukur penguasaan materi keagamaan. Tes pilihan ganda memiliki keunggulan dalam hal objektivitas dan kecepatan pemeriksaan, serta mampu merepresentasikan luasnya isi materi kurikulum. Namun, tes uraian dianggap lebih efektif untuk mengeksplorasi kemampuan berpikir kritis siswa dalam merespons situasi multikultural yang kompleks.

b. Inovasi Instrumen Non-Tes untuk Karakter

Instrumen non-tes menjadi tulang punggung dalam menilai ranah afektif dan psikomotorik. Beberapa instrumen yang terbukti efektif dalam praktik di sekolah meliputi:

- 1) Jurnal Guru dan Catatan Anekdote: Guru mendokumentasikan kejadian-kejadian penting yang melibatkan interaksi siswa, baik positif maupun negatif,

seperti tindakan membantu teman dari latar belakang berbeda atau insiden ejekan berbaur SARA.

- 2) Lembar Observasi Partisipatif: Digunakan untuk memantau sikap siswa secara alami selama proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas tanpa sepengetahuan siswa.
- 3) Rubrik Penilaian Sikap: Mengembangkan kriteria yang jelas untuk menilai aspek-aspek seperti kedisiplinan, kesopanan, dan kepedulian sosial.
- 4) Penilaian Teman Sejawat (*Peer Assessment*): Memberikan informasi mengenai perilaku siswa dari sudut pandang rekan sebayanya, yang seringkali lebih jujur dalam merefleksikan interaksi sosial sehari-hari.
- 5) Portofolio Reflektif: Kumpulan tugas, laporan kegiatan sosial, dan refleksi pribadi siswa yang menunjukkan perkembangan pemahaman dan sikap mereka terhadap isu keberagaman.

Penggunaan teknologi digital dalam evaluasi, seperti platform *e-learning* dan aplikasi edukatif, juga mulai dikembangkan untuk menjadikan penilaian lebih menarik, mudah diakses, dan relevan dengan dunia digital siswa masa kini. Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam instrumen evaluasi terbukti mendukung penilaian yang lebih holistik, meskipun inovasi metode tetap diperlukan untuk mengoptimalkan hasil.

Evaluasi pembelajaran PAI berbasis multikultural merupakan sebuah instrumen vital dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang pluralistik. Melalui reposisi sistem penilaian yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif-dogmatis tetapi juga pada aspek afektif-karakter dan psikomotorik-sosial, PAI mampu bertransformasi menjadi kekuatan yang menyatukan. Keberhasilan sistem evaluasi ini menuntut objektivitas guru, keragaman instrumen, dan dukungan budaya sekolah yang inklusif.

BAB 9

Peran Pendidik sebagai Agen Perdamaian dan Transformasi Sosial

Pendidik bukan sekadar penyampai pengetahuan. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, pendidik, khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI), mengemban amanah yang jauh lebih luas: menjadi penjaga nilai, pembangun perdamaian, dan agen transformasi sosial. Pada titik inilah pendidikan agama menemukan relevansinya yang paling mendalam, bukan sebatas ritual penyampaian materi kurikulum, melainkan sebagai proses pembentukan manusia yang beriman, beradab, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah perbedaan.

Diskursus tentang peran pendidik sebagai agen perdamaian sebenarnya bukan hal baru dalam tradisi pendidikan Islam. Jauh sebelum terminologi *peace education* dikenal dalam wacana akademik Barat, pesantren-pesantren di Nusantara telah lama mempraktikkan pendidikan yang menanamkan nilai tasamuh (toleransi), tawassuth (moderasi), dan ta'aruf (saling mengenal) melalui keteladanan kiai dan ustaz (Azra, 1999, hlm. 88; Dhofier, 2011, hlm. 45; Wahid, 2007, hlm. 67). Keteladanan ini menjadi inti dari apa yang dalam literatur pendidikan kontemporer disebut sebagai *role modeling*, sebuah mekanisme pembelajaran yang terbukti paling efektif dalam membentuk karakter.

Bab ini mendiskusikan secara mendalam lima dimensi peran pendidik PAI dalam masyarakat majemuk: sebagai teladan nilai moderasi dan toleransi; sebagai pendidik yang memiliki kompetensi multikultural; sebagai profesional yang menjunjung etika dalam keberagaman; sebagai agen perdamaian; dan sebagai penggerak transformasi sosial. Kelima dimensi ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkelindan membentuk profil pendidik PAI ideal yang dibutuhkan Indonesia hari ini.

A. Guru PAI sebagai Teladan Nilai Moderasi dan Toleransi

Di dalam tradisi pendidikan Islam, konsep *uswatun hasanah*, keteladanan yang baik, menempati posisi sentral yang tidak tergantikan. Nabi Muhammad SAW sendiri dideskripsikan oleh al-Quran sebagai teladan utama bagi seluruh umat manusia: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik" (QS. al-Ahzab: 21). Prinsip ini secara langsung menempatkan pendidik, sebagai pewaris para nabi, dalam posisi yang tidak hanya mengajarkan nilai, tetapi lebih penting lagi, menghidupi nilai itu dalam keseharian.

Dalam konteks pendidikan Islam multikultural, peran guru PAI sebagai teladan memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, keteladanan dalam moderasi beragama, yaitu menampilkan Islam sebagai agama yang *wasathiyyah* (tengah) yang menolak ekstremisme dalam segala bentuknya, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Kedua, keteladanan dalam toleransi, yaitu kemampuan untuk bersikap menghargai, terbuka, dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan keyakinan, etnis, dan latar belakang sosial-budaya siswa.

Albert Bandura dalam teori *Social Learning*-nya menegaskan bahwa manusia belajar secara efektif melalui observasi dan imitasi terhadap model yang signifikan (Bandura, 1977, hlm. 22). Dalam konteks kelas, guru adalah

model yang paling signifikan. Sikap, tutur kata, gestur, dan respons guru terhadap perbedaan semuanya terobservasi dan terinternalisasi oleh siswa, seringkali tanpa disadari oleh keduanya. Karena itu, seorang guru PAI yang dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa inklusif, menghormati perbedaan pendapat, dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi lokal sedang melakukan pendidikan multikultural yang jauh lebih kuat daripada seribu ceramah tentang toleransi.

Riset yang dilakukan oleh Suradi (2018, hlm. 98) terhadap guru PAI di beberapa sekolah di Indonesia menemukan bahwa sikap guru merupakan faktor paling determinan dalam membentuk persepsi siswa tentang keberagaman. Siswa yang memiliki guru PAI dengan orientasi inklusif cenderung menunjukkan sikap yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan dibandingkan dengan siswa yang gurunya berhaluan eksklusif. Temuan ini selaras dengan penelitian Hasan dan Anam (2024, hlm. 35) yang menyimpulkan bahwa keteladanan guru jauh lebih berpengaruh dibandingkan isi kurikulum dalam membentuk karakter siswa.

Moderasi beragama, yang kini menjadi agenda nasional melalui program Kementerian Agama RI, menuntut guru PAI untuk secara aktif menampilkan empat indikator utama: komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, toleransi, dan penghargaan terhadap tradisi lokal (Kemenag RI, 2019, hlm. 43). Keempat indikator ini tidak cukup hanya didiskusikan di ruang kelas, tetapi harus dihidupkan dalam perilaku nyata sang guru.

Dalam tradisi pesantren, peran kiai sebagai teladan telah terbukti selama berabad-abad menjadi mekanisme transmisi nilai yang paling efektif. Gus Dur (Abdurrahman Wahid) pernah menyatakan bahwa pesantren adalah laboratorium sosial tempat nilai-nilai kemanusiaan diuji dan dihidupkan dalam praktik sehari-hari (Wahid, 2007, hlm. 67). Kualitas sosial yang ditampilkan kiai, yaitu

kesederhanaan, kelapangan hati, keterbukaan terhadap perbedaan, dan kemampuan merangkul semua golongan, menjadi sumber utama pembentukan karakter santri yang pluralis dan toleran.

Bagi guru PAI di sekolah formal, tantangannya mungkin berbeda, tetapi prinsipnya sama. Di era digital ini, keteladanan guru tidak hanya hadir secara fisik di kelas, tetapi juga terekspresi dalam aktivitas media sosial, cara guru merespons isu-isu keagamaan di ruang publik digital, dan sejauh mana guru mampu menjadi suara moderasi di tengah kebisingan narasi-narasi intoleran yang seringkali lebih viral. Dengan kata lain, menjadi teladan di abad ke-21 menuntut tidak hanya keutamaan moral personal, tetapi juga kecerdasan berliterasi digital (Rahmat, 2019, hlm. 70).

Selain dimensi personal, keteladanan guru juga berdimensi institusional. Guru PAI yang aktif menginisiasi kegiatan lintas agama di sekolah, mendorong dialog antarkelompok, dan menjadi jembatan antara kepentingan yang berbeda sedang menjalankan fungsi kepemimpinan transformatif. Burns (1978, hlm. 20) mendefinisikan kepemimpinan transformatif sebagai kemampuan memobilisasi orang lain untuk melampaui kepentingan diri sendiri demi tujuan yang lebih besar. Dalam konteks ini, guru PAI yang menjalankan peran transformatif adalah guru yang mampu menginspirasi siswa dan komunitas sekolah untuk melampaui sekat-sekat sektarian menuju kesadaran kemanusiaan yang lebih universal.

B. Kompetensi Multikultural Pendidik PAI

Berbicara tentang kompetensi guru dalam sistem pendidikan Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terdapat empat kompetensi utama yang wajib dimiliki pendidik: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Namun dalam konteks masyarakat majemuk dan pendidikan multikultural, keempat kompetensi tersebut

perlu diperkaya dengan satu dimensi yang seringkali terabaikan, yaitu kompetensi multikultural.

Kompetensi multikultural guru secara konseptual didefinisikan oleh Banks dan Banks (2010, hlm. 15) sebagai seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memungkinkan pendidik untuk bekerja secara efektif dengan siswa dari berbagai latar belakang budaya, etnis, agama, dan sosial-ekonomi. Kompetensi ini bukan bawaan, melainkan sesuatu yang perlu diupayakan secara sistematis melalui pendidikan, refleksi, dan pengalaman.

Dalam konteks khusus guru PAI, Suradi (2018, hlm. 45) mengidentifikasi tiga dimensi kompetensi multikultural yang kritis. Pertama adalah dimensi kognitif, yaitu penguasaan pengetahuan tentang keberagaman budaya dan agama, termasuk pemahaman yang memadai tentang agama-agama lain, adat istiadat lokal, dan dinamika sosial masyarakat majemuk. Seorang guru PAI yang tidak punya pengetahuan dasar tentang tradisi dan keyakinan masyarakat di luar Islam akan sangat rentan melakukan generalisasi yang keliru, atau bahkan tanpa sadar memproduksi narasi yang merendahkan.

Kedua adalah dimensi afektif, yang berkaitan dengan sikap dan orientasi nilai. Ini mencakup empati lintas budaya, keterbukaan terhadap perbedaan, rasa ingin tahu yang positif tentang tradisi yang berbeda, dan kemampuan untuk mempertanyakan asumsi-asumsi budaya diri sendiri secara kritis. Banks dan Banks (2010, hlm. 22) menyebut dimensi ini sebagai equity pedagogy orientation, orientasi pedagogis yang berpijak pada keyakinan bahwa setiap siswa, terlepas dari latar belakangnya, memiliki potensi yang sama untuk belajar dan berkembang.

Ketiga adalah dimensi praktis-keterampilan, yaitu kemampuan menerjemahkan pengetahuan dan sikap multikultural ke dalam praktik pembelajaran yang konkret. Ini meliputi kemampuan merancang kurikulum yang inklusif, memilih bahan ajar yang merepresentasikan

keberagaman, menggunakan metode pembelajaran yang responsif terhadap perbedaan gaya belajar dan latar belakang budaya, serta menciptakan iklim kelas yang aman dan nyaman bagi semua siswa.

Dalam tradisi keilmuan Islam, fondasi epistemologis bagi kompetensi multikultural ini sebenarnya sudah sangat kuat. Konsep ta'aruf yang diabadikan dalam Surat al-Hujurat ayat 13, "wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal", adalah perintah teologis untuk mengembangkan kompetensi multikultural. Dalam konteks ini, seorang guru PAI yang tidak memiliki kompetensi multikultural sesungguhnya belum sepenuhnya mengamalkan ajaran al-Quran yang diajarkannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2020, hlm. 132) menunjukkan bahwa guru PAI yang memiliki kompetensi multikultural tinggi cenderung menggunakan pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran, menghubungkan materi agama dengan konteks sosial-budaya yang relevan, dan lebih mampu memediasi konflik nilai di antara siswa. Sebaliknya, guru yang rendah kompetensi multikulturalnya cenderung mengajarkan agama secara deduktif dan normatif, dengan sedikit ruang bagi dialog dan eksplorasi kritis.

Untuk mengembangkan kompetensi multikultural, Rahmat (2019, hlm. 85) merekomendasikan tiga strategi utama. Pertama, pelatihan intensif tentang pendidikan multikultural yang mengintegrasikan teori dan praktik. Kedua, refleksi diri yang berkelanjutan tentang bias dan asumsi budaya yang mungkin tanpa sadar terbawa ke dalam praktik mengajar. Ketiga, keterlibatan langsung dengan komunitas-komunitas yang berbeda dari latar belakang sendiri, karena kompetensi multikultural tidak bisa sepenuhnya diperoleh hanya dari buku.

Dalam konteks kelembagaan, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai institusi yang mencetak guru PAI perlu secara serius mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum pembentukan guru. Saat ini, sebagian besar LPTK masih memperlakukan multikultural sebagai mata kuliah tambahan yang berdiri sendiri, alih-alih mengintegrasikannya sebagai perspektif yang mewarnai seluruh kurikulum. Perubahan paradigma ini mendesak dilakukan, mengingat tantangan Indonesia sebagai negara dengan keberagaman terbesar di dunia.

Kompetensi multikultural juga menuntut penguasaan apa yang oleh Nieto (2010, hlm. 12) disebut sebagai critical multicultural competence, yaitu kemampuan tidak hanya untuk menghargai perbedaan, tetapi juga untuk secara kritis mengidentifikasi dan menantang struktur-struktur ketidakadilan yang berbasis perbedaan. Dalam konteks Indonesia, ini berarti guru PAI perlu mampu mendiskusikan isu-isu seperti diskriminasi berbasis agama, marginalisasi kelompok minoritas, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya pendidikan secara produktif dan konstruktif di ruang kelas.

C. Etika dan Profesionalisme Guru dalam Masyarakat Majemuk

Profesionalisme guru bukanlah semata-mata soal penguasaan materi ajar atau keterampilan pedagogis teknis. Dalam masyarakat majemuk, profesionalisme guru, terutama guru PAI, memuat dimensi etis yang kompleks dan seringkali menuntut navigasi di antara nilai-nilai yang saling bersaing. Bagaimana seorang guru PAI memposisikan diri ketika ada konflik antara doktrin agama yang diajarkan dan kebutuhan untuk menghormati keyakinan siswa yang berbeda? Bagaimana guru merespons ketika ada siswa yang mempertanyakan ajaran agama dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara tradisional dianggap tabu?

Etika profesional guru dalam masyarakat majemuk secara fundamental bertumpu pada dua prinsip yang saling melengkapi: komitmen terhadap kejujuran intelektual dan komitmen terhadap penghormatan terhadap martabat setiap siswa. Komitmen terhadap kejujuran intelektual berarti guru tidak menyederhanakan kompleksitas isu-isu keagamaan demi menghindari kontroversi, tetapi juga tidak mengeksploitasi otoritasnya untuk menanamkan pandangan tertentu secara dogmatis. Komitmen terhadap martabat siswa berarti guru memastikan bahwa ruang kelas adalah ruang yang aman bagi semua orang, termasuk mereka yang pandangan keagamaannya berbeda dari mayoritas.

Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulum al-Din* merumuskan etika guru dengan sangat indah ketika ia menyatakan bahwa seorang pendidik hendaknya bersikap seperti ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya, yaitu mendahulukan kepentingan dan perkembangan murid di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok (Hasan & Anam, 2024, hlm. 35). Prinsip ini, jika diaplikasikan dalam konteks masyarakat majemuk, mengimplikasikan bahwa guru PAI harus mampu melampaui identitas kelompok dan sektarian untuk melayani setiap siswa secara adil dan inklusif.

Kode etik guru yang dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menegaskan bahwa guru berkewajiban menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan mendorong perkembangan optimal setiap siswa. Dalam konteks pendidikan multikultural, kewajiban ini mengandung implikasi konkret: guru tidak boleh membiarkan, apalagi memperkuat, stereotip dan prasangka yang berbasis perbedaan agama, etnis, atau budaya. Ketika seorang guru membiarkan perundungan berbasis identitas di kelasnya tanpa intervensi, ia bukan hanya gagal dalam tugas profesionalnya, tetapi juga menyumbang pada reproduksi intoleransi.

Aqib (2009, hlm. 47) menyoroti pentingnya apa yang disebutnya sebagai etika dialogis dalam praktik mengajar, yaitu kemampuan guru untuk menciptakan ruang dialog yang benar-benar terbuka di mana berbagai perspektif diundang dan dihargai. Etika dialogis ini mensyaratkan bahwa guru tidak masuk ke ruang kelas dengan agenda untuk memenangkan argumen atau membenarkan satu perspektif tertentu, melainkan dengan komitmen untuk bersama-sama mencari kebenaran melalui proses yang jujur dan penuh hormat.

Di sisi lain, profesionalisme guru dalam masyarakat majemuk juga berarti kemampuan untuk mengelola diri dan emosi dengan matang ketika menghadapi konten-konten yang sensitif. Guru PAI seringkali berhadapan dengan isu-isu yang berpotensi memicu ketegangan: perbedaan pendapat tentang fikih, persoalan hubungan antaragama, isu radikalisme dan terorisme yang kerap dikaitkan dengan Islam, hingga pertanyaan-pertanyaan kritis tentang relevansi ajaran agama di era modern. Kemampuan untuk menavigasi semua ini dengan tetap menjaga integritas intelektual dan ketenangan emosional adalah tanda profesionalisme yang tinggi.

Isu profesionalisme juga berkaitan dengan hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat. Dalam masyarakat majemuk, guru PAI perlu membangun kepercayaan bukan hanya dengan siswa dan sesama guru, tetapi juga dengan komunitas yang lebih luas, termasuk komunitas yang mungkin memiliki keyakinan berbeda. Ini menuntut kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik, kepekaan terhadap dinamika sosial setempat, dan kesiapan untuk mendengarkan dan belajar dari komunitas.

Muhaimin (2015, hlm. 78) menegaskan bahwa profesionalisme guru PAI dalam konteks Indonesia yang multikultural menuntut penguasaan apa yang ia sebut sebagai wawasan kebangsaan yang integral, yaitu pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila,

Bhinneka Tunggal Ika, dan konstitusi sebagai kerangka normatif hidup berbangsa. Guru yang tidak memahami atau tidak berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan ini akan sulit menjalankan fungsi pendidikan yang memperkuat kohesi sosial.

D. Pendidik PAI sebagai Agen Perdamaian (Peace Builder)

Konsep pendidik sebagai agen perdamaian atau peace builder berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen terpenting dalam membangun budaya perdamaian jangka panjang. UNESCO dalam Deklarasi Seville tahun 1989 secara tegas menyatakan bahwa perang dan kekerasan bukan takdir biologis manusia, melainkan produk konstruksi sosial yang bisa diubah melalui pendidikan. Jika kekerasan bisa dipelajari, maka perdamaian pun bisa diajarkan.

Dalam khazanah Islam, konsep rahmatan lil 'alamin, kasih sayang bagi seluruh alam semesta, yang menjadi misi utama Nabi Muhammad SAW adalah fondasi teologis yang paling kuat bagi pendidikan perdamaian. Hadis Bukhari nomor 6065 yang berbunyi "Jangan saling membenci, jangan iri satu sama lain, jangan mencari keburukan satu sama lain, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara" (Rosyidin et al., 2025) adalah panduan moral yang sangat relevan bagi pendidik PAI dalam menjalankan misinya sebagai agen perdamaian.

Galtung (1969, hlm. 183) membedakan antara negative peace, yakni ketiadaan perang dan konflik terbuka, dan positive peace, yakni kehadiran keadilan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Guru PAI sebagai agen perdamaian tidak cukup hanya berkontribusi pada negative peace dengan mencegah konflik di sekolah; ia harus bekerja menuju positive peace dengan aktif membangun kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan setiap individu berkembang secara optimal tanpa hambatan diskriminasi.

Dalam praktik keseharian, fungsi guru PAI sebagai peace builder dapat diekspresikan melalui berbagai pendekatan. Pertama, melalui apa yang Freire (1967, hlm. 88) sebut sebagai pedagogy of dialogue, yakni pedagogi yang menempatkan dialog sebagai inti proses pembelajaran. Dalam pedagogi dialogis, guru bukan lagi sumber pengetahuan tunggal yang mentransfer informasi ke siswa yang pasif, melainkan fasilitator yang membimbing siswa untuk bersama-sama mengkonstruksi pemahaman melalui pertukaran perspektif yang saling menghargai.

Kedua, melalui pendekatan conflict transformation, transformasi konflik. Dalam masyarakat yang plural, konflik adalah keniscayaan; yang perlu dihindari bukan konfliknya, melainkan eskalasi konflik menjadi kekerasan. Guru PAI yang terampil dalam transformasi konflik mampu menggunakan momen-momen ketegangan di kelas sebagai peluang pembelajaran: mengidentifikasi sumber konflik, memfasilitasi pemahaman tentang perspektif yang berbeda, dan membimbing siswa menuju resolusi yang konstruktif.

Ketiga, melalui pengembangan apa yang Bar-Tal (2002, hlm. 30) sebut sebagai ethos of peace, yaitu etos perdamaian. Etos perdamaian adalah seperangkat keyakinan, sikap, dan nilai yang mendukung kehidupan damai, termasuk keyakinan tentang kemungkinan perdamaian, orientasi positif terhadap pihak lain, komitmen terhadap resolusi konflik secara damai, dan nilai-nilai toleransi serta demokrasi. Guru PAI yang berhasil menanamkan etos perdamaian ini pada siswa sedang melakukan investasi jangka panjang yang dampaknya jauh melampaui masa sekolah.

Contoh konkret dari peran guru PAI sebagai agen perdamaian dapat dilihat dalam pengalaman pesantren-pesantren besar Indonesia dalam menghadapi tantangan radikalisme. Ketika kelompok-kelompok radikal mencoba merekrut santri dengan narasi-narasi yang menghasut kebencian, guru dan kiai di pesantren-pesantren moderat

merespons bukan dengan melarang atau merepresi, melainkan dengan memperkuat pendidikan kritis yang mengajarkan siswa untuk menganalisis secara jernih berbagai klaim dan narasi keagamaan (Azra, 1999, hlm. 210; Dhofier, 2011, hlm. 97).

Guru PAI sebagai agen perdamaian juga dituntut untuk mampu membangun jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh lintas agama, lembaga-lembaga sipil, dan komunitas-komunitas lokal. Perdamaian adalah proyek kolektif yang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Guru yang aktif terlibat dalam forum-forum dialog antaragama, yang menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh dari berbagai tradisi keagamaan, dan yang membawa dimensi-dimensi dialog itu ke dalam kelas sedang menjalankan fungsi perdamaian yang paling nyata dan konkret.

Dalam konteks Indonesia yang sedang menghadapi berbagai tantangan identitas, termasuk meningkatnya polarisasi politik berbasis agama, peran guru PAI sebagai agen perdamaian semakin urgen. Data Wahid Institute (2022, hlm. 14) menunjukkan bahwa sikap intoleransi di kalangan pelajar masih cukup tinggi, dan sekolah seringkali menjadi arena di mana intoleransi itu direproduksi daripada dilawan. Dalam konteks ini, guru PAI yang proaktif membangun budaya perdamaian di sekolah bukan hanya menjalankan tugas profesionalnya, tetapi juga berkontribusi pada keberlangsungan demokrasi dan keutuhan bangsa.

E. Transformasi Sosial melalui Pendidikan Agama Islam

Ide bahwa pendidikan adalah kendaraan transformasi sosial bukanlah gagasan baru. Dari John Dewey yang melihat sekolah sebagai miniatur masyarakat ideal, hingga Paulo Freire yang memandang pendidikan sebagai praksis pembebasan, tradisi pemikiran pendidikan progresif secara konsisten menempatkan pendidikan pada posisi sentral dalam perubahan sosial. Dalam tradisi Islam,

visi transformatif pendidikan ini berakar pada prinsip islah, perbaikan dan pembaruan, yang menjadi salah satu misi pokok para nabi dan ulama.

Pendidikan Agama Islam yang transformatif berbeda secara mendasar dari PAI yang bersifat konservatif-reproduktif. PAI reproduktif bertujuan untuk mentransmisikan ajaran dan nilai-nilai yang sudah ada kepada generasi berikutnya, dengan asumsi bahwa nilai-nilai itu sudah final dan tidak perlu dipertanyakan. PAI transformatif, sebaliknya, bertujuan tidak hanya untuk mentransmisikan warisan, tetapi juga untuk mengembangkan kapasitas kritis siswa guna memahami, mengevaluasi, dan memperbarui penerapan nilai-nilai agama dalam konteks yang terus berubah (Freire, 1967, hlm. 68; Banks & Banks, 2010, hlm. 21).

Dalam praktiknya, transformasi sosial melalui PAI dapat berlangsung melalui beberapa mekanisme yang saling terkait. Pertama, melalui *critical consciousness raising*, peningkatan kesadaran kritis, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Freire (1967, hlm. 35) dengan istilah *conscientizacao*. Guru PAI yang menerapkan pendekatan ini mendorong siswa untuk tidak hanya menerima realitas sosial sebagaimana adanya, tetapi untuk bertanya: mengapa dunia seperti ini? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Apa yang bisa dilakukan untuk membuat dunia lebih adil? Pertanyaan-pertanyaan ini, ketika dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam seperti prinsip 'adl (keadilan), musawah (kesetaraan), dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan), menghasilkan motivasi moral yang kuat untuk bertindak.

Kedua, melalui pemberdayaan *agency* siswa, yaitu kemampuan siswa untuk bertindak sebagai subjek perubahan, bukan hanya objek perubahan. Guru PAI yang transformatif tidak hanya mengajarkan nilai-nilai, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan untuk menerapkan nilai-nilai itu dalam konteks nyata:

keterampilan advokasi, kepemimpinan komunitas, resolusi konflik, dan komunikasi lintas budaya. Siswa yang memiliki agency kuat tidak hanya tahu apa yang seharusnya, tetapi tahu bagaimana bertindak untuk mewujudkan apa yang seharusnya itu.

Ketiga, melalui pembangunan komunitas belajar yang demokratis di dalam kelas itu sendiri. Kelas adalah masyarakat kecil. Cara sebuah kelas diorganisir, siapa yang boleh berbicara, pandangan siapa yang dihargai, bagaimana keputusan dibuat, semuanya mengajarkan pelajaran yang sangat nyata tentang demokrasi dan keadilan sosial. Guru PAI yang menciptakan kelas sebagai komunitas yang egaliter dan demokratis sedang secara langsung mendemonstrasikan alternatif terhadap struktur sosial yang hierarkis dan eksklusif.

Konsep pendidikan transformatif dalam konteks Islam sangat erat kaitannya dengan tradisi *ihya al-'ulum*, menghidupkan ilmu pengetahuan, yang dipopulerkan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu yang tidak mengubah sikap dan perilaku pemiliknya adalah ilmu yang mati (Hasan & Anam, 2024, hlm. 40). Dalam konteks pendidikan multikultural, ilmu agama yang tidak menghasilkan sikap yang lebih toleran, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih berani memperjuangkan keadilan adalah ilmu yang belum sepenuhnya dihidupi.

Untuk mewujudkan transformasi sosial yang nyata, guru PAI perlu mengembangkan apa yang Muhaimin (2015, hlm. 92) sebut sebagai *civic piety*, kesalehan sipil, yaitu ekspresi keimanan yang tidak hanya berdimensi vertikal (hubungan dengan Tuhan) tetapi juga berdimensi horizontal (tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan). Guru yang mengajarkan bahwa sholat lima waktu sempurna tetapi tidak punya kepedulian terhadap tetangga yang kelaparan belum mengajarkan Islam secara utuh.

Dimensi transformasi sosial yang seringkali diabaikan adalah dimensi ekologis. Islam secara tegas

mengajarkan konsep khalifah, manusia sebagai pengemban amanah untuk menjaga dan merawat bumi. Guru PAI yang mengintegrasikan kesadaran ekologis ke dalam pendidikannya sedang melakukan transformasi sosial yang penting: mengubah persepsi siswa tentang hubungan manusia dengan alam dari hubungan eksploitasi menjadi hubungan tanggung jawab dan kepedulian.

Masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan juga tidak bisa dilepaskan dari wacana transformasi sosial melalui PAI. Islam memiliki sistem distribusi kekayaan yang sangat canggih, mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang jika diimplementasikan secara optimal memiliki potensi transformatif yang luar biasa. Guru PAI yang mengajarkan instrumen-instrumen sosial-ekonomi Islam ini tidak hanya sebagai kewajiban ritual tetapi sebagai instrumen keadilan sosial yang konkret sedang menanamkan visi transformatif yang kuat.

Transformasi sosial melalui PAI juga menuntut kesadaran akan posisionalitas, yaitu pemahaman tentang bagaimana posisi sosial seseorang, baik kelas, gender, etnisitas, maupun agama, membentuk perspektif dan pengalaman hidupnya. Guru PAI yang mengakui dan merefleksikan posisionalitasnya sendiri, yang sensitif terhadap bagaimana posisi sosial yang berbeda menghasilkan pengalaman berbeda, akan jauh lebih efektif dalam menciptakan pembelajaran yang benar-benar inklusif dan transformatif.

Pada akhirnya, transformasi sosial melalui PAI adalah proyek yang tidak mungkin diselesaikan dalam satu generasi. Ia adalah komitmen jangka panjang terhadap proses yang tidak pernah benar-benar selesai, yaitu proses mewujudkan masyarakat yang lebih adil, lebih damai, dan lebih memanusiakan manusia. Guru PAI yang sadar akan dimensi ini tidak akan merasa frustrasi ketika perubahan tidak terjadi secara instan; ia memahami bahwa ia adalah bagian dari rantai panjang transformasi yang dimulai oleh

para nabi, dilanjutkan oleh para ulama, dan kini ada di tangannya untuk diteruskan kepada generasi berikutnya.

Bab ini telah mengurai secara mendalam lima dimensi peran pendidik PAI dalam masyarakat majemuk: sebagai teladan nilai moderasi dan toleransi; sebagai pendidik berkompentensi multikultural; sebagai profesional yang beretika; sebagai agen perdamaian; dan sebagai katalis transformasi sosial. Kelima dimensi ini bukanlah peran yang terpisah-pisah, melainkan aspek-aspek dari satu profil pendidik yang utuh dan menyeluruh.

Yang menjadi benang merah dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa pendidik PAI yang ideal bukan hanya seseorang yang menguasai materi agama secara mendalam, tetapi seseorang yang telah menginternalisasi nilai-nilai agama itu dalam seluruh aspek kepribadian dan praktik profesionalnya. Seperti yang dicontohkan oleh para kiai pesantren dalam tradisi pendidikan Islam Indonesia yang panjang, dari Sunan Ampel hingga KH. Hasyim Asy'ari hingga Gus Dur, guru PAI yang terbaik adalah mereka yang hidupnya sendiri adalah kurikulum (Rosyidin, Khoir, & Maskuri, 2025, hlm. 18).

Dalam konteks Indonesia yang sedang menghadapi berbagai tantangan kebangsaan, mulai dari polarisasi, intoleransi, radikalisme, hingga degradasi nilai-nilai gotong royong, peran guru PAI sebagai agen perdamaian dan transformasi sosial bukan sekadar tugas profesional, melainkan panggilan moral dan spiritual yang mendesak. Indonesia membutuhkan lebih banyak guru PAI yang mampu menjadi penjahit persatuan di tengah keberagaman, penjaga nilai di tengah disrupsi, dan pembangun harapan di tengah berbagai keputusan.

BAB 10

Pengembangan Pendidikan Agama Islam Multikultural di Indonesia

Indonesia adalah laboratorium keberagaman terbesar di dunia. Lebih dari tiga ratus kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, enam agama yang diakui negara, dan ribuan tradisi lokal yang hidup berdampingan menjadikan Indonesia sebagai entitas kebangsaan yang tidak adaandingannya dalam hal kompleksitas sosial-budaya. Di tengah realitas ini, Pendidikan Agama Islam (PAI) mengemban misi ganda yang tidak mudah: menanamkan keimanan yang kokoh sekaligus membangun kesadaran multikultural yang sejati pada generasi muda.

Pengembangan PAI multikultural bukan sekadar agenda akademis. Ia adalah kebutuhan kebangsaan yang mendesak, mengingat berbagai survei dan laporan menunjukkan adanya tren meningkatnya intoleransi di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir (Wahid Institute, 2022, hlm. 8; PPIM UIN Jakarta, 2021, hlm. 14). Situasi ini menuntut respons yang tidak sekadar reaktif, melainkan sistemik dan transformatif, mulai dari kebijakan pendidikan nasional, praktik pembelajaran di kelas, sinergi dengan kearifan lokal, hingga pemetaan tantangan dan arah pengembangan ke depan.

Bab ini mendiskusikan keempat aspek tersebut secara terintegrasi. Bagian pertama mengulas lanskap kebijakan PAI dan multikulturalisme di Indonesia, termasuk berbagai regulasi dan program yang telah ada. Bagian kedua menyajikan best practices PAI multikultural dari berbagai lembaga pendidikan. Bagian ketiga mengeksplorasi sinergi antara PAI dan kearifan lokal sebagai sumber daya kultural yang selama ini kurang dioptimalkan. Bagian keempat

mengidentifikasi tantangan-tantangan utama sekaligus merumuskan arah pengembangan PAI multikultural yang realistis dan visioner.

A. Kebijakan Pendidikan Agama Islam dan Multikulturalisme di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia secara konstitusional berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan bahwa negara wajib menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dari fondasi konstitusional ini, berbagai regulasi turunan telah dibangun untuk mengoperasionalkan visi pendidikan nasional yang inklusif dan multikultural.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara eksplisit menetapkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3). Tujuan ini secara inheren mengandung dimensi multikultural: manusia demokratis yang bertanggung jawab tidak mungkin terbentuk tanpa apresiasi terhadap keberagaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan memberikan landasan hukum yang lebih spesifik bagi penyelenggaraan PAI. Regulasi ini menegaskan bahwa pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi, minat, bakat, dan kecerdasan peserta didik (Pasal 5 ayat 2). Kata kunci interaktif dan menantang dalam regulasi ini membuka ruang bagi pendekatan multikultural yang dialogis dan kritis.

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui berbagai program strategisnya telah menunjukkan komitmen nyata terhadap PAI yang berwawasan multikultural. Program

Moderasi Beragama yang diluncurkan pada tahun 2019 sebagai agenda nasional menetapkan empat indikator utama moderasi beragama yang harus menjadi orientasi seluruh aktivitas keagamaan, termasuk pendidikan: komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, toleransi, dan penghargaan terhadap tradisi lokal (Kemenag RI, 2019, hlm. 43). Program ini secara operasional kemudian diterjemahkan ke dalam kurikulum PAI melalui berbagai revisi buku teks dan pelatihan guru.

Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada tahun 2022 membawa angin segar bagi pengembangan PAI multikultural. Melalui konsep Profil Pelajar Pancasila, Kurikulum Merdeka menetapkan enam dimensi kompetensi yang diharapkan dari setiap lulusan: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Dimensi berkebinekaan global secara langsung menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional menghendaki terbentuknya warga negara yang mampu menghargai perbedaan dan berkolaborasi secara lintas budaya (Kemendikbudristek, 2022, hlm. 10).

Pada level implementasi, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengintegrasikan wawasan multikultural ke dalam standar kompetensi guru PAI. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah menetapkan bahwa guru PAI wajib memiliki kompetensi kepribadian yang islami, sosial, pedagogik, dan profesional, dengan salah satu indikator kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang (Arifin, 2012, hlm. 78).

Muhaimin (2015, hlm. 45) mencatat bahwa kebijakan PAI di Indonesia mengalami evolusi yang signifikan dalam tiga dekade terakhir. Dari orientasi yang semula sangat normatif-doktrinal, kebijakan PAI secara bertahap bergeser ke arah yang lebih integratif dan kontekstual. Pergeseran ini tampak nyata dalam berbagai revisi kurikulum, mulai dari Kurikulum 1994 yang masih sangat berorientasi pada

penguasaan materi, hingga Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka yang lebih menekankan pada pembentukan karakter dan kompetensi hidup.

Namun demikian, terdapat sejumlah celah dalam kebijakan yang perlu dicermati secara kritis. Azra (2014, hlm. 112) mengidentifikasi bahwa kebijakan multikulturalisme dalam pendidikan Indonesia seringkali bersifat top-down dan tidak cukup mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan komunitas lokal. Akibatnya, kebijakan yang tampak inklusif di atas kertas seringkali gagal diimplementasikan secara bermakna di tingkat sekolah dan kelas. Selain itu, masih terdapat fragmentasi antara kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di satu sisi, dengan kebijakan Kementerian Agama di sisi lain, yang mengakibatkan inkonsistensi dalam pelaksanaan PAI multikultural di lapangan.

Dari perspektif anggaran, Tilaar (2004, hlm. 157) mencatat bahwa salah satu hambatan terbesar implementasi kebijakan pendidikan multikultural di Indonesia adalah minimnya alokasi sumber daya untuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan pengadaan bahan ajar yang benar-benar mencerminkan keberagaman Indonesia. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan multikultural yang ambisius akan tetap menjadi sekadar retorika.

B. Praktik Baik (Best Practices) PAI Multikultural di Berbagai Lembaga

Di tengah berbagai keterbatasan kebijakan dan sumber daya, sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia telah berhasil mengembangkan praktik PAI multikultural yang inspiratif. Praktik-praktik ini layak didokumentasikan, dianalisis, dan disebarluaskan sebagai best practices yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan PAI multikultural secara lebih luas.

Pesantren-pesantren besar Indonesia, terutama yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), telah lama mengembangkan model pendidikan yang secara inheren multikultural. Pesantren Tebuireng di Jombang, misalnya,

merupakan salah satu lembaga yang berhasil memadukan tradisi keilmuan Islam klasik dengan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai pluralisme. KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Pesantren Tebuireng sekaligus pendiri NU, dengan tegas membangun tradisi keislaman yang menghargai tradisi lokal dan berdialog dengan berbagai perspektif (Dhofier, 2011, hlm. 62).

Model pesantren yang menonjol dalam konteks pendidikan multikultural adalah pesantren dengan sistem boarding school yang menggabungkan kurikulum pesantren dengan kurikulum sekolah formal. Pesantren model ini memungkinkan santri dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan bahkan agama untuk hidup bersama, saling belajar, dan mengembangkan apresiasi terhadap perbedaan melalui pengalaman sehari-hari yang kaya dan kontekstual.

Di tingkat sekolah formal, sejumlah sekolah di Indonesia telah mengimplementasikan PAI multikultural dengan cara yang kreatif dan inovatif. Suradi (2018, hlm. 112) mendokumentasikan pengalaman beberapa sekolah di Kalimantan Tengah yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai adat Dayak ke dalam pembelajaran PAI, menciptakan ruang pertemuan yang produktif antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Melalui pendekatan ini, siswa tidak dipaksa memilih antara identitas keislaman dan identitas kultural mereka, tetapi dibimbing untuk menemukan harmoni di antara keduanya.

Sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Muhammadiyah juga telah mengembangkan beberapa model best practice yang menarik. Program Islamic Studies berbasis proyek yang dikembangkan di beberapa sekolah Muhammadiyah mendorong siswa untuk mengkaji isu-isu sosial kontemporer, seperti kemiskinan, ketidakadilan gender, dan kerusakan lingkungan, dari perspektif nilai-nilai Islam yang inklusif. Pendekatan ini berhasil menghubungkan ajaran agama dengan realitas sosial yang dihadapi siswa secara langsung (Rahmat, 2019, hlm. 95).

Universitas Islam Negeri (UIN) sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam juga memainkan peran

penting dalam mengembangkan model PAI multikultural. Program studi Pendidikan Agama Islam di berbagai UIN kini semakin banyak yang mengintegrasikan mata kuliah tentang pluralisme, dialog antaragama, dan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum pembentukan calon guru PAI. Perguruan tinggi ini juga menjadi inkubator riset tentang PAI multikultural yang secara langsung berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik di lapangan (Abdullah, 2020, hlm. 145).

Salah satu best practice yang paling konsisten dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia adalah tradisi pesantren dalam mengembangkan apa yang Dhofier (2011, hlm. 87) sebut sebagai kultur tabayyun, klarifikasi dan verifikasi, sebelum mengambil sikap terhadap isu yang berpotensi kontroversial. Dalam tradisi ini, santri dididik untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menghasut, melainkan untuk terlebih dahulu mencari kebenaran melalui kajian yang mendalam dan objektif. Kultur tabayyun ini sangat relevan di era informasi yang diwarnai oleh hoaks dan disinformasi yang seringkali berbasis sentimen keagamaan.

Di tingkat komunitas, Majelis Taklim telah terbukti menjadi wadah pendidikan agama informal yang efektif dalam membangun kohesi sosial dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Majelis Taklim yang dikelola dengan baik mampu menjadi ruang pertemuan lintas generasi, lintas kelas sosial, dan bahkan lintas etnis yang secara organik mengembangkan pemahaman keagamaan yang inklusif (Arifin, 2012, hlm. 167).

Program Pesantren Kilat yang diintegrasikan ke dalam kegiatan sekolah selama Ramadan juga memiliki potensi besar sebagai media PAI multikultural, meski potensi ini seringkali belum dimanfaatkan secara optimal. Ketika program pesantren kilat dirancang tidak hanya sebagai kegiatan ritual tetapi sebagai pengalaman belajar yang kaya dan dialogis, ia bisa menjadi ruang transformatif yang bermakna bagi pembentukan karakter multikultural peserta didik.

C. Sinergi PAI dengan Kearifan Lokal dan Nilai Kebangsaan

Salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki pendidikan Islam di Indonesia dan yang seringkali belum dimanfaatkan secara optimal adalah warisan kearifan lokal yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Dari filosofi menyama braya di Bali yang menekankan kesetaraan dan persaudaraan, hingga konsep dalihan na tolu di tanah Batak yang mengatur tata hubungan sosial berdasarkan prinsip keseimbangan dan saling menghormati, kearifan lokal Nusantara menyimpan sumber daya nilai yang sangat kaya untuk diintegrasikan ke dalam PAI multikultural.

Konsep gotong royong sebagai filosofi hidup bersama yang telah mengakar kuat dalam budaya Indonesia adalah salah satu titik temu yang paling potensial antara nilai kebudayaan Indonesia dan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, prinsip ta'awun (saling menolong) dan ukhuwah (persaudaraan) adalah nilai-nilai yang sangat sentral. Ketika guru PAI mampu menunjukkan kepada siswa bahwa gotong royong adalah manifestasi konkret dari ta'awun dan ukhuwah dalam konteks budaya Indonesia, ia sedang membangun jembatan yang sangat kokoh antara iman dan budaya (Tilaar, 2004, hlm. 88).

Tradisi pesantren dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam pendidikan Islam telah berlangsung selama berabad-abad. Walisongo, para penyebar Islam di Nusantara pada abad ke-15 dan ke-16, adalah contoh paling monumental dari pendekatan ini. Mereka tidak membuang tradisi budaya lokal, melainkan mentransformasikannya dari dalam dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam wadah budaya yang sudah dikenal dan dihargai oleh masyarakat (Azra, 1999, hlm. 34; Dhofier, 2011, hlm. 28). Strategi ini yang dalam antropologi budaya disebut sebagai inkulturasi terbukti jauh lebih efektif daripada pendekatan konfrontatif yang menolak tradisi lokal sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam.

Dalam konteks nilai kebangsaan, sinergi antara PAI dan Pancasila perlu dibangun secara lebih sistematis dan substantif. Muhaimin (2015, hlm. 102) berpendapat bahwa

Pancasila sesungguhnya adalah common ground yang paling autentik bagi pendidikan multikultural di Indonesia, karena ia lahir dari dialog panjang antara berbagai kelompok yang mewakili keberagaman Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memiliki resonansi yang sangat kuat dengan nilai-nilai inti Islam tentang tauhid dan rahmatan lil 'alamin.

Sinergi antara PAI dan nilai kebangsaan juga bisa dibangun melalui kajian sejarah yang lebih kritis dan inklusif. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah sejarah kolaborasi lintas agama, etnis, dan ideologi yang luar biasa. Tokoh-tokoh seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, W.R. Supratman, I Gusti Ngurah Rai, dan Pattimura adalah representasi dari keberagaman Indonesia yang bersatu dalam cita-cita kemerdekaan. Guru PAI yang mampu menghadirkan kisah-kisah kepahlawanan lintas identitas ini ke dalam pembelajaran akan memberikan inspirasi yang kuat tentang kekuatan keberagaman sebagai aset nasional.

Kearifan lokal juga dapat menjadi sumber daya penting dalam mengajarkan resolusi konflik. Berbagai budaya Nusantara memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang sangat kaya, seperti musyawarah mufakat dalam tradisi Minangkabau, rembug desa dalam tradisi Jawa, dan peusijek dalam tradisi Aceh. Mekanisme-mekanisme ini, yang secara substantif selaras dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam, bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran PAI sebagai contoh konkret dari penerapan nilai Islam dalam konteks budaya Indonesia yang otentik (Suradi, 2018, hlm. 134).

Salah satu tantangan terbesar dalam membangun sinergi antara PAI dan kearifan lokal adalah adanya pandangan yang menempatkan tradisi lokal sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemurnian ajaran Islam. Pandangan ini, yang seringkali lahir dari pemahaman agama yang sempit dan kurang kontekstual, berpotensi memutus hubungan antara generasi muda Muslim dengan warisan budaya mereka sendiri. Guru PAI perlu memiliki kemampuan untuk menavigasi ketegangan ini secara bijak, dengan

menunjukkan bahwa Islam pada hakikatnya bersifat akomodatif terhadap keanekaragaman budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dan etika universal.

Rahmat (2019, hlm. 110) merekomendasikan pendekatan etnopedagogi Islam sebagai kerangka metodologis untuk membangun sinergi ini. Etnopedagogi Islam adalah pendekatan pembelajaran yang secara sadar mengintegrasikan kearifan budaya lokal sebagai konteks, contoh, dan medium dalam menyampaikan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan ini, pembelajaran PAI tidak lagi terasa asing dan abstrak, melainkan membumi dan relevan dengan pengalaman hidup peserta didik sehari-hari.

D. Tantangan dan Arah Pengembangan PAI Multikultural ke Depan

Meski berbagai kemajuan telah dicapai, pengembangan PAI multikultural di Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan struktural yang berat dan kompleks. Memahami tantangan-tantangan ini secara jernih adalah prasyarat untuk merumuskan arah pengembangan yang realistis dan efektif.

Tantangan pertama adalah fragmentasi dan inkonsistensi dalam implementasi. PAI multikultural di Indonesia masih sangat bergantung pada inisiatif dan komitmen individual guru dan kepala sekolah, bukan pada sistem yang terlembaga dengan baik. Akibatnya, kualitas PAI multikultural sangat bervariasi antar sekolah, antar daerah, bahkan antar guru dalam satu sekolah yang sama. Tanpa sistem penjaminan mutu yang memadai, perkembangan PAI multikultural akan terus bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan (PPIM UIN Jakarta, 2021, hlm. 42).

Tantangan kedua adalah penetrasi narasi-narasi intoleran melalui media digital. Perkembangan teknologi informasi, meski membuka peluang besar bagi pendidikan, juga menghadirkan risiko serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konten intoleran dan ekstremis sangat mudah diakses oleh remaja melalui media sosial, dan

seringkali lebih menarik secara presentasi dibandingkan konten pendidikan yang formal (Wahid Institute, 2022, hlm. 22). Guru PAI dituntut untuk tidak hanya bersaing, tetapi juga menghadirkan narasi moderasi yang sama menariknya secara digital.

Tantangan ketiga adalah kesenjangan antara pengetahuan dan sikap. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kognitif tentang toleransi dan multikulturalisme tidak otomatis berkorelasi dengan sikap dan perilaku yang toleran. Seorang siswa bisa mendapat nilai sempurna dalam ujian tentang toleransi, tetapi tetap menunjukkan sikap diskriminatif terhadap teman yang berbeda latar belakang. Ini mengindikasikan bahwa PAI multikultural tidak bisa hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, melainkan harus menyentuh dimensi afektif dan behavioral secara mendalam (Banks & Banks, 2010, hlm. 34).

Tantangan keempat adalah polarisasi sosial-politik yang semakin tajam. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami polarisasi yang cukup serius berbasis identitas agama, yang menempatkan PAI dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, PAI diharapkan menjadi penyeimbang narasi-narasi yang memecah belah. Di sisi lain, guru PAI sendiri seringkali terjebak dalam dinamika polarisasi yang mempengaruhi komunitas mereka. Dalam situasi ini, kemampuan guru PAI untuk mempertahankan netralitas kritis dan komitmen terhadap nilai-nilai moderasi menjadi semakin penting sekaligus semakin menantang.

Merespons tantangan-tantangan ini, beberapa arah pengembangan PAI multikultural ke depan perlu dipertimbangkan secara serius. Pertama, penguatan institutional framework yang menjamin kualitas dan konsistensi PAI multikultural. Ini mencakup pengembangan standar kompetensi guru PAI multikultural yang lebih spesifik, sistem penilaian yang mengukur tidak hanya pengetahuan kognitif tetapi juga sikap dan perilaku multikultural, serta mekanisme akuntabilitas yang mendorong sekolah untuk memprioritaskan PAI multikultural secara serius.

Kedua, transformasi model pelatihan guru. Program pendidikan guru PAI, baik pre-service maupun in-service, perlu secara mendasar mengintegrasikan pendidikan multikultural tidak hanya sebagai mata kuliah terpisah, tetapi sebagai perspektif yang mewarnai seluruh proses pendidikan. Guru yang belum mengalami sendiri pendidikan multikultural yang baik tidak akan mampu memberikannya kepada siswa. Dalam hal ini, transformative teacher education sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Nieto (2010, hlm. 78) adalah model yang perlu diadopsi secara lebih sistematis.

Ketiga, pengembangan kurikulum PAI yang responsif terhadap konteks lokal sekaligus relevan secara global. Kurikulum PAI perlu didesain dengan fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi terhadap keberagaman konteks sosial-budaya, sambil tetap mempertahankan inti nilai-nilai universal Islam. Pendekatan glocal yang memadukan orientasi global dan kepekaan lokal adalah arah yang paling menjanjikan dalam hal ini.

Keempat, pemanfaatan teknologi digital sebagai media PAI multikultural. Daripada bersikap defensif terhadap teknologi, PAI multikultural perlu secara proaktif memanfaatkan platform-platform digital untuk menyebarkan narasi moderasi dan toleransi yang menarik dan relevan bagi generasi muda. Pengembangan konten pendidikan digital yang berkualitas tinggi, kolaborasi dengan content creator muda yang memiliki orientasi moderat, dan pemanfaatan media sosial sebagai ruang dialog antaragama adalah beberapa strategi yang perlu dikembangkan secara lebih serius.

Kelima, penguatan riset dan basis data tentang PAI multikultural di Indonesia. Kebijakan dan praktik yang baik harus dibangun di atas data dan bukti yang kuat. Saat ini, riset tentang efektivitas berbagai pendekatan PAI multikultural di Indonesia masih sangat terbatas. Investasi dalam riset longitudinal yang mengukur dampak jangka panjang PAI multikultural terhadap pembentukan sikap dan perilaku toleran sangat diperlukan untuk memandu pengembangan kebijakan yang berbasis bukti.

Keenam, yang mungkin paling fundamental, adalah transformasi paradigma tentang hakikat PAI itu sendiri. Selama PAI masih dipandang semata-mata sebagai mata pelajaran untuk mentransmisikan pengetahuan dan praktik ritual keagamaan, pengembangan PAI multikultural akan selalu mengalami hambatan konseptual. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma yang menempatkan PAI sebagai wahana pembentukan manusia yang utuh, yaitu manusia yang beriman sekaligus berperikemanusiaan, yang saleh secara individual sekaligus bertanggung jawab secara sosial (Freire, 1967, hlm. 52; Abdullah, 2020, hlm. 198).

Pengembangan PAI multikultural di Indonesia adalah perjalanan panjang yang belum selesai. Berbagai capaian telah diraih, mulai dari kerangka kebijakan yang semakin inklusif, praktik-praktik inspiratif di berbagai lembaga, hingga kekayaan kearifan lokal yang menjadi sumber daya nilai yang tiada habisnya. Namun, tantangan-tantangan yang ada, dari fragmentasi implementasi, penetrasi narasi intoleran melalui media digital, hingga polarisasi sosial-politik, menuntut komitmen dan upaya yang lebih serius dan sistematis.

Kunci dari seluruh perjalanan ini adalah keyakinan bahwa Islam pada hakikatnya adalah agama yang merayakan keberagaman, bukan menolaknya. Firman Allah dalam Surat al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, adalah deklarasi teologis yang paling kuat tentang nilai multikulturalisme dalam Islam. PAI yang benar-benar menghayati nilai ini tidak akan menghasilkan generasi yang eksklusif dan intoleran, melainkan generasi yang terbuka, kritis, dan mampu menjadi penjaga perdamaian di tengah keberagaman yang kompleks.

Indonesia membutuhkan generasi Muslim yang mampu menjadi warga dunia yang berakarakter, yang berakar kuat dalam iman dan tradisi Islam yang autentik, sekaligus mampu bergaul, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam masyarakat global yang plural. PAI multikultural adalah investasi terpenting untuk mewujudkan cita-cita mulia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdilahYusup, A. Y. (2024). Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im: Menelaah Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Konteks Kehidupan Modern. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>
- Abdullah, M. A. (2020). Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin: Metode studi agama dan studi Islam di era kontemporer. IB Pustaka.
- Abdullah, M. A. (2020). Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin: Metode studi agama dan studi Islam di era kontemporer. IB Pustaka.
- Afida, I., Wahidah, N., & Permatasari, Y. D. (2025). Penguatan moderasi beragama dalam kurikulum PAI: Studi literatur terhadap tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 103-114.
- Afina, D. S., & Yuliani, E. (2024). Toleransi Antar Umata Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Dan Berbangsa Dalam Prespektif Islam Di Kalimantan Selatan. *Al Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(6), 2463–2472. <https://doi.org/https://doi.org/10.35931/alfurqan.v3i6>
- Agusta, G. E., Astriawati, N., Santosa, P. S., & Widyanto, H. (2025). Edukasi Bijak Bermedsos: Membangun Literasi Digital Untuk Santri Cerdas Dan Beretika. *Al Mu'azarah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 100-109.
- Akbar, A., & Muktar, M. (2023). Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: TinjauanRanah Kognitif, Afektif Dan Psikomotorik Di Sma Mta Surakarta. *NineStars Education*, 4(2), 149-157.
- Al Kahar, A. A. D. (2019). Pendidikan Inklusif Sebagai Gebrakan Solutif “Education for All”. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11(1), 45-66.
- Al-Farochi, M. N., & Masfufah. (2025). Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembentukan Sikap Toleransi. *Jurnal Kreatif*, 3(2), 366–377.
- Alfianur, Muhammad, Marsiah Marsiah, and Sri Hidayati. "Pengembangan Moderasi Beragama Siswa: Mengeksplor

- Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Sikap Intoleran di Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 9.2 (2024): 184-195.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-ta'ayush bayn al-muslimin wa ghayr al-muslimin*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Alvionita, I., HS, D. P. S., Rahmawati, E. S., Setywati, B. E., Kurniawan, K., & Indrawari, K. (2025). Analisis tantangan pengembangan bahan ajar buku PAI Kurikulum Merdeka pada kelas 5 SD. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 3(1), 15-20.
- Amalia, J., & Achadi, M. W. (2023). Analisis Kurikulum Merdeka Belajar Materi PAI pada Kelas 10 SMK Negeri 1 Depok Yogyakarta. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(1), 39-60.
- Amaliya, D. (2025). Kunci kedamaian dalam keberagaman. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 529-537.
- Amaliya, R., & Kubro, K. (2025). Strategi pembelajaran (PJBL) aktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(1), 223-235.
- Andaryani, E. T. (2023). Pertimbangan Multikultural Dalam Pengembangan Kurikulum Untuk Menghadapi Keanekaragaman Siswa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(11).
- Anjani, D. N., & Fadhil, A. (2025). Revitalisasi Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Kesadaran Sipil Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 70-81.
- Anwar, K. (2022). *Berislam Secara Moderat (Ajaran dan Praktik Moderasi Beragama dalam Islam)* (M. M. Zinal & N. Nurdin (eds.)). CV Lawwana.
- Anzalman, A., Thaheransyah, T., Karim, S., Wahyuni, S., & Yunaldi, W. (2025). Multikultural Menurut Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 709-731.
- Aqib, Z. (2009). *Menjadi guru profesional berstandar nasional*. Yrama Widya.
- Arifin, M. Futuhal, and Rahmat Setiawan. "Islam Dan Keberagaman: Pengembangan Materi Ajar Berbasis Multikultural." Penerbit Tahta Media (2025).
- Arifin, Z. (2012). *Pengembangan manajemen mutu kurikulum pendidikan Islam*. DIVA Press.

- Arikarani, Y., Suradi, S., Ngimadudin, N., & Wulandari, Y. (2025). Pendidikan Agama Islam multikultural: Konsep, nilai dan praktiknya di lingkungan madrasah. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 233-254.
- Aryani, W. D. (2025). Implementasi Model Discovery Learning Dengan Pendekatan Deep Learning Pada Mapel Ips. *Ristek: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 10(1), 139-153.
- AS, W. T., Sinaga, I. P., & Siregar, P. A. (2025). Peran dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Terhadap Era Globalisasi. *Journal Of Education*, 5(2), 848-854.
- Aslan, & Pugu, M. R. (2025). Pergeseran Makna Religius: Pengaruh Interaksi Budaya Global Terhadap Tradisi Lokal. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia Vol.*, 3(2), 158-168.
- Asroruddin, M. A. J., & Marta, P. N. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.186>
- Asvin, M. A. R., & Sungkono. (2022). Konsep arti islam dalam al-qur'an. *Al-Mikhraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 2(1), 50-64.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj>
- Azis, A., Rizqi, A. F., & Indah, L. L. (2025). Tantangan dan Problematika Pendidikan Masa Kini dalam Perspektif Islam di Era Globalisasi. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 224-240.
- Azra, A. (1999). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (1999). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (1999). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2014). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III. Kencana Prenada Media Group.
- Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik.

- Badriah, S., Haliza, N., Safitri, N., Noormila, C., & Jasiah, J. (2025). Strategi Efektif Menggunakan Video Dalam Pembelajaran Pai Berbasis Desain Instruksional. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 9(2), 157-173.
- Bahari, M. F. Y., & Mauludin, H. (2025). Pembentukan Identitas Muslim di Era Globalisasi Berbasis Nilai-Nilai Islam. *Jurnal Pendidikan*, 7(3), 1827-1837.
- Bahrain, S., Indrawati, T. P., & Khaldun, R. (2024). Relevansi Al-Qur'an, Hak Asasi Manusia, dan Gender dalam Melindungi Hak Kehormatan Pribadi di Era Digital: Tinjauan Literatur. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(4), 154-172. <https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v11i4.2642>
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Banks, J. A. (2019). *An introduction to multicultural education* (6th ed.). Pearson.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2010). *Multicultural education: Issues and perspectives* (7th ed.). Wiley.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2010). *Multicultural education: Issues and perspectives* (7th ed.). Wiley.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives* (10th ed.). Wiley.
- Barokah, A., Nurlaela, S., Ardana, L. N., Vega, N., & Kirana, P. (2024). Strategi Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Toleransi Pada Siswa Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13914-13922.
- Bar-Tal, D. (2002). The elusive nature of peace education. In G. Salomon & B. Nevo (Eds.), *Peace education: The concept, principles, and practices around the world* (pp. 27-36). Lawrence Erlbaum Associates.
- Bin, Y. O. (2021). Konsep tasamuh menurut al-quran dan relevansinya dengan kepribadian konselor konvensional.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Capaian Pembelajaran Lengkap Nomor 032 TH 2024 Tentang Capaian Pembelajaran SD - Scribd, diakses Februari 9, 2026, <https://id.scribd.com/document/748962148/Cp-Lengkap-Nomor-032-Th-2024-Tentang-Capaian-Pembelajaran-Sd>.
- Chanra, M., & Kasman, S. (2025). Memisahkan Agama dan Politik : Sebuah Tinjauan Teoretis dan Praktis. *Jurnal Kolaboratif*

- Sains, 8(2), 1247–1256.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.6863>
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. New York: Free Press.
- Dalimunthe, R. M. (2025). Menegosiasikan Keimanan di Dunia Digital: Studi Psikologi Keberagamaan pada Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 03(03), 1334–1344.
- Daradjat, Z. (2011). *Ilmu pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Datuk, A., & Nobisa, S. N. (2021). Nusa Toleransi Terindah (NTT) untuk Merawat Nilai-Nilai Pendidikan Multikutural di SMA Negeri 8 Kota Kupang dalam Perspektif Kearifan Lokal. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 69-78.
- Delors, J. (Chair), & International Commission on Education for the Twenty-first Century. (1996). *Learning: The treasure within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century*. UNESCO.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. New York: Macmillan.
- Dewi, P. S. D., Pujianti, P. R., & Magta, M. (2020). Penerapan Pendidikan Inklusif Pada Pembelajaran Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 87-97.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kiai*. LP3ES.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kiai*. LP3ES.
- Dyta, P. S. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smpn 1 Penengahan Lampung Selatan (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Efendi, R., Razzaq, A., & Imron, K. (2024). Analisis Konsep Metode Pembelajaran Menurut Perspektif Al Quran Surah An Nahl Ayat 125. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8858-8866.
- Erawati, I. L. (2016). Pendidikan karakter bangsa pada anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Esposito, J. L. (2011). *What everyone needs to know about Islam*. Oxford University Press.
- Fadillah, I. U., Harianja, J. A., Putri, W. S., & Setiawan, A. (2025). Analisis Faktor Pemicu Radikalisme Pada Remaja Serta

- Dampaknya Pada Demokrasi. *Journal of Golden Generation Education*, 1(2), 50–56.
- Faizin, M. M., Estu, N. P. M., & Fatimatus, A. S. (2024). Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Penguatan Nilai Tasamuh Di Lembaga Pendidikan. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 11(02), 187-.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51311/nuris.v11i2.574>
- Fajrussalam, H., Rahmania, A., Ningsih, J., Khofifah, M., Mulyanti, P., & Kaaffah, S. (2022). Menumbuhkan Sikap Toleransi Antar Agama Di Lingkungan Multikultural Kepada Anak Sesuai Ajaran Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 3–11.
<https://ejournal.unika-bogor.ac.id/index.php/jpg/index>
- Fazillah, N. F. N. (2024). Integrasi konsep moderasi beragama dalam pengembangan materi pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 9(1), 136-150.
- Febriyanti, A., Niswati, A. K., Zuhri, S., & Hidayat, W. (2025). Identifikasi kesulitan guru PAI dalam pelaksanaan penilaian afektif di SDN Kahal Kota Cilegon. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 01-10.
- Feri, D. O., Sabri, A., & Nelwati, S. (2025). Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Nilai-Nilai Spiritual Dan Kearifan Lokal Di SD Negeri 13 Lolong. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2), 791-800.
- Firmansyah, Ali, M., Rosad, A., & Noviani, D. (2025). Peran Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dalam Membangun Pranata Sosial. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 492–501.
- Freire, P. (1967). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Freire, P. (1967). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum.
- Furnivall, J. S. (2010). *Netherlands India: A study of plural economy* (Reprint ed.). Cambridge University Press.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Guspani, R., Satrisno, H., Rizka, Y., Irawan, B., & Merliana, S. R. (2025). Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran

- Pendidikan Agama Islam. Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam, 17(2), 138-153.
- Hadi, S., & Husna, E. N. M. (2025). Toleransi Sebagai Solusi Alternatif Untuk Menghadapi Radikalisme Agama. Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1), 197-210.
- Hadisaputra, P. (2020). Pendidikan Toleransi Di Indonesia: Studi Literatur. Dialog, 43(1), 75-88.
<https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.355>
- Hakim, Lukman, and Abdul Haris. "Pendidikan Agama Islam (PAI) Multikultural Perspektif Pembelajaran Integratif." Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam 7.1 (2024): 117-136.
- Hakim, S. (2024). Strategi Rasulullah SAW Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keadilan , Kesetaraan , dan Anti-Diskriminasi dalam Sistem Pendidikan Islam di Madinah. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin, 1(2), 135-146.
<https://ejournal.staialamin.ac.id/index.php/pai>
- Hamka. (2020). Tafsir al-Azhar (Jilid 1). Gema Insani.
- Hanifah, U. S., Septarea, A. H., Aura, S. F., Ramadhani, W., & Silvira, Y. (2020). Peran Pendidikan Islam terhadap Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik. Journal of Asian Education and Development Studies, 9(2), 252-264.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1391>
- Harismawan, A. A., Ikmal, H., & Muchtar, N. E. P. (2023). Implementasi dan Pembentukan Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 19(1), 59-73.
- Hasan, N., & Anam, K. (2024). Hadis-hadis etika dalam kehidupan sehari-hari. Elsi Pro.
- Hasni, A., & Nadra, N. (2025). Relevansi Pendidikan Islam dalam Membangun Kepemimpinan Remaja di Era Digital. Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, 9(2), 200-216.
- Hayat, M. N., Rossi, R. J., Ainayya, M. Q., & Mu'alimin, M. A. (2025). Strategi pendidikan Islam dalam membangun karakter multikultural pada peserta didik. Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat, 2(1), 247-258.
- Heriyudanta, M. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Islam Moderat dalam Proses Pendidikan Islam di Indonesia. MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 203-215.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/maalim.v4i2.725>

- Hidayat, I. W. (2025). Analisis Isi Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 1 SD: Tinjauan Struktur, Bahasa, Ilustrasi, Kurikulum, dan Representasi Sosial Budaya. *Jurnal Ilmiah Madrasah*, 2(2).
- Hidayati, N., Yusuf, A., Nasir, M., & Kirom, A. (2023). Relevansi Nilai-Nilai Multikultural Dalam Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan Dimensi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 51-59.
- Hilalludin, Suciowati, S. N., Sugari, D., & Maryana, E. D. (2025). Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat Digital dan Dampaknya terhadap Identitas Remaja. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 1-14.
- Hilmin, H. (2024). Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum merdeka belajar pendidikan agama Islam. *Muaddib: Islamic Education Journal*, 7(1), 37-45.
- Hind, I. A., & Tirtoni, F. (2023). Analysis of Character Education As an Effort to Realize the Profile of Pancasila Students in the 5.0 Era. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(3), 3346-3355. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i3.2927>
- Hoddin, M. S., Wahidmurni, W., Basri, B., & Barizi, A. (2023). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(03).
- Hoddin, M. S., Wahidmurni, W., Basri, B., & Barizi, A. (2023). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(03).
- Huda, K., & Abid, L. A. (2025). Integrasi kearifan lokal dalam kurikulum pai untuk menangkal radikalisme di era digital. *Arsy*, 9(1), 58-70.
- Hudaddin, M. A. A., & Arini, A. (2026). Implementasi Model Pembelajaran Inquiry Dalam Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran PAI Di SMK 10 Nopember Jombang. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 4(1), 641-650.
- Ilma, L. S., & Suyudi, M. (2025). Metode Dialog Interaktif sebagai Strategi Pembelajaran Al-Qur'an Hadits dalam Meningkatkan Kesadaran Akhlak: Studi Refleksi Hadits tentang Menjaga

- Diri dari Api Neraka. DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 347-358.
- Indah, N. S., Tri, W. S., EdvinaSyahnanda, Khadijah, & Darlis, A. (2023). Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(2), 413-420. <https://doi.org/>: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7575760> p-ISSN:
- Irawansah, O., & Pugu, M. R. (2025). Tradisi Lokal Sebagai Penanda Identitas: Respon Keagamaan Terhadap Tantangan Globalisasi. Jurnal Pendidikan, 3(2), 169-178.
- Irsad, M. (2016). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah (Studi Atas Pemikiran Muhaimin. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 1(2), 230-245.
- Ishak, I., & Tobroni. (2025). Kajian Materi Pendidikan Agama Islam dengan Pendekatan Antropologi. Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat, 2(1), 175-187.
- Islami, N., Nur, R. F., & Nurul, T. A. (2023). Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Islam. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 1(4), 1038-1043. <https://doi.org/><https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.521>
- Jamiah, K., Hermanto, E., Febriansyah, R., & Perdana, W. (2025). Keadilan sosial dalam perspektif alquran dan pancasila. Panangaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, 9(1), 68-89. <https://doi.org/><https://doi.org/10.14421/panangaran.v9i1.4278>
- Janah, N. R., Mudin, I., Alfinnas, H., Mulyana, A., & Udin, T. (2025). Interrelasi Pendidikan Islam , Budaya , dan Identitas di Era Digital: Studi Fenomenologis dalam Konteks Multikultural Indonesia. Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam, 14(1), 741-757.
- Juergensmeyer, M. (2017). Terror in the mind of God: The global rise of religious violence (4th ed.). University of California Press.
- Kadir, A., Nahar, S., & Nur, W. (2019). Nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sma negeri 18 Medan. Edu Riligia, 3(1), 71-81.
- Karenina, A. D., & Buana, B. K. (2022). Tinjauan penyempurnaan kurikulum bahasa Arab berdasarkan KMA 183 dan 184

- Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 1865-1876.
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Panduan guru: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (SMA/SMK/MA Kelas XII) (Kurikulum Merdeka). Pusat Perbukuan.
- KMA 183 Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Dan Bahasa Arab Pada Madrasah 2019, diakses Februari 11, 2026, <https://id.scribd.com/document/505363692/KMA-183-Kurikulum-Pendidikan-Agama-Islam-PAI-Dan-Bahasa-Arab-Pada-Madrasah-2019>.
- Komala, Y. W., Irmawati, Hidayat, M., Suhardi, M., & Lestari, M. I. (2025). Pluralisme budaya dan toleransi beragama: strategi membangun harmoni sosial dalam konteks kehidupan berbangsa yang multikultural. *Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan* Vol., 1(1), 31–40.
- Küng, H. (2010). *Islam: Past, present and future*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kurikulum, P. A. I. Konsep dasar dan filosofi kurikulum pendidikan agama islam multicultural, Ilya.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Clarendon Press.
- Laila, N. H. (2025). Membangun Toleransi Beragama di Era Digital : Perspektif Moderasi Beragama. *Journal of Religious Harmony*, 2(2), 73–86.
- Latifah, & Ngilimun. (2025). Teknologi Digital sebagai Ruang Petemuan Agama dan Budaya Masyarakat Multikultural. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 01(02), 51–64.
- Lickona, T. (2012). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam.

- Lickona, T. (2012). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- Mabruri, M. (2025). *Strategi Guru PAI dalam Pembelajaran bagi Siswa Disabilitas Netra di Man 2 Sleman* (Doctoral dissertation).
- Madjid, N. (1992). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Mizan.
- Mafaza, V., Khobir, A., Zahra, F. D., & Firdaus, M. J. F. (2025). Peran Ekoteologi dalam Pendidikan Islam: Belajar Menjaga Alam sebagai Amanah Tuhan. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 161-178.
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah: Perspektif ekonomi Islam kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Mahfud, C. (2010). *Pendidikan multikultural*. Pustaka Pelajar.
- Majid, A. N. H. A., Aisyah, U., Shidiq, A. M. R., Afiah, R. A., Rosyada, S. A., Agustina, A., ... & Fauziah, D. H. *Islam dan Moderasi Beragama dalam Pendidikan*.
- Makmun, F., Mansur, R., & Safi'i, I. (2021). Konsep Pendidikan Islam Multikultural Dalam Pandangan KH. Muhammad Tholchah Hasan Dan Ali Maksum. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(4), 69-85.
- Marzuqi, M. (2023). *Pengembangan Pendidikan Islam Multikultural: Perspektif Pemikiran Prof. Dr. KH Muhammad Tholchah Hasan* (pp. 1-152). Literasi Nusantara
- Mashuri, Saepudin, and Ahmad Syahid. "Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam perspektif multikultural." (2024).
- Masruroh, M. K., Kaharani, C. F., Syaikhon, M., & Setyastanto, S. (2025). Pendidikan Multikultural Di Indonesia: Strategi Transformasi Menuju Masyarakat Inklusif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 5(4), 4913-4917.
- Mawarni, A., Syawaluddin, W. H., Nashiruddin, M., Fachriansyah, H., & Damanik, A. (2024). Etika Pergaulan dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 10-13. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 534-44.
- Melati, & Hamdanah. (2024). Multikulturalisme : Memahami Keanekaragaman Dalam Masyarakat Global Dalam Perspektif Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1504-1515.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10660>

- Mohammad, A. Y. S. B. (2019). Pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan multikultural di era digital. In *Prosiding Seminar Nasional Prodi Pai Ump*.
- Mubarok, M. G. A., & Muslihah, E. (2022). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Membentuk Sikap Keberagaman Dan Moderasi Beragama. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(01), 115–130.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32678/geneologipai.v9i1.6616>
- Mubarok, Ramdanil. "Multikulturalisme & Moderasi Beragama: Teori dan Praktik dalam Pendidikan Agama Islam." (2025): 1-254.)
- Mubin, N., Saâ, A., & Ertanti, D. W. (2020). Integrasi Nilai-Nilai Toleransi dalam Kurikulum PAI di SMA. *Vicratina: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 5(8), 100-108.
- Muchtar, N. E. P., & Safitri, L. N. (2025). Persepsi Siswa terhadap Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam melalui Pembelajaran Al-Qur'an. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 223–232.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i1.7070>
- Muchtar, N. E. P., & Sriwilujeng, N. N. (2025). Pembentukan Karakter Kemandirian Sosial dan Tanggung Jawab Pada Strawberry Generation. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 8(4), 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v8i4.8719>
- Muchtar, N. E. P., Arfan, M. M., & Wiyanti, E. (2025). Resilience Strategis Of Islamic Relegious Education Teachers In Facing Relegious Diversity In Junior High School Students. *Jurnal CENDEKIA: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 17(01), 186–200.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37850/cendekia>
- Muchtar, N. E. P., Inayati, I. N., Mukaromah, N., Rusmayani, & Riani, D. (2025). Media dan Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam (N. N. Hidayati (ed.)). Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.
- Muchtar, N. E. P., Nurbaya, S., Irwan, Mukaromah, N., & Faozan. (2025). Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama (N. N.

- Hidayati (ed.)). Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.
<https://core.ac.uk/download/pdf/267023744.pdf>
- Muhaimin. (2005). Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam: Di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. (2015). Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. (2015). Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. RajaGrafindo Persada.
- Mukhroman, I. (2025). Viralitas Surat Al-Fatihah Dewa 19: Negosiasi Makna Agama di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 78–91.
<https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4207>
- Muktamar, A., Mahendra, Y. I., & Sermayana, A. (2024). Analisis perbandingan efektivitas penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(2), 130-143.
- Mulyanti, V., & Muhajarah, K. . (2025). Religious Moderation as a Bridge to Peace: Fostering Tolerance, Mutual Understanding, and Interfaith Dialogue. *Jurnal Indonesia Studi Moderasi Beragama*, 2(1), 35–45.
<https://doi.org/10.64420/jismb.v2i1.213> (Original work published April 29, 2025)
- Munarun, A., & Astuti, N. Y. (2025). Analisis Pandangan Multikultural Dalam Pendidikan Agama Islam: Rekonstruksi Konsep Dan Praktiknya. *Istifkar: Media Transformasi Pendidikan*, 5(1), 38-63.
- Musbikin, I. (2021). Pendidikan Karakter Toleransi (Rizal (ed.)). Nusa Media.
- Musdalipah, M., Lapude, R. B., & Muktamar, A. (2023). Profil Pelajar Pancasila Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(4), 164-179.
- Nababan, D., Marpaung, A. K., & Koresy, A. (2023). Strategi pembelajaran project based learning (PJBL). *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(2), 706-719.
- Naila, S., Asiah, S., & Ifendi, M. (2025). Dinamika Pendidikan Islam di Era Reformasi : Dari Tradisional ke Modern. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 03(01), 29–38.

- Nainggolan, W. R., & Mesra, R. (2025). Transformasi Media Sosial Dalam Mendapatkan Modal Sosial Pada Komunitas Digital di Kota Batam. *Jurnal Masyarakat Digital Jurnal Masyarakat Digital*, 1(3), 112–123.
- Nasir, R., & Abdullah, R. S. (2021). Penulisan Buku Perjalanan Al-Qurâan Tua di Bumi Persaudaraan, Dakwah Kesultanan Ternate di Alor. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 105–112.
- Nata, A. (2016). Ilmu pendidikan Islam. Prenada Media.
- NATASIA, P. L. (2026). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Kepedulian Sosial Pada Peserta Didik Di Smp Negeri 17 Pesawaran (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Nathearia, Himmawan, D., & Syariah, A. P. (2025). Government and Community Efforts to Address the Problems of Intolerance, Radicalism and Terrorism in Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam*, 1(3), 90–103.
- Nendissa, J. E. (2025). Dinamika Agama dalam Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Praktik Keagamaan di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 1–20. <https://doi.org/10.1177/0731121416647361.2>
- Ni'mah, U. N. I., Elhady, A., & Mustofa, T. A. (2024). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Siswa Inklusi di Sekolah Menengah Pertama Kelas Delapan. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 7 (1), 104–114.
- Nieto, S. (2010). *Language, culture, and teaching: Critical perspectives* (2nd ed.). Routledge.
- Nieto, S. (2010). *Language, culture, and teaching: Critical perspectives* (2nd ed.). Routledge.
- Ningrum, K. S. (2025). Tantangan Dakwah Digital Dalam Sikap Beragama Teologi Inklusif: Pandangan Komunitas Muslim Moderat Indonesia Di Media Sosial. *Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(6), 1100–1110.
- Noviansyah, P. (2025). Menangkal Radikalisme dengan Semangat Pancasila. *Journal of Social and Communication*, 1(3), 67–77.
- Nurjannah, S., Pratama, F. Y., & Ichsan, I. (2025). Analisis Kreativitas Mahasiswa PGSD dalam Merancang Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Kontekstual. *FONDATIA*, 9(3), 531–547.

- Ode, L. W. (2025). Islam dan Keadilan Sosial: Perspektif Teologis dan Praktis (T. Arianto (ed.)). CV Gita Lentera.
- Pahrudin, A. (2017). Buku: Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural: Perjumpaan Berbagai Etnis Dan Budaya.
- Pajrin, N. A. S., Asyafah, A., & Anwar, S. (2019). Studi Prosedur Penilaian Domain Afektif Oleh Guru PAI Di Smp Negeri 2 Bandung Dan Smp Salman Al-Farisi Bandung. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 6(2), 157-175.
- Pamungkas, S. T. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Kemajemukan dalam Al- Qur ' an sebagai Solusi Diskriminasi di Indonesia. *Ar-Rosyad*, 1(2), 159-180. <https://ejournal.iaikhazin.ac.id/ojs/index.php/Ar-Rosyad/about/Implementasi>
- Parekh, B. (2000). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory*. Harvard University Press.
- Parekh, B. (2006). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory* (2nd ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Parnawi, A., & Syahrani, M. (2024). Pendidikan Inklusif dalam Islam Untuk Membangun Kesenjangan dan Keadilan. *Jurnal Arriyadhah*, XXI(I), 79-87.
- PPIM UIN Jakarta. (2021). Potret toleransi dan radikalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa Muslim Indonesia. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi pendidikan multikultur untuk menumbuhkan nilai toleransi agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272-303.
- Prawirosastro, C. L., Muchtar, N. E. P., Hidayati, N. N., Puspitasari, I., & Suriadi. (2025). Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Kontemporer (N. N. Hidayati (ed.)). Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.
- Puspitasari, M. (2022). Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2. *Jurnal Inovasi penelitian pendidikan dan pembelajaran*, 2(3).
- Puspitasari, Y. (2023). Etika Komunikasi Tentang Kejujuran Dan Keadilan Dalam Prespektif Al-Qur'an. *TABAYYUN JURNAL KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM*, 4(1), 17-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.61519/tby.v4i1.45>

- Putri, H. N. (2025). Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Menyikapi Digitalitas. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 195–199.
- Radhiati, R., Rizal, S. U., & Hikmah, N. (2024). Pengembangan modul digital pendidikan agama Islam berbasis kearifan lokal Kalimantan pada materi penyebar ajaran Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 9(2), 296–308.
- Rahayu, S. (2023). Implementasi pendidikan agama Islam berbasis multikultural dalam membentuk karakter peserta didik pada SMK Ulil Albab dan SMK Al-Musyawirin Kabupaten Cirebon. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3297–3310.
- Rahman, F. (2011). *Major themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahman, F. (2011). *Major themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahmat. (2019). *Pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan multikultural*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rahmat. (2019). *Pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan multikultural*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rahmawati, Firdaus, Agustina, D., & Aisyah. (2024). Kesetaraan Manusia sebagai Makhluk Multikultural dalam Pendidikan Islam dan Keadilan Multikultural dalam Pendidikan Islam. *Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11363–11371. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11904>
- Rahmawati, J. R., Puspita, D. A., Azis, M. Z., & Fadhil, A. (2025). Dampak Media Sosial terhadap Religiusitas Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 168–182.
- Rahmayanti, N. S., Ramadhani, N., & Azis, A. (2025). Tantangan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi dalam Menjaga Nilai-Nilai Keislaman. *Jurnal Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 2(1), 105–116.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Renaldi, R. (2025). PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENYIKAPI PERUBAHAN SOSIAL DAN TEKNOLOGI. *Jurnal Tarbawi*, 8(1), 107–124.

- Rida, M. M. (2022). Moderasi beragama perspektif Al-Qur'an dalam kurikulum 2013 PAI jenjang menengah atas (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Ridhwan, B. (2020). Pendidikan Multikultural dalam Kurikulum Pai. *El-Islam*, 2(02), 1-26.
- Ridwan, M. F., & Nadirah, Y. F. (2025). Manajemen Kelas Inklusif: Kolaborasi Guru Kelas dan Guru Pembimbing Khusus. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 219-238.
- Rifa'i. (2025). *Sosiologi Pendidikan Islam Konteks Dan Tantangan* (A. Suhadi (ed.)). CV. Abad Cakrawala Nusantara.
- Romlah, S., & Rusdi, R. (2023). Pendidikan agama Islam sebagai pilar pembentukan moral dan etika. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 8(1), 67-85.
- Rosyid, M. H. A., Amalia, D., Q, F. L., & Sa'adah, D. A. (2025). Moderasi Beragama di Era Digital: Tantangan Dakwah di Tengah Polarisasi Media Sosial pada Mahasiswa Semester 1 IAINU Tuban. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(4), 216-225.
- Rosyidin, M. A., Khoir, Q., & Maskuri. (2025). Genealogi pesantren sebagai basis tumbuh dan berkembangnya pendidikan Islam multikultural. Pascasarjana Universitas Islam Malang.
- Rosyidin, M. A., Khoir, Q., Damanhuri, & Fikri, A. D. (2025). Multicultural values in the concept of Islamic brotherhood: A study from the hadith perspective. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.55987/njhs.v6i1.194>
- Ruslam. (2026). Genealogi Jam'iyah Islamiyah: Perspektif Pendidikan Islam Multikultural (A. R. Hidayat (ed.)). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Saeed, A. (2014). *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach*. London: Routledge.
- Saenong, B., Abubakar, A., & Mardan. (2025). Religious Freedom Theology in Q . S . Al-Baqarah (2): 256 and Its Implications for Interfaith Harmony in North Sulawesi. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(2), 105-121. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/twl.v4i2.6152>
- Saepullah. (2023). *Sosiologi Antropologi Agama* (H. Jawahir (ed.)). Cv. Pustaka.
- Safiqo, Tatik, and Abdul Ghofur. "Peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter religius peserta didik di

- era digital." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.1 (2025): 81-90.).
- Salamudin, C., & Sidiq, H. P. (2025). Nilai-Nilai Pendidikan Berwawasan Gender Dalam Buku Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas XII SMA. *MASAGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 51-55.
- Saleh, A. R., Djollong, A. F., Letari, U., Irma, I., Tajuddin, T., & Taufik, T. (2025). Integrasi Kearifan Lokal dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 323-330.
- Sari, N. I., Nur, M. G. R., Yusam, A. T., Ainul, A. Y., & Qisom, S. (2024). Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Prespektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir*, 9(1), 181-192. <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>
- Satria, R., Amaliyah, N. H., Baby, E. S., Supriyanto, A., & Ulfatin, N. (2020). Landasan Antropologi Pendidikan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 2(1), 49-65. <https://doi.org/10.29300/ijssse.v2i1.2718>
- Saudale, J., Lattu, I. Y., & Ludji, I. (2025). Toleransi antaragama dalam perspektif civil sphere: Membangun keberagaman harmonis di Kota Kupang. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 7(1), 81-92.
- Sawaty, Ikhwan. "Posisi Pendidikan Islam Dan Pengaruhnya Pada Isu Multikulturalisme." *Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner 2.1* (2025): 103-120.
- Sayuti, F. N. A., & Sitorus, S. (2025). Pengembangan Kurikulum PAI Yang Responsif Gender Sebagai Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Dalam Dunia Pendidikan. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(1), 423-432.
- Septiawan, N. E. R. S. (2025). Dinamika Struktur dan Institusi Terhadap Media Sosial dalam Pemahaman Kebudayaan pada Generasi Milenial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Inklusif*, 1(1), 17-23.
- Setiawan, Selamat Awan. "Tantangan guru pai mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran pendidikan agama islam." *Jurnal Inovasi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (JIPMI)* 3.1 (2024): 49-64.)

- Setyawan, H. A., & Roqib, M. (2025). MEMBANGUN Peradaban: Dinamika Kelembagaan Pendidikan Islam Melalui Surau Masjid, dan Pesantren Indosenia _1. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 289–315.
- Shihab, A. (1998). *Islam inklusif: Menuju sikap terbuka dalam beragama*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (15 jilid). Lentera Hati.
- Sholahudin, T., Abid, I., Ikhwanudin, M., Arrizky, M. N., & Al-Ghozali, U. M. (2025). Evaluasi hasil pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) tinjauan terhadap ayat Al-Qur'an dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 165-171.
- Sholihul Anwar, Anwar, et al. "Pendidikan Agama Islam: Pluralisme Dan Multikultural." (2024).
- Sinambela, S. M., Saragih, M. D., Lumbangtobing, J. N. Y., Lase, M., & Iqbal, M. (2025). Dinamika Kebudayaan dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(2), 65–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1521>
- Sitanggang, Tiya Mariadi. "Inovasi Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Budaya Lokal." *Analysis 3.1* (2025): 40-45.)
- Sleeter, C. E., & Grant, C. A. (2009). *Making choices for multicultural education: Five approaches to race, class, and gender* (6th ed.). Wiley.
- Soniya, G., Ardani, M. D., Riaz, N. F., & Aulia, N. (2025). Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara. *JOURNAL OF EDUCATION*, 1(2), 218–223.
- Sudarmin, S., & Amaluddin, A. (2025). Penguatan Moderasi Beragama melalui Pendidikan Agama Islam. *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, 1(4), 84-95.
- Sumadiyah, S., & Wahyuni, S. (2024, June). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural Dalam Membangun Moderasi Beragama Di UNISKA Kediri. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat* (Vol. 1, No. 1, pp. 15-33)
- Sumadiyah, Siti. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Multikultural dalam Membangun Moderasi Beragama di

- Universitas Islam Kadiri (UNISKA)." Seminar Pendidikan Agama Islam. Vol. 3. No. 1. 2024.
- Sumardianto, E., Makhshun, T., & Muchtar, A. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Budaya Viral. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9(4), 891–913.
- Suradi, A. (2018). Pendidikan Islam multikultural: Tinjauan teoritis dan praktis di lingkungan pendidikan. Samudra Biru.
- Suradi, A. (2018). Pendidikan Islam multikultural: Tinjauan teoritis dan praktis di lingkungan pendidikan. Samudra Biru.
- Suryadi, R. A. (2022). Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama islam. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 1-12.
- Suryadinata, A. M. I. (2025). Metode Pembelajaran Kolaboratif Dalam Konteks Pendidikan Islam: Membangun Kerja Sama Dalam Pembelajaran. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3468-3474.
- Susanti, C., & Atika, F. N. (2025). Pembelajaran PAI Berbasis Universal Design For Learning (Udl) Di Kelas Inklusi. *Merdeka Indonesia Jurnal International*, 5(2), 537-547.
- Syafrudin, M., Nasaruddin, & Ihwan. (2023). Tafsir Ayat -Ayat Kemasyarakatan (Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Modern). *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(1), 135–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/tajdid.v7i1.1851>
- Syathori, A. (2023). Urgensi Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (D. Djubaedi, Jamali, & Sumanta (eds.)). Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia.
- Tanjung, A. (2025). Pendidikan dan Gender: Studi Tentang Bias Gender dalam Buku Pelajaran Agama Islam. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(4), 198-208.
- Tilaar, H. A. R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional. Grasindo.
- Ujiyanti, L. N., & Hanif, M. (2025). Evaluasi Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam:

- di SMP Negeri 3 Kedungbanteng. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 8(1), 319-331.
- Umam, R., & Husain, A. M. (2024). Pengintegrasian kearifan lokal dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Kritikalitas dan alternatif solusi berdasarkan literatur. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 5(2), 1-12.
- UNESCO. (2005). *UNESCO guidelines on intercultural education*. UNESCO.
- UNESCO. (2017). *Preventing violent extremism through education: A guide for policy-makers*. Paris: UNESCO.
- van den Berghe, P. L. (1981). *The ethnic phenomenon*. Elsevier.
- Vinna, S. A. D., Mirda, M. R., & Habib, S. H. (2025). Collaborative Teamwork Development in Islamic Education Management: A Thematic Study of Qur'anic Verses. *Education Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (Edium)*, 3(1), 1-16.
- Viratama, I. P., khafidatul Kamilah, S., & Mirnawati, L. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Pelatihan Guru untuk Menghadapi ABK di Kelas Multikultural. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 17(1), 51-60.
- VIRGI, A. (2023). *Implementasi Model Pembelajaran Kolaboratif Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas Viii Di Mts Al-Mubarak Bukit Kemuning Lampung Utara* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Wahid Institute. (2022). *Laporan tahunan toleransi dan intoleransi beragama di Indonesia*. The Wahid Institute.
- Wahid Institute. (2022). *Laporan tahunan toleransi dan intoleransi beragama di Indonesia*. The Wahid Institute.
- Wahid, A. (2007). *Islam kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan transformasi kebudayaan*. The Wahid Institute.
- Walidin, W., Ali, Z., & Siregar, B. (2025). Rekonseptualisasi Peran Guru dalam Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 233-248. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v8i2.3726>
- Wardani, R. R. W. A. (2025). Dinamika Ekosistem Pendidikan dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di lingkungan Sekolah Formal. *JOURNAL OF EDUCATION*, 7(4), 3199-3213.
- Wibowo, A. (2012). *Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter bangsa berperadaban*. Pustaka Pelajar.

- Wiwik Dyah Aryani, (2025) Penerapan Model Pembelajaran Collaborative Learning Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI); Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi 5(4), 226-230
- Yanto, F. (2025). Pendidikan Berbasis Multikultural Berbasis Budaya (S. Rizal (ed.)). Universitas Muhamadiyah Malang.
- Yaqin, M. A. (2005). Pendidikan multikultural: Cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan. Pilar Media.
- Yuwono, I., & Mirnawati, M. (2021). Strategi pembelajaran kreatif dalam pendidikan inklusi di jenjang sekolah dasar. Jurnal basicedu, 5(4), 2015-2020.
- Zahrah, A., Putri, D., Safira, A., & Kholifah, A. (2025). Dampak Globalisasi terhadap Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendidikan Agama Islam pendidikan Islam. Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, 2(November), 230-247. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/karakter.v2i4.1478>
- Zahrotunnisa, Z., Utama, D. S. B., Farhana, Y. W., Aprilia, S. D., & Fadlil, A. (2025). Krisis Identitas dan Tantangan Pendidikan Islam di Era Digital : Analisis Perspektif Sosiologi Pendidikan. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(4), 483-494. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4jipm.v2i4.1126>
- Zaini, M., Normuslim, N., & Zulkarnain, A. I. (2025). Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 8 Palangka Raya. Jurnal Ilmiah Global Education, 6(1), 26-38.
- Zainuri, H. (2024). Pengembangan Kurikulum Pai Berbasis Kompetensi Abad 21. Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 43-49.

PROFIL PENULIS

Maidatus Sa'diyah, Lc, M.Pd.



Maidatus Sa'diyah, Lc., M.Pd. adalah dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Tebuireng Jombang. Ia menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar, dan melanjutkan S2 di Program Pascasarjana UNHASY. Selain itu, ia juga pernah menempuh studi S2 di American Open University Cairo, yang memperkaya perspektif akademiknya dalam membaca dinamika pendidikan Islam di ruang sosial yang semakin terbuka dan beragam.

Dalam kegiatan akademik, Maidatus Sa'diyah mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Pengantar Studi Islam, Studi Pengantar Islam, Sosiologi Pendidikan Islam, Microteaching, serta mata kuliah lain yang mendukung penguatan kompetensi pedagogik dan keilmuan mahasiswa dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Minat keilmuan penulis meliputi kepemimpinan pendidikan Islam, pendidikan akhlak, manajemen berbasis nilai keislaman, serta transformasi kepemimpinan lembaga pendidikan di era digital. Ia aktif mengkaji peran kepala sekolah, guru, dan pemimpin pendidikan sebagai moral and instructional leader yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan profesionalisme, inovasi, dan sensitivitas terhadap keberagaman masyarakat.

Selain mengajar, penulis terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas kepemimpinan pendidik, pendampingan keluarga dan lembaga pendidikan Islam, serta pengembangan budaya organisasi berbasis nilai. Ia juga aktif menulis buku, modul, dan artikel ilmiah di bidang Pendidikan Agama Islam dan kepemimpinan pendidikan. Melalui buku "PAI dalam Dinamika Sosial dan Multikulturalisme", Maidatus Sa'diyah berupaya menghadirkan perspektif Pendidikan Agama Islam yang kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan tantangan zaman, sekaligus meneguhkan peran PAI sebagai penguat karakter, jembatan harmoni sosial, dan fondasi peradaban yang berkeadaban dalam masyarakat multikultural.

Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd.



Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd merupakan seorang akademisi yang telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan Islam. Beliau menempuh pendidikan S1 dua kali yakni di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Pendidikan Agama Islam sedangkan satunya di Universitas Muhammadiyah Jember jurusan PIAUD, jenjang S2 beliau di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan melanjutkan S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Pendidikan Agama Islam Berbasis Interdisipliner. Saat ini beliau serta aktif mengajar di Universitas Islam Lamongan, aktif di kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan serta pondok pesantren, dan beliau juga aktif menulis beberapa buku terkait pendidikan, khususnya PAI dan beberapa artikel jurnal ilmiah. Dengan latar belakang akademik yang kuat serta pengalaman praktis di dunia pendidikan, Dr. Nicky Estu Putu Muchtar, M.Pd terus berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan Islam yang holistik, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I.

Anton, M. Pd.I.



Anton, M.Pd. adalah dosen pada Universitas Muhammadiyah Kupang pada prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang lahir di Monggo 15 Juli 1987. menyelesaikan pendidikan S-1 Prodi Pendidikan Agama Islam dan S-2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Mata kuliah yang ia ampu meliputi, Desain dan Perencanaan Pembelajaran PAI, Materi PAI MTs/MA, Materi Sejarah Kebudayaan Islam MTs/MA, Materi Aqidah Akhlak MTs/MA, Fiqih Madrasah, Manajemen Pendidikan Islam, Pengantar Studi Islam. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah. Dalam lima tahun terakhir, aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, saat ini sedang sedang melakukan penelitian tentang peran Pendidikan Islam

dalam membina Peran orangtua untuk mengatasi stanting melalui aplikasi chatboot. Ia juga aktif mempublikasikan berbagai artikel populer di media online dan artikel ilmiah pada jurnal nasional terindeks Sinta.

Muhammad Abror Rosyidin, M.Pd.



Muhammad Abror Rosyidin, M.Pd. adalah dosen pada Universitas Hasyim Asy'ari pada prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang lahir di Mojokerto 30 Maret 1994. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 Prodi Hukum Keluarga dan S-2 Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Tebuireng Jombang serta sedang melanjutkan studi S-3 di Universitas Islam Malang (Unisma). Pernah melakukan studi singkat di Universitas Ibn Thofail Maroko pada 2013. Mata kuliah yang ia ampu meliputi Studi Pemikiran Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Desain dan Perencanaan Pembelajaran PAI, Pancasila, Materi PAI MTs/MA, Kewarganegaraan, Karya Tulis Ilmiah, serta Etika Profesi Keguruan. Kini dipercaya sebagai Ketua Pusat Kajian Pemikiran Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari (PKPHA) Unhasy. Dalam lima tahun terakhir, ia aktif meneliti pemikiran pendidikan Islam dan kontribusi ulama Nusantara, serta melaksanakan pengabdian masyarakat melalui pendampingan sekolah menulis di lingkungan Tebuireng. Ia juga aktif mempublikasikan berbagai artikel populer di media online dan artikel ilmiah pada jurnal nasional terindeks Sinta dan Scopus, serta menjadi salah satu penulis buku Gus Sholah dalam Cerita dan Kenangan Santri Millenial (2020), kontributor buku Pesantren Interaction with Digital Media Technology Challenges for Santri Da'wah in The Era of Society 5.0 (2024), serta Ketua Tim Penulis Buku Pemikiran Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, Teoritis dan Praktis Buku 1 dan Buku 2.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

dalam Dinamika Sosial dan Multikulturalisme

Buku ini disusun sebagai respons terhadap dinamika sosial yang semakin kompleks di era globalisasi, di mana keberagaman menjadi realitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Perbedaan agama, budaya, etnis, dan latar belakang sosial menuntut adanya pemahaman yang bijaksana serta sikap yang inklusif dalam kehidupan bersama. Dalam konteks inilah, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis sebagai sarana pembentukan karakter, penanaman nilai moderasi beragama, serta penguatan sikap toleransi dan harmoni sosial.

Materi dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran PAI dalam menghadapi tantangan multikulturalisme. Pembahasan meliputi konsep dasar moderasi beragama, dialog antaragama, resolusi konflik, hingga praktik nyata dalam membangun harmoni sosial di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Dengan pendekatan yang integratif antara teori dan praktik, buku ini diharapkan mampu menjadi referensi yang relevan bagi mahasiswa, pendidik, dan pemerhati pendidikan Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Harapan penulis, buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan masyarakat yang damai dan harmonis. Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan kehidupan sosial yang penuh toleransi, keadilan, dan persaudaraan di tengah keberagaman.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
Penerbit HN Publishing
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur
hn.publishing24@gmail.com
<https://yph-annihayah.com>

ISBN 978-634-7602-35-0 (PDF)



9

786347

602350